



Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi

# **LAPORAN KEGIATAN**

## **PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA**

**Bogor, 19 s.d. 22 September 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara mengenai konstitusi, hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Adat Kerajaan Nusantara, Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                  | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                      | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                | <b>iii</b> |
| <b>A. PENDAHULUAN.....</b>                                  | <b>1</b>   |
| <b>A.1. Umum .....</b>                                      | <b>1</b>   |
| <b>A.2. Tujuan .....</b>                                    | <b>3</b>   |
| <b>B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>                         | <b>4</b>   |
| <b>B.1. Nama Kegiatan .....</b>                             | <b>4</b>   |
| <b>B.2. Waktu dan Tempat .....</b>                          | <b>4</b>   |
| <b>B.3. Peserta Kegiatan.....</b>                           | <b>4</b>   |
| <b>B.4. Akomodasi Peserta .....</b>                         | <b>6</b>   |
| <b>B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....</b>    | <b>6</b>   |
| <b>B.6. Uraian Kegiatan .....</b>                           | <b>6</b>   |
| <b>B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta .....</b>          | <b>6</b>   |
| <b>B.6.2. Acara Pembukaan.....</b>                          | <b>6</b>   |
| <b>B.6.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test.....</b>           | <b>7</b>   |
| <b>B.6.4. Penyampaian Materi .....</b>                      | <b>7</b>   |
| <b>B.6.5. Acara Penutupan .....</b>                         | <b>8</b>   |
| <b>C. HASIL EVALUASI KEGIATAN .....</b>                     | <b>11</b>  |
| <b>C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>.....</b> | <b>11</b>  |
| <b>C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner.....</b>                   | <b>11</b>  |
| <b>D. HAMBATAN .....</b>                                    | <b>16</b>  |
| <b>E. PEMBIAYAAN .....</b>                                  | <b>18</b>  |
| <b>F. PENUTUP .....</b>                                     | <b>18</b>  |
| <b>G. LAMPIRAN.....</b>                                     | <b>19</b>  |

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Bahan Penjelasan Teknis
6. Panduan Moderator
7. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
8. Kumpulan Materi Narasumber
9. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
10. Surat Tugas Narasumber
11. Surat Perjanjian Kerjasama
12. Daftar Hadir Peserta
13. Daftar Pertanyaan Peserta
14. Alur Kegiatan *Offline*

# PENDAHULUAN



## PELAKSANAAN KEGIATAN

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 September 2022

#### A. PENDAHULUAN

##### A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) pengkhianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak



Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara dilaksanakan secara *offline*. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Pancasila, Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

## A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



# PELAKSANAAN KEGIATAN



## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

### B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara”.

### B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 September 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

### B.3. Peserta Kegiatan

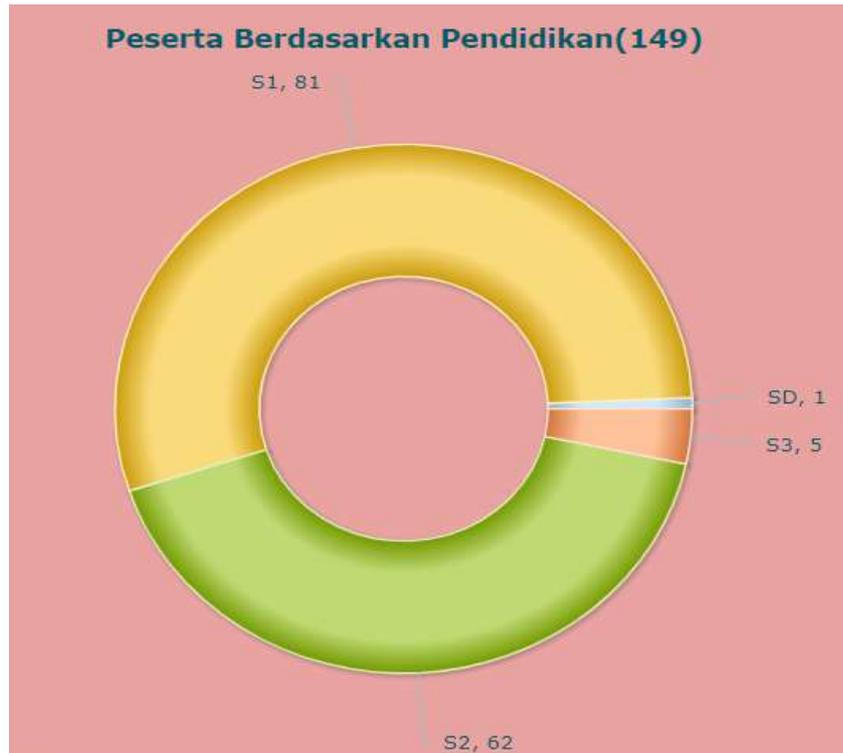
Peserta kegiatan sebanyak 111 orang pengurus dan anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara:

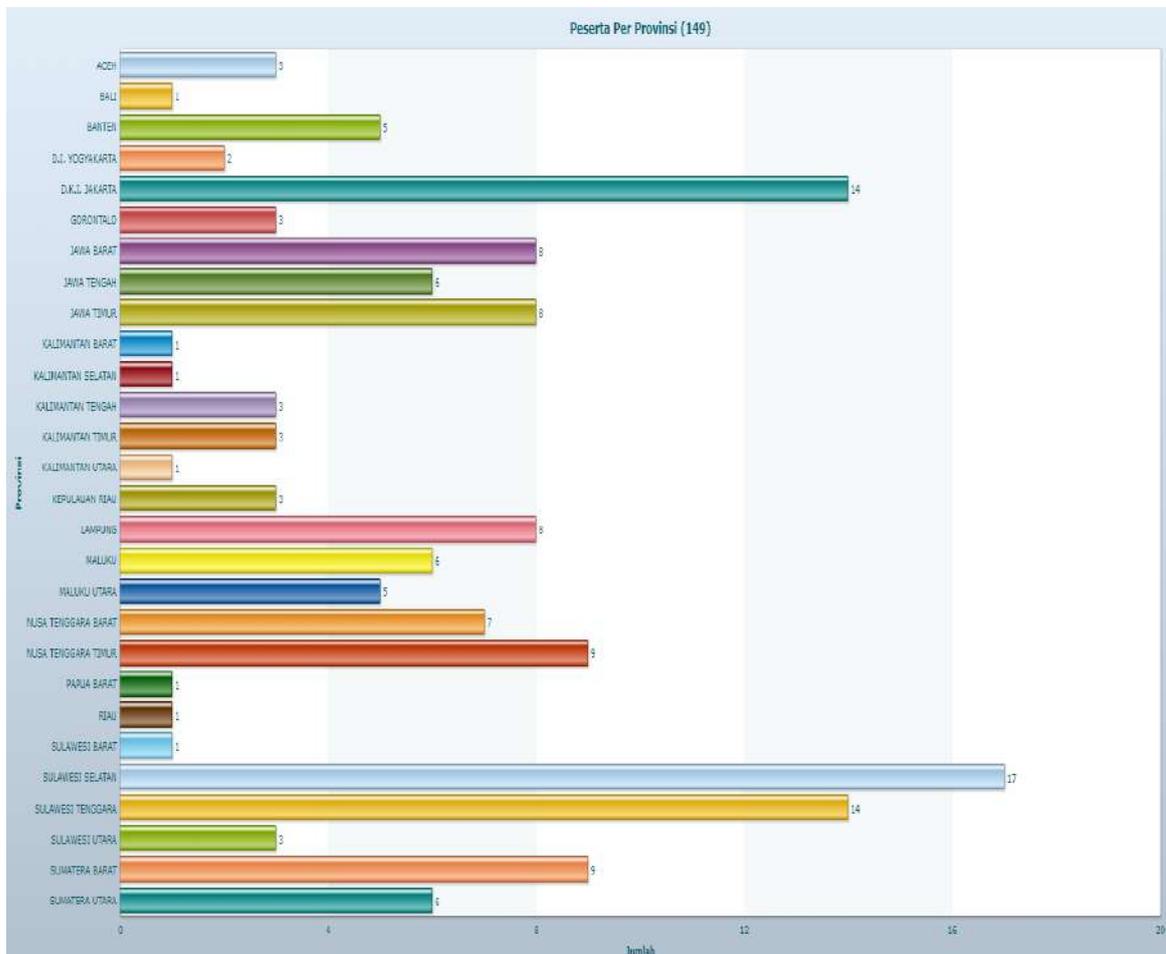
**Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin**



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



#### B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib menginap di hotel The Botanica Sanctuary yang telah disediakan oleh Mahkamah Konstitusi selama kegiatan berlangsung .
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) atau 2 (dua) orang.
- c. Peserta mendapatkan akomodasi dan konsumsi di tempat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, di luar daripada itu, segala pengeluaran selama di hotel (*mini bar* di kamar, *laundry* dan layanan *room service* lainnya) menjadi tanggungan masing-masing peserta.

#### B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
  - 1) Tas;
  - 2) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi;
  - 3) *Booklet* panduan kegiatan;
  - 4) *Block Note* dan pulpen;
  - 5) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
  - 6) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
  - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
  - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%).

#### B.6. Uraian Kegiatan

##### B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 19 September 2022 pukul 12.00 WIB – 15.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

##### B.6.2. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 19 September 2022 pukul 19.00 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt.



Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Umum Majelis Adat Kerajaan Nusantara, Bapak DR. KPH Eddy S Wirabhumi, S.H., M.M.. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Penampilan tari Cerana, Sambutan Ketua Umum Majelis Adat Kerajaan Nusantara, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

### B.6.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Selasa, 20 September 2022 pukul 07.30 s.d. 08.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test*.

### B.6.4. Penyampaian Materi

#### 1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi serta akademisi di bidang hukum dan konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

**Tabel 1. Materi dan Narasumber**

| NO. | MATERI   | NARASUMBER   |
|-----|--|--|
| 1.  | <b>Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>                  | Hakim Konstitusi<br><b>Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., M.S.</b>                        |
| 2.  | <b>Eksistensi Masyarakat adat dalam proses pengujian undang-undang di MK</b> | Guru Besar FH Universitas Hasanuddin<br><b>Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H.</b> |
| 3.  | <b>Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK</b>            | Sekretariat Jenderal MK<br><b>Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H.</b>                   |



| NO. | MATERI   | NARASUMBER   |
|-----|--|--|
| 4.  | <b>Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Indonesia</b> | Kepala Subdirektorat Budaya dan Kemasyarakatan pada Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung<br><b>Andi Suharlis, S.H., M.H.</b> |
| 5.  | <b>Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai Konstitusi</b>            | Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT<br><b>Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.</b>   |

## 2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah di kelas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber, maupun antara sesama peserta. Untuk mendukung penyampaian materi, narasumber mempersiapkan *slide power point*.

### B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 08.30 WIB pada hari Kamis, 22 September 2022 oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan dihadiri oleh Ketua Umum MAKN serta seluruh peserta kegiatan.



# HASIL EVALUASI KEGIATAN



### C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

#### C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 4,66 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 65 menunjukkan nilai sebesar 1,668. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test – pre test*) diperoleh skor 1,62. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,25: kurang); (0,25-0,75: cukup); (0,75-1,25: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

#### C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur



kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, **Tingkat Kualitas Narasumber** yang dihitung dari nilai rata-rata hasil penilaian peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,60 yang termasuk kategori baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam lima indikator utama, yaitu materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, pelayanan administrasi, serta sistem informasi/SPBE. **Penilaian Kualitas Metode Penyelenggaraan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,53 yang tergolong kategori baik**. Hasil dari seluruh pengukuran variabel diatas menjadi **nilai tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor 3,49 yang tergolong kategori baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:



**Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan**

| No                                  | Aspek yang Dinilai                                       | Nilai   | Kategori    |
|-------------------------------------|--|---|-------------|
| <b>Materi</b>                       |  |   |             |
| 1                                   | Kesesuaian materi dengan mata ajar                       | 3,41  | Baik        |
| 2                                   | Materi informatif dan bermanfaat                         | 3,62  | Baik        |
| 3                                   | Materi mudah dipahami                                    | 3,41  | Baik        |
| 4                                   | Alokasi waktu materi sesuai                              | 3,38  | Baik        |
| 5                                   | Materi merupakan isu yang problematis                    | 3,36  | Baik        |
| 6                                   | Materi meningkatkan keterampilan analisis                | 3,37  | Baik        |
|                                     | Materi yang paling menarik                               | 1. Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai Konstitusi<br>2. Eksistensi Masyarakat adat dalam proses pengujian undang-undang di MK |             |
| <b>Tingkat Kepuasan atas Materi</b> |  | <b>3,42</b>   | <b>Baik</b> |
| <b>Narasumber dan Moderator</b>     |  |   |             |
| 7                                   | Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik | 3,53  | Baik        |
| 8                                   | Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi       | 3,47  | Baik        |
| 9                                   | Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif | 3,41  | Baik        |
| 10                                  | Moderator memandu setiap sesi dengan baik                | 3,49  | Baik        |
| 11                                  | Narasumber kompeten dan kredibel                         | 3,48  | Baik        |
|                                     | Narasumber yang paling menarik                           | 1. Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.<br>2. Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., M.S.  |             |



| No  | Aspek yang Dinilai   | Nilai                                  | Kategori    |
|---|--|--|-------------|
|   | Moderator yang paling menarik  | 1. Imam Margono<br>2. Ardiansyah Salim |             |
| <b>Tingkat Kepuasan atas Narasumber dan Moderator</b> |  | <b>3,48</b>                            | <b>Baik</b> |
| <b>Metode Penyelenggaraan</b>                         |  |  |             |
| 12  | Metode penyelenggaraan kegiatan menarik  | 3,53                                   | Baik        |
| 13  | Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien   | 3,49                                   | Baik        |
| 14  | Tampilan tayangan video visual kegiatan pembelajaran menarik   | 3,48                                   | Baik        |
| 15  | Panitia informatif dalam memberikan pelayanan  | 3,56                                   | Baik        |
| 16  | Panitia dengan cepat memberikan penanganan pengaduan pengguna layanan  | 3,59                                   | Baik        |
| <b>Tingkat Kepuasan atas Metode Penyelenggaraan</b>   |  | <b>3,53</b>                            | <b>Baik</b> |
| <b>Pelayanan Administrasi</b>                         |  |  |             |
| 17  | Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi   | 3,56                                   | Baik        |
| 18  | Informasi terkait dengan kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui SIMULTAN  | 3,45                                   | Baik        |
| 19  | Kualitas audio dan video baik  | 3,58                                   | Baik        |
| 20  | Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses dengan baik  | 3,45                                   | Baik        |
| <b>Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Administrasi</b>   |  | <b>3,51</b>                            | <b>Baik</b> |
| 21  | Layanan sistem informasi yang mencakup e-registrasi, bahan/materi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, daftar hadir online, kuesioner, & Evaluasi online memudahkan peserta | 3,47                                   | Baik        |



| No   | Aspek yang Dinilai  | Nilai       | Kategori    |
|--|---|-------------|-------------|
| 22   | Layanan sistem informasi di Pusdik cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan            | 3,48        | Baik        |
| 23   | Layanan sistem informasi di Pusdik telah terintegrasi dengan baik                               | 3,53        | Baik        |
| 24   | Layanan sistem informasi Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan | 3,59        | Baik        |
| <b>Tingkat Kepuasan atas Sistem Informasi/SPBE</b>         |   | <b>3,52</b> | <b>Baik</b> |
| <b>Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan</b> |   | <b>3,49</b> | <b>Baik</b> |

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,62 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 3,24. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,49 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu  $(3,49+3,24)/2 = 3,37$

Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,37; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa



penyelenggaraan kegiatan ini cukup berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  - a) Slide paparan materi dapat disampaikan kepada peserta sebelum sesi dimulai;
  - b) Waktu untuk diskusi ditambah;
  - c) Kegiatan dan kerja sama dengan MAKNN dapat terus berkelanjutan.
  
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
  - a) Tampilan slide materi kurang terlihat;
  - b) Penggantian biaya transportasi peserta dapat diberikan setelah acara penutupan.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 111 orang dari 149 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

#### **D. HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak bisa diprediksinya kondisi lalu lintas antara hotel tempat peserta menginap dan Pusdik Pancasila dan



Konstitusi;

- b) Masih banyak peserta yang keluar masuk ruangan ketika materi sedang berlangsung.



# PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



### E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2022 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 641.098.684 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

### F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**  
NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor, 10 November 2022

Kepala Bidang Program dan  
Penyelenggaraan

**Nanang Subekti**  
NIP. 19741118 200604 1 002



## DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Ketua Umum MAKN, Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Jajaran Pimpinan serta Panitia dari MAKN, serta seluruh peserta kegiatan.



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Penyampaian materi Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila oleh Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., M.S.



Penyampaian materi Eksistensi masyarakat adat dalam proses pengujian undang-undang di MK oleh Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H.



Penyampaian materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK oleh Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H.



Penyampaian materi Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Indonesia oleh Andi Suharlis, S.H., M.H.



Materi Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai Konstitusi oleh Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.



Peserta menyampaikan pertanyaan kepada narasumber ketika sesi diskusi dan tanya jawab.



Peserta berfoto bersama di depan gedung Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh YM Wakil Ketua MK dan dihadiri oleh Ketua Umum MAKN, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

**LAPORAN KEUANGAN****Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara  
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

| <b>NO</b>    | <b>PENERIMA</b>               | <b>KETERANGAN</b>  | <b>NOMINAL</b> |                    |
|--------------|-------------------------------|--|----------------|--------------------|
| 1            | Aminuddin Salle dkk, 3 orang  | Honor Narasumber Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara pada tanggal 19-22 September 2022                                   | Rp             | 8,000,000          |
| 2            | Teguh Birawa Putra dkk        | Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara pada tanggal 18-22 September 2022                             | Rp             | 15,209,687         |
| 3            | Koperasi Konstitusi           | Penyediaan Perlengkapan Akomodasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara  | Rp             | 16,028,400         |
| 4            | Ratu Entertainment            | Pengadaan paket pentas seni Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara pada tanggal 20 dan 21 September 2022 x @ Rp 2.500.000,- | Rp             | 5,000,000          |
| 5            | PT Kirana Mitra Utama Perkasa | Paket Pengadaan Konsumsi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara pada tanggal 19-22 September 2022                           | Rp             | 178,680,000        |
| 6            | PT Kusuma jaya indah          | Paket Penginapan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara pada tanggal 19-22 September 2022                                   | Rp             | 412,000,000        |
| 7            | Rangga Fotocopy               | Biaya pengadaan bahan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara pada tanggal 19-22 September 2022                              | Rp             | 152,000            |
| 8            | Tokopedia                     | Pengadaan perangkat audio untuk mendukung Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara  | Rp             | 170,200            |
| 9            | Tokopedia                     | Biaya Pengadaan Laserjet Printer Bagian Umum untuk Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara                                   | Rp             | 5,858,397          |
| <b>TOTAL</b> |                               |  | <b>Rp</b>      | <b>641,098,684</b> |

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**KERJA SAMA BAGI MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA**

**Hari, Tanggal** : **Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 September 2022**  
**Tempat** : Aula GK 3, Pusdik Pancasila dan Konstitusi  
**Peserta** : Pengurus dan Anggota MAKN

| HARI/<br>TANGGAL               | WAKTU             | MATERI   | NARASUMBER/PETUGAS  | LOKASI   |
|--------------------------------|-------------------|--|---|----------|
| <b>PERTAMA</b>                 |                   |  |   |          |
| <b>Senin,<br/>19 September</b> | 12.00 – 15.00 WIB | Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>   | Panitia   | Pusdik   |
|                                | 17.00 – 18.30 WIB | ISHOMA   | Panitia   | Pusdik   |
|                                | 18.30 – 20.30 WIB | Pembukaan:<br>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya<br>2. Mars Mahkamah Konstitusi<br>3. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi<br>4. Pentas Tari MAKN<br>5. Sambutan Ketua Umum MAKN<br>6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi<br>7. Hymne Mahkamah Konstitusi<br>8. Pembacaan Doa | <b>YM Ketua MK</b><br><b>Ketua Umum MAKN</b><br><b>Plt Kapusdik</b> | Pusdik   |
|                                | 20.30 WIB         | Perjalanan Menuju Hotel untuk ISHOMA   | Panitia   | Botanica |
| <b>KEDUA</b>                   |                   |  |   |          |

|                                 |                   |  |  |        |
|---------------------------------|-------------------|--|--|--------|
| <b>Selasa,<br/>20 September</b> | 07.30 – 08.30 WIB | Penjelasan Teknis Kegiatan dan Pretest   | Panitia  | Pusdik |
|                                 | 08.30 – 10.30 WIB | <b>Sesi I:<br/>Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>                                    | Narasumber:<br><b>Hakim Konstitusi:<br/>Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., M.S.</b>   | Pusdik |
|                                 | 10.30 – 11.00 WIB | Coffe Break  |  | Pusdik |
|                                 | 11.00 – 13.00 WIB | <b>Sesi II:<br/>Eksistensi Masyarakat Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi</b> | Narasumber:<br><b>Guru Besar FH UnHas<br/>Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H.,<br/>M.H.</b>  | Pusdik |
|                                 | 13.00 – 14.00 WIB | ISHOMA   | Panitia  | Pusdik |
|                                 | 14.00 – 16.00 WIB | <b>Sesi III:<br/>Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK</b>                            | Narasumber:<br><b>Sekretaris Jenderal MK<br/>Prof. Dr. M. Guntur Hamzah,<br/>S.H.</b>  | Pusdik |
|                                 | 16.00 – 19.30 WIB | <b>ISHOMA</b>  | Panitia  | Pusdik |
|                                 | 19.30 – 21.00 WIB | <b>Materi Internal</b>   | Panitia MAKN   | Pusdik |
| <b>KETIGA</b>                   |                   |  |  |        |
| <b>Rabu,<br/>21 September</b>   | 08.30 – 10.30 WIB | <b>Sesi IV:<br/>Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Indonesia</b>            | Narasumber:<br><b>Kepala Subdirektorat Budaya dan Kemasyarakatan pada Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung<br/>Andi Suharlis, SH., MH.</b> | Pusdik |
|                                 | 10.30 – 11.00 WIB | <i>Coffee Break</i>  |  | Pusdik |
|                                 | 11.00 – 13.00 WIB | <b>Sesi V:<br/>Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai Konstitusi</b>                        | Narasumber:<br><b>BNPT<br/>Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.</b>  | Pusdik |

|                               |                   |  |   |        |
|-------------------------------|-------------------|--|---|--------|
|                               | 13.00 – 14.00 WIB | ISHOMA   |   | Pusdik |
|                               | 14.00 – 16.00 WIB | <b>Sesi VI:<br/>Materi Internal</b>  | Panitia MAKN                              | Pusdik |
|                               | 16.00 – 19.30 WIB | <b>ISHOMA</b>  | Panitia                                   | Pusdik |
|                               | 19.30 – 21.00 WIB | <b>Materi Internal</b>   | Panitia MAKN                              | Pusdik |
| <b>KEEMPAT</b>                |                   |  |   |        |
| <b>Kamis<br/>22 September</b> | 06.00 – 07.30 WIB | Sarapan di Hotel   | Panitia                                   | Hotel  |
|                               | 07.30 – 08.00 WIB | Perjalanan menuju Pusdik   | Panitia                                   | Pusdik |
|                               | 08.00 – 08.30 WIB | <b>Post Test</b>   | Panitia                                   | Pusdik |
|                               | 08.30 – 10.30 WIB | <b>Penutupan</b><br>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya<br>2. Mars Mahkamah Konstitusi<br>3. Kesan dan Pesan Peserta<br>4. Sambutan Ketua Umum MAKN<br>5. Ceramah Kunci dan Penutupan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi<br>6. Hymne Mahkamah Konstitusi<br>7. Pembacaan Doa | <b>Wakil Ketua MK<br/>Ketua Umum MAKN</b> |        |
|                               | 10.30 WIB         | <b>Menuju Bandara dan Stasiun</b>  |   |        |



# **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

---

## **PANDUAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA**

---

**Bogor, 19 s.d. 22 September 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya penyusunan Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara dapat terselesaikan.

Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara yang memiliki posisi penting untuk mewujudkan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara khususnya hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat yang masih hidup dan terpelihara hingga saat ini.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, September 2022

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**



# DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>1</b>  |
| <br>   |           |
| <b>I      SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>                | <b>2</b>  |
| 1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....                | 2         |
| 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....                                 | 3         |
| 3. Visi dan Misi .....   | 3         |
| 4. Profil Hakim Konstitusi .....                                       | 4         |
| 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal .....                         | 8         |
| <br>   |           |
| <b>II     PANDUAN KEGIATAN.....</b>                                    | <b>9</b>  |
| 1. Latar Belakang .....  | 9         |
| 2. Tujuan Kegiatan .....   | 9         |
| 3. Nama Kegiatan .....   | 10        |
| 4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan .....                            | 10        |
| 5. Peserta Kegiatan .....  | 12        |
| 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum.....                               | 12        |
| 7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat.....                       | 13        |
| 8. Pembiayaan.....   | 13        |
| 9. Akomodasi .....   | 13        |
| 10. Konsumsi .....   | 14        |
| 11. Biaya Transportasi .....   | 14        |
| 12. Lain-lain .....  | 15        |
| 13. Kontak .....   | 15        |
| <br>   |           |
| <b>III    TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS .....</b> | <b>16</b> |
| <br>   |           |
| <b>IV    HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>                  | <b>26</b> |
| <br>   |           |
| <b>V     INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....</b>                            | <b>28</b> |
| 1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....       | 28        |
| 2. Sarana dan Prasarana.....   | 30        |
| 3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....                                    | 33        |

## **BAB I**

### **SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - 3) Memutus pembubaran partai politik;
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

## 3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

#### 4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

##### a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi  
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956  
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta  
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM  
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada  
Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA  
• Kepala Biro Kepegawaian MA  
• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

##### b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.



Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi  
Kelahiran : Palopo, 17 Juli 1964  
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan  
Universitas Gadjah Mada  
S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga  
Karir : • Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi  
Sulawesi Selatan  
• Ketua Ombudsman Makassar  
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Guru Besar Hukum Pidana Universitas  
Hasanuddin

**c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Universitas Airlangga  
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro
- Karir : • Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI  
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Diponegoro  
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro

**d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta (1981)  
• S-2 Hukum Tata Negara Program  
Pascasarjana Universitas Padjadjaran  
Bandung (1995)  
• S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
(2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah  
Mada  
• Kepala Badan Pembinaan Hukum,  
Kementerian Hukum dan HAM.

**e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah  
IAIN Syarif Hidayatullah  
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah  
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta  
• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta  
• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

**f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia  
S2 – Universitas Tarumanegara  
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi  
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak  
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

**g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara  
S2 – Universitas Sumatera Utara  
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan  
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung  
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

**h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Panningahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas  
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research  
Universitas Malaya, Malaysia  
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
  - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
  - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - Komisaris Utama PT Semen Padang

**i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)  
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)  
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
  - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
  - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

## 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

### a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



- Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara  
Universitas Padjadjaran  
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
  - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  - Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
  - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

### b. Muhidin, S.H., M.Hum.



- Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum  
Universitas Jakarta  
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum  
Bisnis
- Karir :
  - Kementerian Hukum dan HAM
  - Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
  - Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

## BAB II

### PANDUAN KEGIATAN

#### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2022 adalah Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN). Pemilihan *target group* ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dengan Majelis Adat Kerajaan Nusantara, yaitu MK memiliki misi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara sedangkan Majelis Adat Kerajaan Nusantara menjadi pihak yang memiliki peran dan posisi strategis upaya memperjuangkan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu pemahaman anggota MAKN mengenai hak-hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membentuk peserta sebagai warga negara yang kontributif dalam mendukung upaya pembangunan sosial, moral, dan politik hukum di Indonesia.

## 2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi;
- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 3. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara”.

## 4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 September 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

| HARI/<br>TANGGAL                            | WAKTU             | MATERI   |
|---|-------------------|--|
| <b>PERTAMA</b>                              |                   |  |
| <b>Senin,<br/>19<br/>September<br/>2022</b> | 12.00 – 15.00 WIB | <b>Registrasi Peserta</b>  |
|   | 15.00 – 17.00 WIB | <b>Penjelasan Teknis dan <i>Pre-Test</i></b>   |
|   | 17.00 – 18.30 WIB | ISHOMA   |
|   | 18.30 – 20.30 WIB | <b>Pembukaan :</b><br>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya<br>2. Pembacaan Teks Pancasila<br>3. Mars Mahkamah Konstitusi<br>4. Pentas Tari MAKN<br>5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi<br>6. Sambutan Ketua Umum MAKN<br>7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi<br>8. Hymne Mahkamah Konstitusi<br>9. Pembacaan Doa |
|   | 20.30 WIB         | Perjalanan Menuju Hotel untuk ISHOMA   |

| <b>KEDUA</b>                                 |                   |  |
|--|-------------------|--|
| <b>Selasa,<br/>20<br/>September<br/>2022</b> | 08.30 – 10.30 WIB | <b>Sesi I:<br/>Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>  |
|  | 10.30 – 11.00 WIB | <i>Coffee Break</i>  |
|  | 11.00 – 13.00 WIB | <b>Sesi II:<br/>Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam<br/>Proses Pengujian Undang-Undang di MK</b>   |
|  | 13.00 – 14.00 WIB | ISHOMA   |
|  | 14.00 – 16.00 WIB | <b>Sesi III:<br/>Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara</b>  |
|  | 16.00 WIB         | Istrahat   |
| <b>KETIGA</b>                                |                   |  |
| <b>Rabu,<br/>21<br/>September<br/>2022</b>   | 08.30 – 10.30 WIB | <b>Sesi IV:<br/>Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai<br/>Konstitusi</b>   |
|  | 10.30 – 11.00 WIB | <i>Coffee Break</i>  |
|  | 11.00 – 13.00 WIB | <b>Sesi V:<br/>Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam<br/>NKRI</b>  |
|  | 13.00 – 14.00 WIB | ISHOMA   |
|  | 14.00 – 16.00 WIB | <b>Sesi VI:<br/>Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum<br/>Acara Mahkamah Konstitusi</b>  |
|  | 16.00 WIB         | Istrahat   |
| <b>KEEMPAT</b>                               |                   |  |
| <b>Kamis,<br/>22<br/>September<br/>2022</b>  | 08.00 – 08.30 WIB | <i>Post-Test</i>   |
|  | 08.30 – 10.30 WIB | <b>Penutupan:</b><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Peserta</li> <li>4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li> <li>5. Ceramah Kunci dan Penutupan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol> |
|  | 10.30 – 11.30 WIB | Selesai  |

## 5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) orang yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara.

## 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara:

| No. | Materi   | Sub Materi   | Durasi       |
|-----|--|--|--------------|
| 1.  | Implementasi Nilai-Nilai Pancasila   | a. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila.<br>b. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya.<br>c. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Digital.<br>d. Bentuk-Bentuk Penerapan Pancasila.   | 2 x 60 menit |
| 2.  | Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di MK | a. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional;<br>b. Konsep Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Konstitusi;<br>c. <i>Legal Standing</i> Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengujian UU di MK.  | 2 x 60 menit |
| 3.  | Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara   | a. Definisi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;<br>b. Tujuan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;<br>c. Implementasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara.  | 2 x 60 menit |
| 4.  | Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai Konstitusi                     | a. Pengertian Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme;<br>b. Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai Konstitusi;<br>c. Upaya pencegahan Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme.   | 2 x 60 menit |
| 5.  | Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam NKRI                               | a. Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam NKRI.   | 2 x 60 menit |
| 6.  | Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi          | a. Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM;<br>b. Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai Pergaulan Masyarakat Internasional;<br>c. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945;<br>d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM;<br>e. Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM;<br>f. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. | 2 x 60 menit |

## Proses Pembelajaran

### 1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

### 2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

### 3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

## 7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:  
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

## 8. Pembiayaan

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Pusdik MK.
- b. MK tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

## 9. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di hotel yang telah disediakan oleh Mahkamah Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta melakukan registrasi dan/atau check in pada tanggal 19 September 2022 mulai pukul 12.00 WIB di Pusdik MK.
- c. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- d. Peserta mendapatkan akomodasi dan konsumsi di tempat yang telah ditentukan oleh panitia, di luar daripada itu, segala pengeluaran selama di hotel (*mini bar* di kamar, *laundry* dan layanan *room service* lainnya) menjadi tanggungan masing-masing peserta.

- e. Masing-masing peserta wajib melakukan check out di hotel pada tanggal 22 September 2022 paling lambat pukul 12.00 WIB. Biaya yang timbul akibat keterlambatan akan menjadi tanggungan masing-masing peserta.

## 10. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi di hotel yang telah disediakan.
- b. Peserta mendapatkan makan siang dan makan malam, serta *snack* di Pusdik MK.
- c. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan sebelum *check out*.

## 11. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya akan dilakukan setelah peserta berada di hotel tempat kegiatan berlangsung.
- b. Panitia akan mengganti biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke hotel tempat kegiatan berlangsung (PP), dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1) Penggantian Biaya Transportasi Udara (Pesawat)

- a) Menyerahkan dokumen-dokumen berikut pada saat registrasi:
  - Surat Tugas dari MAKN;
  - *Boarding pass* berangkat (asli/bukan *fotocopy*);
  - Tiket kedatangan dan kepulangan; dan
  - Bukti biaya transport dari tempat kedudukan ke bandara (PP).
- b) Tiket pesawat yang diganti adalah **tiket pesawat ekonomi** yang berangkat dari tempat kedudukan dan pulang kembali ke tempat kedudukan. Panitia tidak akan mengganti biaya transportasi yang tiketnya bukan berasal dari dan/atau kembali ke tempat kedudukan peserta.
- c) Harga tiket yang diganti adalah harga tiket riil sesuai yang tertera di tiket dan hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan. Apabila terdapat perbedaan antara harga yang tercantum dalam tiket dengan hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan, panitia akan mengganti biaya tiket sesuai harga hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan.
- d) Peserta disarankan berangkat dari bandara terdekat tempat kedudukan.
- e) Tanggal tiket kedatangan paling lama 1 (satu) hari sebelum registrasi kegiatan dan tanggal tiket kepulangan paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu *check out*. Panitia tidak akan mengganti harga tiket di luar ketentuan tersebut.
- f) Nama di tiket harus sesuai dengan nama peserta.
- g) Biaya perubahan jadwal (*reschedulling*) kedatangan dan kepulangan menjadi tanggung jawab peserta.

## 2) Penggantian Biaya Transportasi Darat/Laut

- a) Biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan (PP) dan dari Bandara Soekarno Hatta atau Halim Perdanakusuma ke hotel tempat kegiatan berlangsung (PP) diganti sesuai dengan bukti riil.
  - b) Peserta yang menggunakan kendaraan darat (termasuk kendaraan pribadi), akan mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan bukti riil (kwitansi, struk BBM, dan struk tol).
  - c) Peserta yang menggunakan jasa transportasi **kereta api atau transportasi laut**, harus menyerahkan tiket dan bukti biaya transport dari tempat kedudukan ke stasiun atau pelabuhan kepada panitia, disertai dengan *boarding pass*.
  - d) Transportasi kedatangan dari bandara/stasiun tujuan menuju Pusdik MK menggunakan kendaraan taksi bandara/online dengan melampirkan bukti riil. Sedangkan transportasi dari Pusdik MK menuju bandara/stasiun tujuan menggunakan kendaraan yang akan disediakan oleh Pusdik MK.
- c. Penggantian biaya transportasi kedatangan akan dilaksanakan setelah penutupan kegiatan, sesuai dengan bukti yang telah diserahkan, sedangkan untuk transport darat kepulauan akan dibayarkan setelah peserta mengirimkan bukti riil yang diterima oleh panitia paling lambat hari Minggu, 25 September 2022.

## 12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan sudah melakukan vaksin covid-19 minimal 2 kali.
- c. Peserta diwajibkan mengunduh dan meng-*install* aplikasi Peduli Lindungi pada *handphone* masing-masing untuk *check in* dan *check out* di lingkungan hotel.
- d. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

## 13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

## BAB III

### TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

#### 1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapian seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

#### 2. Sistem Informasi

##### a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di bagian akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*.

##### b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik *TTD* di bagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



| # | Judul   | Waktu                                 | Absen |
|---|---|---------------------------------------|-------|
| 1 | Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Perad) | 10-03-2020 09:30 s/d 10-03-2020 04:30 | TTD   |
| 2 | Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Perad)         | 10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00 | TTD   |
| 3 | Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia   | 11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30 | TTD   |
| 4 | Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945  | 11-03-2020 10:00 s/d 11-              | TTD   |

5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.



6. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



7. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



8. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



9. Mengisi evaluasi kegiatan



10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



| # | Judul  | Pemateri                                  | File                 |
|---|--|---|----------------------|
| 1 | Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | Mahkamah Konstitusi                       | <a href="#">File</a> |
| 2 | Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang             | Mahkamah Konstitusi                       | <a href="#">File</a> |
| 3 | Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang             | Mahkamah Konstitusi                       | <a href="#">File</a> |
| 4 | Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU                       | Mahkamah Konstitusi                       | <a href="#">File</a> |
| 5 | Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI                           | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi | <a href="#">File</a> |

### 3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

### 4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan

adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

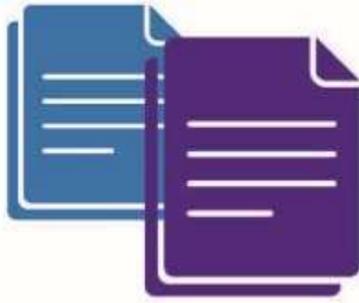
### 1 Persyaratan Pelayanan

**Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

**Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



1

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

#### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

#### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

#### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;  
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

### 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

### 4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

### 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

### 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan  
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

### 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



**BAB IV****HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

*---Music---*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

## **Mars Mahkamah Konstitusi**

*Syair : Taufiq Ismail*

*Lagu : Dwiki Dharmawan*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

*---Music---*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

## BAB V

### INFORMASI MENGENAI PUSDIK

#### 1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 17 (tujuh belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



**Imam Margono, S.E., M.M.**

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



**Nanang Subekti, S.E., M.S.E**

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



**Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.**

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



**Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



**Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



**Santhy Kustrihardiani, S.Psi.**

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

\*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

## 2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



### a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**b. Grha Konstitusi 2**

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

**c. Grha Konstitusi 3**

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

**d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5**

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

**e. Grha Konstitusi 6**

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

**f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla**

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

### g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat\_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3\_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

### 3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



# PENJELASAN TEKNIS

## Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)

Senin, 19 September 2022





SELAMAT DATANG DI

# ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN  
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN  
UNTUK PELAYANAN YANG  
**PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS** ”



[www.mkri.id](http://www.mkri.id)



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)



## **MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

**M. GUNTUR HAMZAH**

# PAKTA INTEGRITAS



## **Pusdik Pancasila dan Konstitusi:**

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



## **Peserta:**

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



## **Narasumber:**

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 1 Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;  
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

## 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

## 4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



## 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

## 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, proyektor, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

## 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

## 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

## Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

## Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan  
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

## 11



## 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

## 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

## 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

## 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,  
Bantu Kami  
Menjaga Integritas  
dengan  
tidak memberi Uang  
atau  
pemberian apapun



**Integritas Kami  
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
upg@mkri.id



# UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI



# Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner  
Online**



**Masukan dan Saran  
di Microsite  
[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**



**Kotak Saran**

# Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul”



# Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



# Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Hatika Al Shafa



Cafid Sugianto



Fazlur Rahman El  
Islamy



Yahya Amrullah Taufik



Suhardi



Angga Putri Gardina



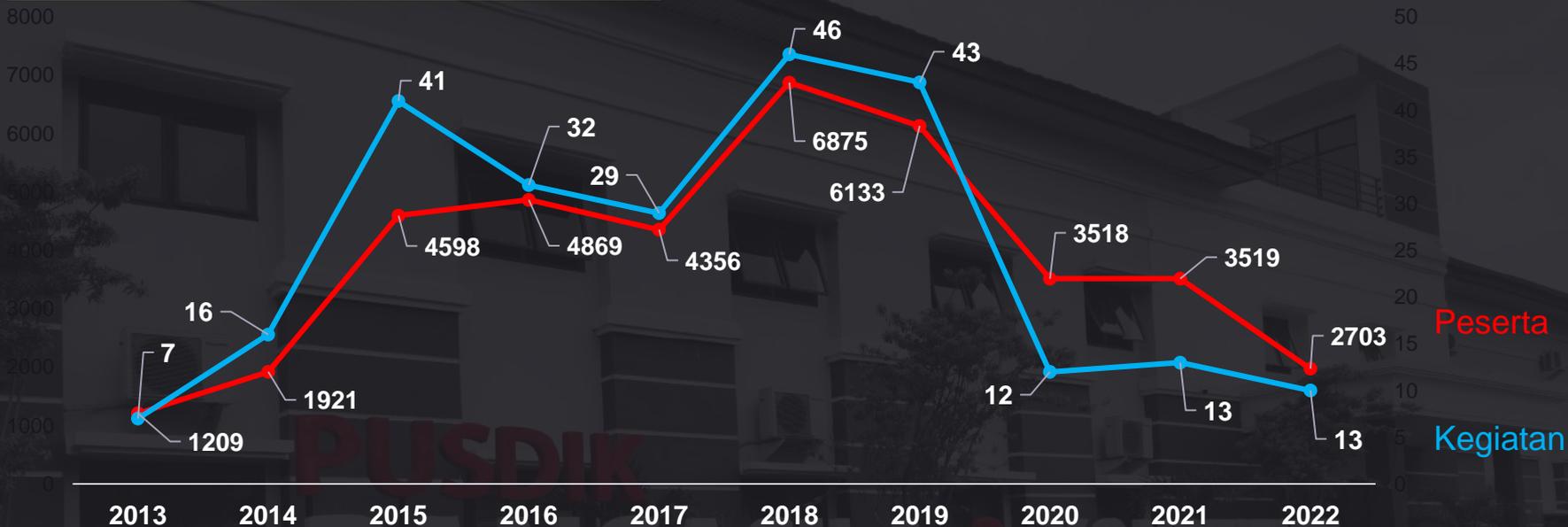
Edwin Rivano



# Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

1. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
2. Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di MK
3. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
4. Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai Konstitusi
6. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

# KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **27.133** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **34.709** orang

## PELAKSANAAN KEGIATAN

- Waktu : Senin s.d. Kamis  
19 s.d. 22 September 2022
- Tempat :  
Pusat Pendidikan Pancasila dan  
Konstitusi  
Jalan Raya Puncak KM. 83,  
Cisarua, Bogor, Jawa Barat

# JADWAL KEGIATAN

| Hari                           | Waktu             | Kegiatan   |
|--------------------------------|-------------------|--|
| Senin,<br>19 September<br>2022 | 12.00 – 15.00 WIB | Registrasi Peserta   |
|                                | 15.00 – 17.00 WIB | Penjelasan Teknis dan <i>Pre-Test</i>  |
|                                | 17.00 – 18.30 WIB | ISHOMA   |
|                                | 18.30 – 20.30 WIB | Pembukaan <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>2. Pembacaan Naskah Pancasila</li><li>3. Mars Mahkamah Konstitusi</li><li>4. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi</li><li>5. Pentas Tari MAKN</li><li>6. Sambutan Ketua Umum DPP MAKN</li><li>7. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi</li><li>8. Hymne Mahkamah Konstitusi</li><li>9. Pembacaan Doa</li></ol> |

# JADWAL KEGIATAN

| Hari                            | Waktu             | Kegiatan  |
|---------------------------------|-------------------|---|
| Selasa,<br>20 September<br>2022 | 08.30 – 10.30 WIB | Sesi I: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila<br><b>Narasumber: YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.</b>                                |
|                                 | 10.30 – 11.00 WIB | <i>Coffee Break</i>   |
|                                 | 11.00 – 13.00 WIB | Sesi II: Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di MK<br><b>Narasumber: Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H.</b> |
|                                 | 13.00 – 14.00 WIB | ISHOMA  |
|                                 | 14.00 – 16.00 WIB | Sesi VI: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK<br><b>Narasumber: Sekretaris Jenderal MK - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H</b>  |
|                                 | 16.00 – 19.00 WIB | ISHOMA  |
|                                 | 19.00 – 22.30 WIB | Agenda Internal MAKN  |

# JADWAL KEGIATAN

| Hari                          | Waktu             | Kegiatan  |
|-------------------------------|-------------------|---|
| Rabu,<br>21 September<br>2022 | 08.30 – 10.30 WIB | Sesi IV: Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia<br><b>Narasumber: Kepala Subdirektorat Budaya dan Kemasyarakatan Kejaksaan Agung<br/>Andi Suharlis, S.H., M.H.</b> |
|                               | 10.30 – 11.00 WIB | <i>Coffee Break</i>   |
|                               | 11.00 – 13.00 WIB | Sesi V: Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai Konstitusi<br><b>Narasumber: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme<br/>Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H.</b>                      |
|                               | 13.00 – 14.00 WIB | ISHOMA  |
|                               | 14.00 – 16.00 WIB | Sesi VI: Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara   |
|                               | 16.00 – 19.00 WIB | ISHOMA  |
|                               | 19.00 – 22.30 WIB | Agenda Internal MAKN  |

| Hari                           | Waktu             | Kegiatan   |
|--------------------------------|-------------------|--|
| Kamis,<br>22 September<br>2022 | 08.00 – 08.30 WIB | <i>Post test</i> & Evaluasi Kegiatan   |
|                                | 13.30 – 15.30 WIB | Penutupan:<br>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya<br>2. Mars MK<br>3. Kesan & Pesan Peserta<br>4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi<br>5. Ceramah Kunci dan sekaligus menutup acara oleh Wakil Ketua MK<br>7. Hymne MK<br>8. Pembacaan Doa |
|                                |                   |  |



## Peserta Kegiatan

- ✓ Peserta sebanyak 125 orang yang merupakan pengurus dan/atau anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

# Ketentuan Umum

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.
- ❖ Peserta diwajibkan mengunduh dan meng-*install* aplikasi Peduli Lindungi pada *handphone* masing-masing untuk *check in* dan *check out* di lingkungan hotel.
- ❖ Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.



# Bahan Materi dan e-Sertifikat

## ❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*soft file*)
- ✓ Baju/Kaos
- ✓ Panduan Kegiatan

## ❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan sertifikat keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%)
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Paramedis untuk dicatat dan ditangani

# Akomodasi

- ❖ Peserta wajib tinggal di hotel yang telah disediakan oleh Mahkamah Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Peserta mendapatkan akomodasi dan konsumsi di tempat yang telah ditentukan oleh panitia, di luar daripada itu, segala pengeluaran selama di hotel (*mini bar* di kamar, *laundry* dan layanan *room service* lainnya) menjadi tanggungan masing-masing peserta.
- ❖ Masing-masing peserta wajib melakukan *check out* di hotel pada tanggal 22 September 2022 paling lambat pukul 12.00 WIB. Biaya yang timbul akibat keterlambatan akan menjadi tanggungan masing-masing peserta.



# Konsumsi

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi di hotel yang telah disediakan.
- ❖ Peserta mendapatkan makan siang dan makan malam, serta *snack* di Pusdik MK.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan sebelum *check out*.



# Pembiayaan

- ❖ Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Pusdik MK.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



PUSDIK  
PANCASILA  
& KONSTITUSI

# Mekanisme Penggantian Biaya Transportasi

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*.
- ❖ Panitia akan mengganti biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke hotel tempat kegiatan berlangsung (PP), dengan ketentuan sebagai berikut:

## 1. Penggantian Biaya Transportasi Udara (Pesawat)

- a. Menyerahkan dokumen-dokumen berikut pada saat registrasi:
  - Surat Tugas dari MAKN;
  - *Boarding pass* berangkat (asli/bukan *fotocopy*);
  - Tiket kedatangan dan kepulangan; dan
  - Bukti biaya transport dari tempat kedudukan ke bandara (PP).
- b. Tiket pesawat yang diganti adalah **tiket pesawat ekonomi** yang berangkat dari tempat kedudukan dan pulang kembali ke tempat kedudukan. Panitia tidak akan mengganti biaya transportasi yang tiketnya bukan berasal dari dan/atau kembali ke tempat kedudukan peserta.

# Mekanisme Penggantian Biaya Transportasi

- c. Harga tiket yang diganti adalah harga tiket riil sesuai yang tertera di tiket dan hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan. Apabila terdapat perbedaan antara harga yang tercantum dalam tiket dengan hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan, panitia akan mengganti biaya tiket sesuai harga hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan
- d. Peserta disarankan berangkat dari bandara terdekat tempat kedudukan.
- e. Tanggal tiket kedatangan paling lama 1 (satu) hari sebelum registrasi kegiatan dan tanggal tiket kepulangan paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu *check out*. Panitia tidak akan mengganti harga tiket di luar ketentuan tersebut.
- f. Nama di tiket harus sesuai dengan nama peserta.
- g. Biaya perubahan jadwal (*reschedulling*) kedatangan dan kepulangan menjadi tanggung jawab peserta.

# Mekanisme Penggantian Biaya Transportasi

## 2. Penggantian Biaya Transportasi Darat/Laut

- a. Biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan (PP) dan dari Bandara Soekarno Hatta atau Halim Perdanakusuma ke hotel tempat kegiatan berlangsung (PP) diganti sesuai dengan bukti riil.
- b. Peserta yang menggunakan kendaraan darat (termasuk kendaraan pribadi), akan mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan bukti riil (kwitansi, struk BBM, dan struk tol).
- c. Peserta yang menggunakan jasa transportasi **kereta api atau transportasi laut**, harus menyerahkan tiket dan bukti biaya transport dari tempat kedudukan ke stasiun atau pelabuhan kepada panitia, disertai dengan *boarding pass*.
- d. Transportasi kedatangan dari bandara/stasiun tujuan menuju Pusdik MK menggunakan kendaraan taksi bandara/online dengan melampirkan bukti riil. Sedangkan transportasi dari Pusdik MK menuju bandara/stasiun tujuan menggunakan kendaraan yang akan disediakan oleh Pusdik MK.

# Mekanisme Penggantian Biaya Transportasi

- ❖ Penggantian biaya transportasi akan dilakukan dengan mekanisme transfer.
- ❖ Penggantian biaya transportasi akan diproses setelah peserta menyerahkan seluruh bukti pengeluaran real kedatangan dan kepulangan (tempat asal)
- ❖ Pengiriman bukti transportasi diterima oleh panitia **paling lambat hari Minggu, 25 September 2022.**
- ❖ Pengumpulan bukti transportasi keberangkatan peserta **diserahkan melalui panitia MAKN, Bapak Sudi.**
- ❖ Pengumpulan bukti transportasi kepulangan peserta dikirimkan melalui nomor whatsapp Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi **085157929660 (WhatsApp Chat Only).**

# Simultan (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



# Layanan Wi-Fi

Nama *Wi-Fi* : ***Pusdiklat\_MKRI***

Password : ***pusdikmk***

Nama *Wi-Fi* : ***GK3\_PUSDIKLAT***

Password : ***pusdikmkri***

Nama *Wi-Fi* : ***MK-TAMU***

Password : ***tamumkri***



# FASILITAS

## Grha Konstitusi 1

- Rumah istirahat bagi para hakim, narasumber, dan tamu VIP
- Terdiri 12 ruangan



## Grha Konstitusi 2

- Gedung kantor
- Poliklinik



## Grha Konstitusi 3

- Aula (kapasitas 200 orang)
- 8 Ruang Kelas



## Grha Konstitusi 4 dan 5

- Tempat istirahat untuk peserta



## Grha Konstitusi 6

- Rumah jabatan bagi eselon 3 dan eselon 4



## Grha Konstitusi 7

- Ruang makan peserta
- Mushola

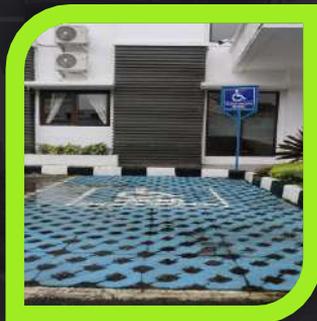


## Smoking Area



## Fasilitas Lain

- ✓ Pojok Digital
- ✓ Alat Musik Band
- ✓ Rooftop
- ✓ Tennis Meja
- ✓ Akses Disabilitas
- ✓ E-Kiosk



## Kegiatan Pusdik Pancasila dan Konstitusi

✓ Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara



✓ Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi



## Debat Konstitusi

Lomba debat antar mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia

## Anugerah Konstitusi

Kompetisi antar guru PPKn seluruh Indonesia kerjasama Kemendikbudristek dan Kemenag

## Halaqah Konstitusi

Sosialisasi tentang hak konstitusional warga negara





T  
E  
R  
I  
M  
A  
  
K  
A  
S  
I  
H

## **PANDUAN MODERATOR SESI MATERI**

### **A. Pembukaan**

#### **1. Greetings**

- a) Mengucapkan salam;
- b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta baik yang online dan offline serta memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan;
- c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
- d) Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio;
- e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh di epusdik melalui link [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)

### **B. Sesi Materi**

- a) Menyapa narasumber, mengucapkan selamat bergabung;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan sesi materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
  - Jumlah Total Peserta;
  - Pembagian peserta online dan offline;
  - Asal daerah peserta;

### **C. Alokasi waktu**

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab;

### **D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan**

- a) Melalui fitur raise hand di zoom;
- b) Melalui chat zoom;

**E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan dan mengisi kuesioner evaluasi narasumber;**

**F. Mempersilakan narasumber untuk memulai;**

**G. Narasumber selesai memaparkan materi**

1. Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
2. Memandu jalannya tanya jawab:
  - Memberi kesempatan kepada peserta offline terlebih dahulu (dibatasi 1 dulu);
  - Pertanyaan dari peserta online yang mengajukan langsung melalui fitur raise hand;
  - Pertanyaan dari chat zoom yang dikumpulkan oleh petugas kelas melalui WA Moderator;

**H. Penutup**

1. Menutup sesi materi:
  - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
  - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
  - Harapan setelah mendapatkan materi ini;
  - Mempersilakan narasumber meninggalkan zoom meeting;
2. Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
  - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
  - Materi apa dan siapa pematerinya;
  - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom;
  - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya ;

## **PANDUAN PETUGAS KELAS**

1. Membantu host melakukan approval kepada peserta yang masuk link zoom
2. Memantau lalu lintas pertanyaan peserta melalui fitur raise hand
3. Membantu mengumpulkan pertanyaan pada kolom chat zoom yang selanjutnya diarahkan kepada WA Moderator
4. Membantu menjawab pertanyaan peserta terkait teknis zoom dikolom chat
5. Membantu permintaan narasumber dan moderator

## **PANDUAN SESI MODERATOR PRAKTEK DAN PRESENTASI**

1. Greetings
  - Mengucapkan salam
  - Mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta
  - Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom
  - Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio
2. Membuat cek list peserta yang ada di dalam kelasnya (absen)
3. Membuka acara
  - Memperkenalkan diri
  - Menjelaskan singkat mekanisme praktek (sesuai PPT)
4. Memastikan semua peserta sudah mendownload soal dan template
5. Memperkenalkan Narasumber
  - Membaca cv singkat
6. Memberikan waktu kepada Narasumber untuk menjelaskan jalannya praktek
7. Membantu Narasumber memantau lalu lintas pertanyaan
8. Menutup sesi

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara**  
**Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 September 2022**

*Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., M.S.*

| NO. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | SUM | AVG  | SARAN   |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|---|
| 1   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4   | 4   | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 9  | 61  | 3.81 | Perbanyak kemampuan mengenali peserta   |
| 2   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Luar biasa  |
| 3   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    |   |
| 4   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 9  | 48  | 3    |   |
| 5   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 53  | 3.31 |   |
| 6   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 7  | 48  | 3    |   |
| 7   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 60  | 3.75 |   |
| 8   | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 7  | 50  | 3.13 | Cukup baik  |
| 9   | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3   | 3   | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 9  | 53  | 3.31 |   |
| 10  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3   | 4   | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 58  | 3.63 | Lebih bisa dalam memanfaatkan waktu secara disiplin. Semoga kedepannya materi yang disampaikan lebih baik lagi dan lebih mudah dimengerti oleh peserta  |
| 11  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Waktu yang kurang untuk diskusi   |
| 12  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3   | 4   | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 9  | 53  | 3.31 |   |
| 13  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 4   | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 8  | 51  | 3.19 |   |
| 14  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 50  | 3.13 |   |
| 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4   | 4   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 54  | 3.38 |   |
| 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Tidak terasa waktu sudah habis  |
| 17  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 64  | 4    | Semoga berkelanjutan untuk bisa disosialisasikan kepada para pewaris kerajaan - masyarakat adat langsung ke daerah dan juga secara berkala. PMP MAKN dan raja-raja diajak berdiskusi tentang masalah yang diselesaikan kerajaan |
| 18  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4   | 4   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 58  | 3.63 |   |
| 19  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Waktu perlu ditambah dan materi perlu dibagikan pada peserta  |
| 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Bagus pemaparannya  |
| 21  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 4   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 50  | 3.13 |   |
| 22  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 9  | 62  | 3.88 |   |
| 23  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Waktu tanya jawab sangat kurang dan materi pembicara dapat diberikan sebelumnya   |
| 24  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 9  | 48  | 3    | Sebaiknya bahan ajar bisa diterima lebih awal dan kesempatan berdiskusi untuk memperdalam diperbanyak   |
| 25  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 3   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 9  | 59  | 3.69 |   |

| NO. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | SUM | AVG  | SARAN  |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|--|
| 26  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Alhamdulillah materinya sangat bagus, sistematis, dan tepat sasaran. Bagian yang masih kurang mengerti tentang apa itu hukum                               |
| 27  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    |  |
| 28  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 64  | 4    |  |
| 29  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 64  | 4    |  |
| 30  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 64  | 4    | Waktu paparan dapat diperpanjang   |
| 31  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3   | 3   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 55  | 3.44 |  |
| 32  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    |  |
| 33  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    |  |
| 34  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 9  | 61  | 3.81 |  |
| 35  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4   | 4   | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 9  | 57  | 3.56 |  |
| 36  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3   | 4   | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 58  | 3.63 | Sangat baik  |
| 37  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 60  | 3.75 | Ada baiknya PPT materi dibagikan   |
| 38  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 64  | 4    |  |
| 39  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Materi perlu diberika padan peserta  |
| 40  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 9  | 60  | 3.75 |  |
| 41  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 9  | 50  | 3.13 | Sangat puas  |
| 42  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 62  | 3.88 | Materi pembelajaran telah disiapkan sejak awal   |
| 43  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 57  | 3.56 | Lebih interaktif dengan peserta  |
| 44  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Kurang waktu   |
| 45  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 8  | 54  | 3.38 |  |
| 46  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 52  | 3.25 |  |
| 47  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Tetap lanjut   |
| 48  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 48  | 3    | Sudah sangat baik mendidik dan semoga semakin banyak lagi materi yang disampaikan  |
| 49  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4   | 3   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 54  | 3.38 | Materi sangat luar biasa, disampaikan juga dengan baik dan lebih baik lagi. Semoga ke depan dapat dilaksanakan lagi, materi sesuai dengan kondisi saat ini |
| 50  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 9  | 61  | 3.81 | Kiranya materi yang disampaikan kepada para peserta dapat dibukukan (copy) untuk selanjutnya diberikan kepada kami   |
| 51  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 9  | 60  | 3.75 |  |
| 52  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4   | 4   | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 61  | 3.81 | Sosialisasi sering diberikan ke masyarakat   |
| 53  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3   | 4   | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 8  | 58  | 3.63 |  |
| 54  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 54  | 3.38 |  |
| 55  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Narasumber sudah sangat baik dalam menyampaikan materi maupun menjawab pertanyaan  |
| 56  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    |  |
| 57  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4   | 4   | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 9  | 57  | 3.56 |  |

| NO. | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   | A7   | A8   | A9   | A10  | A11  | B1   | B2   | B3   | C1   | C2   | C3 | SUM | AVG  | SARAN   |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|------|---|
| 58  | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 9  | 58  | 3.63 | Diharap tetap menjadi pemateri setiap kegiatan ini  |
| 59  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 8  | 64  | 4    |   |
| 60  | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 8  | 51  | 3.19 | Bahan ajar yang dipahami di copy dan dibagikan kepada peserta                             |
| 61  | 4    | 3    | 4    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 53  | 3.31 |   |
| 62  | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 3    | 8  | 58  | 3.63 |   |
| 63  | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 9  | 54  | 3.38 | Dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan                    |
| 64  | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 8  | 52  | 3.25 | Interaksi dengan peserta perlu ditingkatkan   |
| 65  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |   |
| 66  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |   |
| 67  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |   |
| 68  | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 9  | 60  | 3.75 | Mohon materi yang dibawa agar dibagikan kepada peserta sebelum acara dimulai              |
| 69  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |   |
| 70  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    | Mohon mater dishare ke peserta  |
| 71  | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 9  | 50  | 3.13 |   |
| 72  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 58  | 3.63 | Sudah oke   |
| 73  | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    | 3    | 4    | 3    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 9  | 57  | 3.56 |   |
| 74  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 9  | 59  | 3.69 | Semoga setiap tahunnya dilaksanakan kegiatan bimtek oleh MK dan MAKN                      |
| 75  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    | Materi penyampaian yang menarik dan informatif, sangat baik, dan membuka wawasan baru     |
| 76  | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 9  | 50  | 3.13 |   |
| 77  | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 9  | 52  | 3.25 |   |
| 78  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |   |
| 79  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 9  | 58  | 3.63 |   |
| 80  | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 2    | 3    | 3    | 4    | 3    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 7  | 52  | 3.25 | Slet layar materi tidak terbaca. Sebaiknya narasumber tidak di tas panggung terus menerus |
| 81  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |   |
|     | 3.74 | 3.67 | 3.67 | 3.70 | 3.69 | 3.54 | 3.57 | 3.59 | 3.60 | 3.70 | 3.74 | 3.67 | 3.53 | 3.57 | 3.73 | 3.77 |    |     | 3.66 |   |

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara  
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 September 2022**

*Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H.*

| NO. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | SUM | AVG  | SARAN  |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|--|
| 1   | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  |    | 3  | 4   | 4   | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 8  | 56  | 3.73 | tambah selera humor  |
| 2   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 64  | 4    | sering2 undang kami  |
| 3   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 64  | 4    |  |
| 4   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   |     |    |    |    |    |    |    | 30  | 3    |  |
| 5   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  |    | 50  | 3.13 |  |
| 6   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 7  | 48  | 3    |  |
| 7   | 4  | 4  | 4  |    | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 56  | 3.73 |  |
| 8   | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 7  | 50  | 3.13 | sangat baik<br>cukup baik  |
| 9   | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  |    | 51  | 3.19 |  |
| 10  | 3  | 3  |    | 3  | 3  | 3  | 3  |    | 3  | 4   | 4   | 3  | 3  |    | 3  | 4  |    | 42  | 3.23 | sebaiknya ada print out dari<br>materi yang disajikan  |
| 11  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  |    | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 49  | 3.27 |  |
| 12  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4   | 4   | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 8  | 58  | 3.63 | semoga kedepannya lebih baik<br>lagi untuk materinya<br>semoga kedepannya diberi waktu<br>lebih banyak lagi untuk peserta<br>bertanya          |
| 13  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | waktu diskusi yang cukup x   |
| 14  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3   | 4   | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 9  | 55  | 3.44 |  |
| 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 49  | 3.06 | kedepan materinya lebih kreatif<br>lagi<br>waktu lebih banyak digunakan<br>untuk diskusi biar lebih<br>paham/mengerti                          |
| 16  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 7  | 48  | 3    | diutamakan diskusi untuk<br>memperdalam materi<br>waktunya juga harus ditambah   |
| 17  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 8  | 51  | 3.19 |  |
| 18  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3   | 4   | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 8  | 57  | 3.56 |  |
| 19  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4   |     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 56  | 3.73 |  |
| 20  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  |    | 60  | 3.75 | media pembelajaran perlu<br>diperbaiki<br>perlu waktunya ditambah  |
| 21  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 64  | 4    |  |
| 22  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 64  | 4    |  |
| 23  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 64  | 4    | Mohon u/ menjadikan apa yang<br>disampaikan kita jalani bersama<br>u/ bersatunya kerajaan2 atas<br>permasalahan yg ada                         |
| 24  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3   | 3   | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 53  | 3.31 |  |
| 25  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 9  | 63  | 3.94 | penyajian materi sangat<br>bermanfaat, tapi waktunya masih<br>kurang.<br>Bahan2 materi bisa dishare<br>kepada peserta sebagai<br>acuan/pedoman |
| 26  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | bagus pemaparannya   |
| 27  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 48  | 3    |  |
| 28  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 9  | 60  | 3.75 |  |

| NO. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | SUM | AVG  | SARAN   |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|---|
| 29  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 64  | 4    | waktu tanya jawab sangat kurang materi pembelajaran lebih baik diberikan sebelumnya                     |
| 30  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 48  | 3    | Sebaiknya bahan ajar diberikan lebih awal<br>Kesempatan diskusi diperbanyak                             |
| 31  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 9  | 63  | 3.94 |   |
| 32  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Alhamdulillah jadi mengerti tentang hukum adat  |
| 33  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 48  | 3    |   |
| 34  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 48  | 3    |   |
| 35  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 64  | 4    |   |
| 36  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 64  | 4    | x   |
| 37  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3   | 4   | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 57  | 3.56 |   |
| 38  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  |    | 3  | 3  | 4  | 4   | 4   | 3  | 3  |    | 4  | 4  | 9  | 50  | 3.57 |   |
| 39  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  |    | 3  | 3  | 4  | 4   | 4   | 3  | 3  |    | 4  | 4  | 9  | 50  | 3.57 |   |
| 40  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 48  | 3    |   |
| 41  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    |   |
| 42  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4   | 4   | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  |    | 60  | 3.75 |   |
| 43  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 61  | 3.81 |   |
| 44  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 9  | 61  | 3.81 |   |
| 45  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 60  | 3.75 |   |
| 46  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 51  | 3.19 | saya rasa sudah cukup baik dan pelayanan yg baik  |
| 47  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 61  | 3.81 | PPT dibagikan   |
| 48  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 64  | 4    |   |
| 49  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | bisakah memberikan tulisan/copy materi yang diberikan   |
| 50  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  |    | 3  | 3   | 4   | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 8  | 52  | 3.47 |   |
| 51  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 9  | 63  | 3.94 | kurang waktu/tambah waktu   |
| 52  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |    | 48  | 3    | puas sekali   |
| 53  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 3   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 62  | 3.88 | materi pembelajaran telah disiapkan sejak awal  |
| 54  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4   | 4   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 54  | 3.38 | penjelasan cukup per point saja   |
| 55  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3   | 3   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 54  | 3.38 |   |
| 56  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | waktu terbatas  |
| 57  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 53  | 3.31 |   |
| 58  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | acara baik dan bagus, mendidik tetap di adakan x  |
| 59  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |    | 48  | 3    | cukup baik dalam penjelasan materi sudah sangat baik  |
| 60  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3   | 4   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 55  | 3.44 | sangat baik, semoga bermanfaat untuk kami krn telah membuka wawasan luar biasa semoga dilaksanakan lagi |
| 61  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 9  | 61  | 3.81 | materi yang disampaikan sangat baik, yang kurang hanya tidak dibukukan (copy) untuk kami miliki.        |

| NO. | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   | A7   | A8   | A9   | A10  | A11  | B1   | B2   | B3   | C1   | C2   | C3 | SUM | AVG  | SARAN  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|------|--|
| 62  | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |    | 60  | 3.75 |  |
| 63  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    |    | 63  | 3.94 | Semoga RUU tentang adat kerajaan segera disahkan                                       |
| 64  | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    |      | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 8  | 52  | 3.47 |  |
| 65  | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    |    | 51  | 3.19 | waktu tanya jawab terlalu singkat, tidak semua bisa bertanya                           |
| 66  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    | narasumber sudah sangat baik dalam menyampaikan materi maupun menjawab pertanyaan      |
| 67  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |  |
| 68  | 4    | 3    |      | 3    | 3    | 3    | 3    | 2    | 3    |      | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 7  | 41  | 2.93 |  |
| 69  | 4    | 3    |      | 3    | 3    | 3    | 3    |      | 2    | 3    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 7  | 41  | 2.93 | x  |
| 70  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 8  | 64  | 4    |  |
| 71  | 3    | 3    |      | 3    | 3    | 3    | 3    |      | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 7  | 43  | 3.07 | bahan ajar dicopy, dibagikan peserta   |
| 72  | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 51  | 3.19 |  |
| 73  | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 8  | 55  | 3.44 |  |
| 74  | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    |    | 55  | 3.44 |  |
| 75  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 7  | 48  | 3    |  |
| 76  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |  |
| 77  | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    |      | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    |    | 53  | 3.53 |  |
| 78  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 48  | 3    |  |
| 79  | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |    | 62  | 3.88 |  |
| 80  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 8  | 64  | 4    |  |
| 81  | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    |    | 57  | 3.56 | mohon materi dishare ke peserta  |
| 82  | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 8  | 61  | 3.81 |  |
| 83  | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    |    | 53  | 3.31 |  |
| 84  | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 53  | 3.31 |  |
| 85  | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 4    |    | 57  | 3.56 |  |
| 86  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    |      | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    |    | 55  | 3.67 | Semoga setiap tahunnya dilaksanakan kegiatan bimtek oleh Mahkamah Konstitusi oleh MAKN |
| 87  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    | tetap dipertahankan kualitas pelaksanaannya yang sangat baik                           |
| 88  | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |    | 51  | 3.19 |  |
| 89  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    | 3    |    | 51  | 3.19 |  |
| 90  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |    | 64  | 4    |  |
| 91  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 9  | 61  | 3.81 |  |
| 92  | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 8  | 57  | 3.56 | Slot layar materi tidak terbaca  |
| 93  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |  |
|     | 3.71 | 3.56 | 3.63 | 3.57 | 3.55 | 3.48 | 3.58 | 3.54 | 3.51 | 3.62 | 3.64 | 3.54 | 3.43 | 3.47 | 3.65 | 3.68 |    |     | 3.57 |  |

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara  
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 September 2022**

*Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.*

| NO. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | SUM | AVG  | SARAN   |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|---|
| 1   | 3  | 3  | 3  | 3  |    |    | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 42  | 3    |   |
| 2   | 3  | 3  | 3  | 3  |    |    | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |    | 42  | 3    |   |
| 3   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 8  | 60  | 3.75 |   |
| 4   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 7  | 48  | 3    | Sangat Baik<br>Baik   |
| 5   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 45  | 3    | Materi ajar dicopy, dibagikan ke peserta  |
| 6   | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3   | 3   | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 7  | 54  | 3.38 |   |
| 7   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |    | 3  | 3   | 4   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 47  | 3.13 |   |
| 8   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 7  | 46  | 2.88 |   |
| 9   | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 7  | 46  | 2.88 |   |
| 10  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 57  | 3.56 |   |
| 11  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 48  | 3    |   |
| 12  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3   | 3   | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  |    | 52  | 3.25 |   |
| 13  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3   | 3   | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 8  | 57  | 3.56 |   |
| 14  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 64  | 4    |   |
| 15  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 63  | 3.94 | Mohon kegiatan seperti ini menyertakan pula para pemimpin daerah agar terjadi sinegi antara pemerintah dan MAKAN sehubungan hak-hak adat yang selama ini berhenti sebagai wacana semata yg terbungkus ke dalam undang-undang ataupun PP |
| 16  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 9  | 59  | 3.69 |   |
| 17  | 4  | 4  |    | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4   | 4   | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 8  | 55  | 3.67 |   |
| 18  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 4  |     |     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 52  | 4    |   |
| 19  | 2  | 3  | 1  | 3  | 1  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2   |     | 2  | 3  | 3  | 2  | 3  |    | 36  | 2.4  | Kurang komunikatif dengan peserta<br>Sebaiknya penyajian jangan zoom  |
| 20  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 53  | 3.31 | akan lebih baik seandainya penyampaian materi dilakukan secara offline  |
| 21  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  |    | 58  | 3.63 | Menyediakan waktu berdiskusi yang banyak  |
| 22  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  |    | 4  | 3   | 4   | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 9  | 53  | 3.53 |   |
| 23  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3   | 3   | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 8  | 56  | 3.5  |   |
| 24  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 64  | 4    |   |
| 25  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    |   |
| 26  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 48  | 3    |   |
| 27  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Agar dibuatkan resume/catatan singkat   |
| 28  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 64  | 4    |   |
| 29  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3   | 4   | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 7  | 60  | 3.75 | Kehadiran secara fisik lebih berkesan   |

| NO. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | SUM | AVG  | SARAN   |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|---|
| 30  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 48  | 3    | Bagus dalam penyampaian sayang waktunya 2 jam saja. Pingin datang lagi ke gedung MK ini   |
| 31  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 64  | 4    | Materinya dapat diperoleh   |
| 32  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 7  | 48  | 3    |   |
| 33  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 64  | 4    | Mengharapkan kegiatan2 edukasi juga koordinasi ditingkatkan langsung ke kerajaan2/masyarakat adat agar pemahaman hak konstitusi hak warga negara      |
| 34  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 64  | 4    |   |
| 35  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    |   |
| 36  | 3  | 4  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 48  | 3    |   |
| 37  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 50  | 3.13 |   |
| 38  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3   | 3   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 58  | 3.63 | Perlu dishare materi kepada peserta   |
| 39  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 48  | 3    |   |
| 40  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 9  | 60  | 3.75 |   |
| 41  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4   | 3   | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 55  | 3.44 | waktu tanya jawab/dialog terasa kurang<br>Durasi penyajian materi perlu ditambah  |
| 42  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 7  | 48  | 3    |   |
| 43  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 48  | 3    | sebaiknya bahan ajar dibagikan ke peserta<br>waktu diskusi perlu ditambah   |
| 44  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 64  | 4    | mantap  |
| 45  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 61  | 3.81 | Kami berharap program ini berkelanjutan   |
| 46  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Sangat baik   |
| 47  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 7  | 52  | 3.47 |   |
| 48  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 59  | 3.69 | semoga kedepannya bisa hadir langsung untuk memberi materi  |
| 49  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3   | 4   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 47  | 3.13 |   |
| 50  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3   | 3   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 54  | 3.38 |   |
| 51  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 3   | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 60  | 3.75 |   |
| 52  | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 7  | 47  | 2.94 |   |
| 53  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3   | 4   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 56  | 3.5  | Mohon dengan hormat & sangat kalau P4 di NKRI jangan ditiadakan begitu saja terutama o/ siswa2 SD, SMP, & SMA juga mahasiswa (yg gampang terpengaruh) |
| 54  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 8  | 58  | 3.87 |   |
| 55  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    |   |
| 56  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 7  | 52  | 3.25 | Slide show hurufnya terlalu kecil tidak terbaca   |
| 57  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 64  | 4    | mantap materinya  |
| 58  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 9  | 60  | 3.75 | beliau wajib menjadi pemateri dlm setiap kegiatan di sini   |
| 59  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4   | 3   | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 48  | 3.43 |   |
| 60  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 50  | 3.13 |   |

| NO. | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   | A7   | A8   | A9   | A10  | A11  | B1   | B2   | B3   | C1   | C2   | C3 | SUM | AVG  | SARAN   |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|------|---|
| 61  | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 48  | 3    | Kerapian supaya lebih baik intonasi bahasa ditingkatkan                         |
| 62  | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |    | 52  | 3.25 |   |
| 63  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |    | 64  | 4    |   |
| 64  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |    | 48  | 3    |   |
| 65  | 3    | 3    |      | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |      | 3    |      | 3    | 3    | 3    | 3    |    | 39  | 3    |   |
| 66  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |   |
| 67  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 49  | 3.06 | penyajian materinya terlalu cepat sekiranya ada materi yg diberikan kepada kami |
| 68  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 48  | 3    |   |
| 69  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 8  | 56  | 3.5  |   |
| 70  | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    |    | 58  | 3.63 |   |
| 71  | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    |      | 3    | 3    | 3    | 4    |    | 54  | 3.6  | x   |
| 72  | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |    | 62  | 3.88 |   |
| 73  | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    |      | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 9  | 57  | 3.8  | materi yang diberikan ke MAKN juga disosialisasikan ke masyarakat banyak        |
| 74  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 9  | 59  | 3.69 |   |
| 75  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    | sudah sangat baik dalam materi, mendidik  |
| 76  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 8  | 64  | 4    |   |
| 77  | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    |    | 61  | 3.81 |   |
| 78  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |    | 64  | 4    |   |
|     | 3.53 | 3.54 | 3.33 | 3.53 | 3.45 | 3.41 | 3.56 | 3.61 | 3.58 | 3.47 | 3.55 | 3.51 | 3.48 | 3.41 | 3.54 | 3.58 |    |     | 3.50 |   |

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara**  
**Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 September 2022**

*Andi Suharlis, S.H., M.H.*

| NO. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | SUM | AVG  | SARAN   |  |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|---|--|
| 1   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8   | 64   | 4   |  |
| 2   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9   | 64   | 4   | Mudah-mudahan implementasinya sesuai teori             |
| 3   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9   | 64   | 4   | Semoga ilmu bisa disosialisasikan ke masyarakat banyak |
| 4   | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8   | 51   | 3.19  |  |
| 5   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9   | 64   | 4   |  |
| 6   | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 2  | 3  | 3   | 3   | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 9  | 52  | 3.25 |   |  |
| 7   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8   | 48   | 3   |  |
| 8   | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4   | 4   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 9   | 53   | 3.31  | Sebaiknya matrei dibagikan kepada audien               |
| 9   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 9   | 48   | 3   |  |
| 10  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 9   | 50   | 3.13  |  |
| 11  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4   | 3   | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 7  | 54  | 3.38 |   |  |
| 12  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 60  | 3.75 |   |  |
| 13  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 57  | 3.56 | Semoga kedepan bisa lebih baik lagi   |  |
| 14  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    |   |  |
| 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 9  | 50  | 3.13 |   |  |
| 16  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 9  | 50  | 3.13 |   |  |
| 17  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 48  | 3    |   |  |
| 18  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3   | 3   | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 8  | 51  | 3.19 |   |  |
| 19  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 8  | 51  | 3.19 |   |  |
| 20  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 48  | 3    |   |  |
| 21  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3   | 4   | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 9  | 53  | 3.31 | Untuk pendahuluan materi sebaiknya bisa banyak diskusi tentang peran kejaksaan yang harus mengayomi masyarakat adat |  |
| 22  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4   | 3   | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 9  | 55  | 3.44 |   |  |
| 23  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    | Penyampaian materi sudah sangat baik, setiap pertanyaan berhasil dijawab sangat baik dan memuaskan                  |  |
| 24  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 60  | 3.75 | Dapat digunakan untuk tenaga berikutnya   |  |
| 25  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    |   |  |
| 26  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 7  | 64  | 4    | Materinya mantap  |  |
| 27  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 8  | 61  | 3.81 |   |  |
| 28  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4   | 4   | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 9  | 58  | 3.63 |   |  |
| 29  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 9  | 54  | 3.38 |   |  |
| 30  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 9  | 64  | 4    |   |  |
| 31  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4   | 4   | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 8  | 55  | 3.44 | Tolong materinya dibagikan kepada peserta karena sangat bagus untuk pengetahuan anggota MAKN                        |  |
| 32  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3   | 3   | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 53  | 3.31 | Sudah cukup baik  |  |

| NO. | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   | A7   | A8   | A9   | A10  | A11  | B1   | B2   | B3   | C1   | C2   | C3 | SUM | AVG  | SARAN  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|------|--|
| 33  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    | Agar aplikasi dari pemahaman terhadap eksistensi dan pemberdayaan masyarakat adat itu bisa terlaksana dengan baik. Penting diadakan seminar yang lebih banyak di masing-masing wilayah masyarakat adat |
| 34  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |  |
| 35  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |  |
| 36  | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 9  | 59  | 3.69 | Materi perlu dibagikan kepada peserta  |
| 37  | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 3    | 9  | 58  | 3.63 |  |
| 38  | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 60  | 3.75 |  |
| 39  | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 4    | 8  | 55  | 3.44 | Mohon dibagikan ke para peserta materi yang disampaikan pemateri   |
| 40  | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 9  | 58  | 3.63 | Dari sisi materi dan narasumber sudah sangat baik, mungkin dari sisi waktu tanya jawab lebih diperpanjang agar setengah dari peserta dapat bertanya  |
| 41  | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 9  | 51  | 3.19 |  |
| 42  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 9  | 51  | 3.19 |  |
| 43  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 8  | 64  | 4    |  |
| 44  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 58  | 3.63 |  |
|     | 3.55 | 3.55 | 3.45 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.59 | 3.48 | 3.55 | 3.64 | 3.59 | 3.59 | 3.52 | 3.45 | 3.70 | 3.66 |    |     | 3.55 |  |

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara**  
**Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 September 2022**

*Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.*

| NO. | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   | A7   | A8   | A9   | A10  | A11  | B1   | B2   | B3   | C1   | C2   | C3 | SUM | AVG  | SARAN  |  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|------|--|--|
| 1   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4  | 8   | 64   | 4  |  |
| 2   | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3  | 8   | 64   | 3,76   |  |
| 3   | 4    | 3    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 8  | 55  | 3,44 |  |  |
| 4   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |  |  |
| 5   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 62  | 3,88 |  |  |
| 6   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 8  | 72  | 4,24 |  |  |
| 7   | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 8  | 63  | 3,71 |  |  |
| 8   | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 59  | 3,47 |  |  |
| 9   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 73  | 4,29 |  |  |
| 10  | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 8  | 68  | 4    | Materi tolong dibagikan  |  |
| 11  | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 2    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 8  | 61  | 3,59 |  |  |
| 12  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 56  | 3,29 |  |  |
| 13  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |  |  |
| 14  | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 62  | 3,88 |  |  |
| 15  | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 62  | 3,88 |  |  |
| 16  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |  |  |
| 17  | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 7  | 57  | 3,56 |  |  |
| 18  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |  |  |
| 19  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 8  | 64  | 4    |  |  |
| 20  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |  |  |
| 21  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 8  | 51  | 3,19 |  |  |
| 22  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 8  | 53  | 3,31 |  |  |
| 23  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 48  | 3    | Sebaiknya bahan ajar dibagikan di depan. Diskusi diperbanyak untuk pendalaman. |  |
| 24  | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 8  | 61  | 3,81 |  |  |
| 25  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |  |  |
| 26  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |  |  |
| 27  | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 51  | 3,19 |  |  |
| 28  | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 53  | 3,31 |  |  |
| 29  | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 52  | 3,25 |  |  |
| 30  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 64  | 4    |  |  |
| 31  | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 3    | 9  | 58  | 3,63 |  |  |
| 32  | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 8  | 53  | 3,31 |  |  |
| 33  | 4    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 9  | 55  | 3,44 |  |  |
| 34  | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 9  | 60  | 3,75 |  |  |
| 35  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 9  | 63  | 3,94 |  |  |
| 36  | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 8  | 60  | 3,75 |  |  |
|     | 3,75 | 3,61 | 3,83 | 3,69 | 3,50 | 3,56 | 3,78 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3,69 | 3,67 | 3,53 | 3,53 | 3,78 | 3,61 | 8  | 60  | 3,72 |  |  |

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara  
 Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 September 2022

| NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MATERI MENARIK   | SUM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NARSUM MENARIK                        | MOD MENARIK  | SUM | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | SUM | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | SKOR | TOT | RATA RATA | KOMENTAR   |
|-----|---|---|---|---|---|---|--|-----|---|---|---|----|----|---------------------------------------|--------------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|------|-----|-----------|--|
| 1   | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 23  | 4 | 4 | 3 | 4  | 4  |                                       |              | 19  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 3  | 3  | 4  | 14  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  |      | 92  | 3.833     |  |
| 2   | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai Konstitusi | 19  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  |                                       |              | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 3  | 3  | 4  | 14  | 100  | 79  | 3.292     |  |
| 3   | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 19  | 4 | 3 | 3 | 3  | 3  |                                       |              | 16  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 16  | 3  | 3  | 4  | 3  | 13  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 90   | 76  | 3.167     | Selain materi utama yang disampaikan, perlu contoh yang terjadi di lapangan masyarakat. Memberikan edukasi yang lebih luas, khususnya di daerah terkait konstitusi, baik lembaga adat atau pemangku adat dan juga terhadap masyarakat secara umum. |
| 4   | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 19  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  |                                       |              | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 83   | 72  | 3.458     |  |
| 5   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 18  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  |                                       |              | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 72   | 72  | 3         |  |
| 6   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 24  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H.      |              | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 95   | 96  | 4         |  |
| 7   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 24  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  |                                       |              | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 95   | 96  | 4         | Waktu tanya jawab perlu diperpanjang   |
| 8   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 24  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  |                                       |              | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 96   | 96  | 4         | Luar biasa sangat baik   |
| 9   | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 23  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | Andi Suharis, S.H., M.H.              | Imam Margono | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 100  | 95  | 3.958     | Alokasi waktu ditambah setiap materi   |
| 10  | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 21  | 4 | 4 | 4 | 4  | 3  |                                       |              | 19  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 16  | 4  | 3  | 4  | 4  | 15  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 87   | 87  | 3.625     |  |
| 11  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 12  | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  |                                       |              | 10  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 2  | 2  | 2  | 2  | 8   | 2  | 3  | 3  | 3  | 11  | 56   | 56  | 2.333     | Sebaiknya transportasi dna uang saku dibayar selesai acara   |
| 12  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 18  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  |                                       |              | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 72   | 72  | 3         |  |
| 13  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 19  | 3 | 3 | 3 | 4  | 3  |                                       |              | 16  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 17  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 3  | 3  | 3  | 4  | 13  | 77   | 77  | 3.208     |  |
| 14  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 18  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  |                                       |              | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 80   | 72  | 3         | Sebaiknya bahan ajar diberikan sebelum kegiatan. Waktu diskusi pendalaman diperbanyak. Perlu database peserta yang pernah mengikuti diklat   |
| 15  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 18  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  |                                       |              | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 4  | 3  | 3  | 4  | 14  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 74   | 74  | 3.083     |  |
| 16  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 18  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.        |              | 15  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 16  | 3  | 3  | 4  | 3  | 13  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 93   | 74  | 3.083     |  |
| 17  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |  | 18  | 3 | 3 | 3 | 4  | 3  |                                       |              | 16  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 18  | 3  | 3  | 4  | 3  | 13  | 4  | 4  | 3  | 4  | 15  | 85   | 80  | 3.333     | Waktu penyelenggaraan ditambah. Libatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lebih diutamakan diskusi   |
| 18  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 21  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  | Prof. Dr. Arief Hidayat,              | Imam Margono | 15  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 17  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 85   | 81  | 3.375     | Terima kasih banyak Pak Kapusdik atas pelayanan maksimal untuk peserta dan MAKN  |
| 19  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 21  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H. | Imam Margono | 20  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 16  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 95   | 85  | 3.542     | Pelayanan dan fasilitas sudah mantap. Kalau bisa, khusus MAKN tetap diusahakan bisa menginap di hotel  |
| 20  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 17  | 3 | 4 | 3 | 3  | 4  |                                       |              | 17  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 3  | 2  | 2  | 3  | 10  | 3  | 3  | 2  | 3  | 11  | 86   | 70  | 2.917     |  |
| 21  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 24  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  |                                       |              | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 96   | 96  | 4         |  |
| 22  | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 21  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., M.S.    | Imam Margono | 20  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 16  | 3  | 3  | 4  | 3  | 13  | 3  | 3  | 4  | 4  | 14  | 94   | 84  | 3.5       | Sudah sangat baik  |
| 23  | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai Konstitusi | 19  | 3 | 3 | 4 | 4  | 3  | Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., M.S.    | Imam Margono | 17  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 19  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 3  | 3  | 4  | 4  | 14  | 98   | 85  | 3.542     |  |
| 24  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 18  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.        |              | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 98   | 72  | 3         |  |
| 25  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai Konstitusi | 23  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.        | Imam Margono | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 90   | 95  | 3.958     |  |
| 26  | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 21  | 3 | 3 | 3 | 4  | 4  |                                       |              | 17  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 18  | 4  | 3  | 3  | 3  | 13  | 4  | 3  | 3  | 3  | 13  | 82   | 82  | 3.417     |  |
| 27  | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 20  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  | Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H.      |              | 15  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 17  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 100  | 76  | 3.167     |  |

| NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MATERI MENARIK  | SUM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NARSUM MENARIK                     | MOD MENARIK  | SUM | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | SUM | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | SKOR | TOT   | RATA RATA   | KOMENTAR  |  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|----|----|------------------------------------|--------------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|------|-------|---|---|--|
| 28  | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |   | 16  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  |                                    |              | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 80   | 70    | 2.917   | Materi kalau bisa dibahas lebih mendalam. Waktu bertanya harus lebih diperbanyak/ditambah             |  |
| 29  | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |   | 20  | 4 | 3 | 4 | 3  | 4  |                                    |              | 18  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 16  | 4  | 2  | 3  | 3  | 12  | 3  | 3  | 4  | 4  | 14  |      | 80    | 3.333   | menurut kami semua layanan, fasilitas, transportasi cukup baik  |  |
| 30  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 18  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  |                                    |              | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 3  | 3  | 4  | 3  | 13  |      | 73    | 3.042   |   |  |
| 31  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Eksistensi Masyarakat adat dalam proses pengujian undang-undang di MK | 24  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., M.S. |              | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 90   | 96    | 4   |   |  |
| 32  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 19  | 4 | 4 | 3 | 3  | 3  |                                    |              | 17  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 17  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 4  | 4  | 3  | 4  | 15  | 99   | 80    | 3.333   | Sangat menyenangkan walau waktu hanya 3 hari. Untuk perbaikan baik, kalau bisa ditingkatkan           |  |
| 33  | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |   | 19  | 4 | 3 | 3 | 3  | 3  |                                    |              | 16  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 16  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 3  | 3  | 4  | 3  | 13  | 76   | 3.167 | Ketersediaan waktu yang cukup dan materi diharapkan dapat diperoleh di awal   |   |  |
| 34  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |   | 23  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.     | Imam Margono | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 99   | 95    | 3.958   | Ada baiknya peserta menginap di kompleks Pusdiklat  |  |
| 35  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 24  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  |                                    |              | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 96   | 4     | 4   | Puas dalam menerima materi. Semoga kerjasama MK dan MAKN bersinergi                                   |  |
| 36  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 18  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  |                                    |              | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 3  | 4  | 4  | 4  | 15  | 75   | 3.125 | Pelayanan administrasi cukup baik, informasi mudah diakses. Pelayanan keamanan yang menyenangkan. Penyelenggaraan kegiatan dapat bermanfaat |   |  |
| 37  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Eksistensi Masyarakat adat dalam proses pengujian undang-undang di MK | 24  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.     | Imam Margono | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 96   | 4     | 4   |   |  |
| 38  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 24  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  |                                    |              | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 3  | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 91   | 3.792 |   |   |  |
| 39  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 19  | 4 | 3 | 4 | 3  | 3  |                                    |              | 17  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 18  | 3  | 4  | 4  | 4  | 15  | 4  | 3  | 3  | 4  | 14  | 83   | 3.458 | Harap materi diberikan pada peserta   |   |  |
| 40  | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |   | 20  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  |                                    |              | 15  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 19  | 4  | 3  | 4  | 3  | 14  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 80   | 3.333 | Menyediakan waktu yang cukup untuk narasumber   |   |  |
| 41  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila                  | 24  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  |                                    |              | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 100  | 96    | 4   | 4   |  |
| 42  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 24  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  |                                    |              | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 90   | 96    | 4   | 4   |  |
| 43  | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |   | 20  | 3 | 3 | 3 | 4  | 4  |                                    |              | 17  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 3  | 4  | 4  | 3  | 14  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 87   | 3.625 | Penggantian uang transport mohon diberikan ketika acara penutupan   |   |  |
| 44  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK            | 23  | 4 | 4 | 3 | 4  | 4  | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.     |              | 19  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 19  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 93   | 3.875 | Cukup memuaskan dan kalau bisa di tahun depan diulangi  |   |  |
| 45  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |   | 23  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  |                                    |              | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 95   | 3.958 |   |   |  |
| 46  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 18  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  | Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., M.S. | Imam Margono | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 87   | 72    | 3   | Materi berbentuk buku agar materi lebih kami pahami. Waktu lebih banyak untuk diskusi dan tanya jawab |  |
| 47  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |   | 21  | 4 | 4 | 3 | 3  | 3  |                                    |              | 17  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 18  | 4  | 3  | 3  | 3  | 13  | 3  | 4  | 4  | 4  | 15  | 99   | 84    | 3.5   |   |  |
| 48  | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai Konstitusi      | 20  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.     |              | 15  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 16  | 4  | 3  | 3  | 3  | 13  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 76   | 3.167 |   |   |  |
| 49  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 24  | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  |                                    |              | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 98   | 96    | 4   | 4   |  |
| 50  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |   | 20  | 3 | 4 | 3 | 3  | 4  |                                    |              | 17  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 17  | 4  | 4  | 4  | 3  | 15  | 3  | 4  | 4  | 4  | 15  | 84   | 3.5   |   |   |  |
| 51  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |   | 23  | 4 | 4 | 3 | 4  | 4  | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.     |              | 19  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 3  | 4  | 3  | 14  | 3  | 3  | 4  | 4  | 14  | 95   | 90    | 3.75  |   |  |
| 52  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 18  | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.     |              | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 3  | 4  | 4  | 3  | 14  | 4  | 4  | 3  | 3  | 14  | 9    | 76    | 3.167   |   |  |
| 53  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 24  | 3 | 4 | 4 | 4  | 4  |                                    |              | 19  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 95   | 3.958 |   |   |  |
| 54  | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |   | 21  | 3 | 3 | 3 | 4  | 3  |                                    |              | 16  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 19  | 4  | 4  | 4  | 3  | 15  | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 83   | 3.458 |   |   |  |
| 55  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 18  | 4 | 3 | 3 | 3  | 3  |                                    |              | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 4  | 4  | 4  | 4  | 16  | 90   | 86    | 3.583   |   |  |

| NO. | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | MATERI MENARIK  | SUM  | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | NARSUM MENARIK                     | MOD MENARIK      | SUM  | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | SUM  | 17   | 18   | 19   | 20   | SUM  | 21   | 22   | 23   | 24   | SUM  | SKOR | TOT   | RATA RATA  | KOMENTAR  |
|-----|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|---|
| 56  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | Eksistensi Masyarakat adat dalam proses pengujian undang-undang di MK | 24   | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    |                                    | Imam Margono     | 19   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 20   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 95   | 3.958 | Secara over all kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas support dan kerjasama panitia penyelenggara selama kegiatan berlangsung |   |
| 57  | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    |   | 22   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.     | Imam Margono     | 20   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 20   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 98   | 94    | 3.917  | Tetap menjaga kualitas pelayanan yang prima   |
| 58  | 3    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    |   | 22   | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.     | Imam Margono     | 18   | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 18   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 3    | 4    | 4    | 4    | 15   | 98   | 89    | 3.708  |   |
| 59  | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    |   | 22   | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    |                                    |                  | 18   | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 18   | 3    | 4    | 4    | 3    | 14   | 4    | 3    | 4    | 4    | 15   | 87   | 3.625 |  |   |
| 60  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |   | 24   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |                                    |                  | 20   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 20   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 96   | 4     |  |   |
| 61  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |   | 18   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                    |                  | 15   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 15   | 3    | 3    | 3    | 3    | 12   | 3    | 3    | 3    | 3    | 12   | 88   | 72    | 3  |   |
| 62  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |   | 24   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | Semua                              | Semua            | 20   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 20   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 99   | 96    | 4  |   |
| 63  | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    |   | 19   | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.     | Ardiansyah Salim | 17   | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 16   | 3    | 3    | 4    | 4    | 14   | 3    | 3    | 3    | 3    | 12   | 90   | 78    | 3.25   |   |
| 64  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |   | 18   | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.     | Ardiansyah Salim | 16   | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 16   | 4    | 3    | 3    | 3    | 13   | 3    | 3    | 3    | 3    | 12   | 90   | 75    | 3.125  |   |
| 65  | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    |   | 19   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.     |                  | 20   | 4    | 3    | 4    | 3    | 4    | 18   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 89   | 3.708 |  |   |
| 66  | 3    | 3    | 3    | 3    | 2    | 3    |   | 17   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | Andi Suharis, S.H., M.H.           |                  | 15   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 15   | 3    | 3    | 3    | 3    | 12   | 3    | 3    | 3    | 3    | 12   | 98   | 71    | 2.958  | Materi diberikan lebih dulu sebelum dimulai. Peserta harus siap mengikuti materi ajar |
| 67  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |   | 18   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                    |                  | 15   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 15   | 3    | 3    | 3    | 3    | 12   | 3    | 3    | 3    | 3    | 12   | 72   | 3     | Terima kasih atas segalanya  |   |
| 68  | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    |   | 19   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., M.S. |                  | 15   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 15   | 3    | 3    | 3    | 3    | 12   | 3    | 3    | 3    | 3    | 12   | 81   | 73    | 3.042  |   |
| 69  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |   | 18   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                    |                  | 15   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 15   | 3    | 3    | 3    | 3    | 12   | 3    | 3    | 3    | 3    | 12   | 72   | 3     |  |   |
| 70  | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    |   | 21   | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                    |                  | 16   | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 17   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 3    | 3    | 4    | 4    | 14   | 90   | 84    | 3.5  |   |
| 71  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |   | 18   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                    |                  | 15   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 15   | 3    | 3    | 3    | 3    | 12   | 3    | 3    | 3    | 3    | 12   | 72   | 3     | Kedepan perlu diterapkan tiap daerah   |   |
| 72  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |   | 24   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |                                    |                  | 20   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 20   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 95   | 96    | 4  | Selalu diberikan resume/ringkasan materi  |
| 73  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |   | 24   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |                                    |                  | 20   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 20   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 4    | 4    | 4    | 4    | 16   | 96   | 4     |  |   |
|     | 3.41 | 3.62 | 3.41 | 3.38 | 3.36 | 3.37 |   | 3.42 | 3.53 | 3.47 | 3.41 | 3.49 | 3.48 |                                    |                  | 3.48 | 3.53 | 3.49 | 3.48 | 3.56 | 3.59 | 3.53 | 3.56 | 3.45 | 3.58 | 3.45 | 3.51 | 3.47 | 3.48 | 3.53 | 3.59 | 3.52 |      |       | 3.49   |   |



# IMPLEMENTASI NILAI – NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Oleh:

**Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**

**Hakim Mahkamah Konstitusi RI**

**Disampaikan pada acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat  
Kerajaan Nusantara (MAKN)  
Selasa, 22 September 2022**



**Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. (Karaeng A'rinra Galesong)**

**HAKIM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

## **PROFIL**



- **Lahir** : Semarang, 3 Februari 1956
- **S3** - Ilmu Hukum UNDIP (2006)
- **Pembina Utama, IV/e /GURU BESAR**(2010)
- **Ketua Mahkamah Konstitusi 2 Periode**  
(Periode I: 2015-2017; Periode II: 2017 - 2018)
- **Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi** Periode 2014 - 2015
- **Hakim Konstitusi 2 Periode**  
(Periode I: 2013-2018; Periode II: 2018- Sekarang)
- **Guru Besar Hukum Tata Negara UNDIP** (2008)
- **Dekan Fakultas Hukum UNDIP** Periode 2007-2011
- **Ketua Program Magister Ilmu Hukum FH UNDIP**  
Periode 2011-2013



# Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

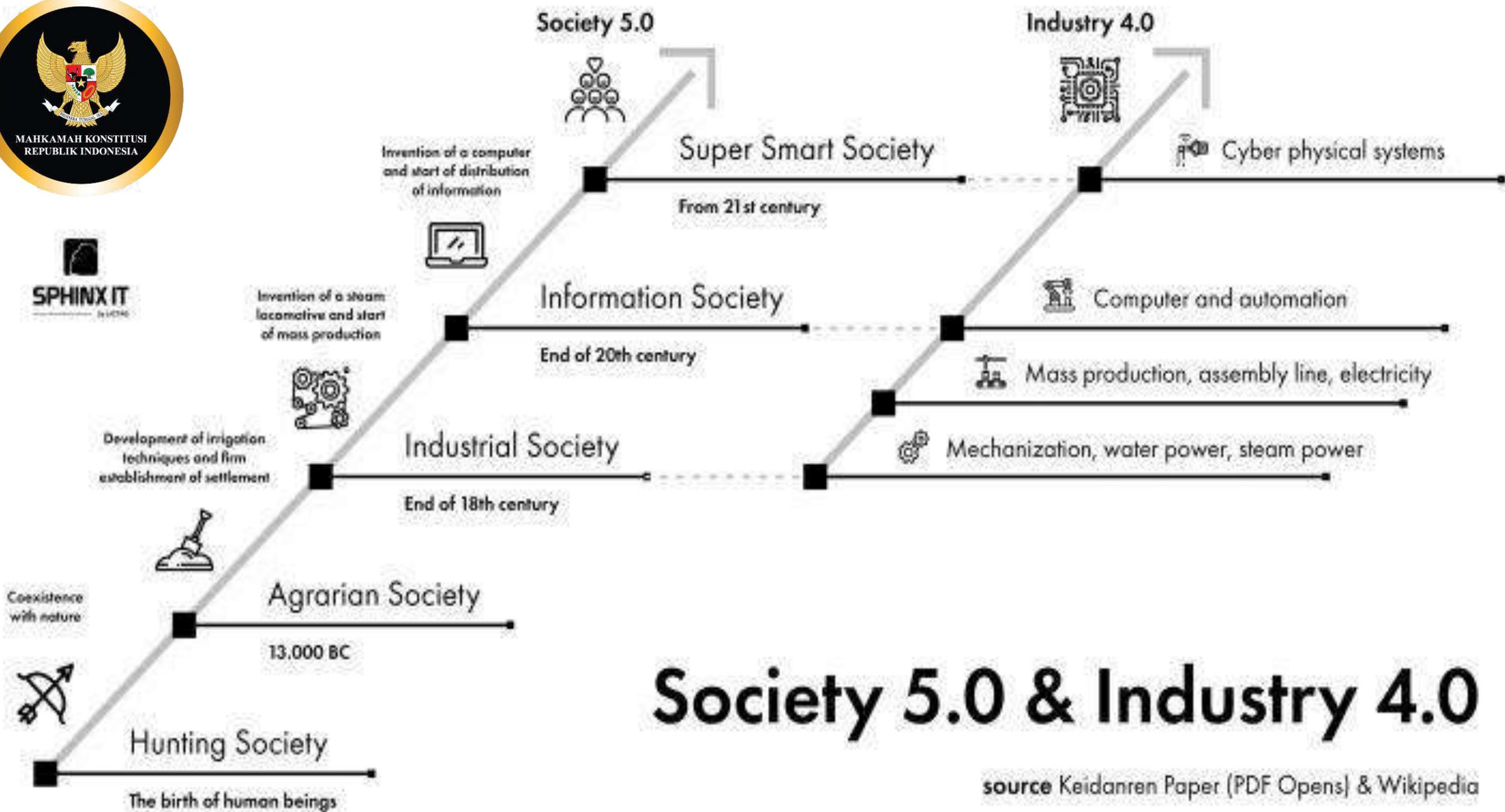
HAKIM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## TANDA JASA

1. **Bintang Mahaputera Adipradana**, dari Presiden Republik Indonesia
2. **Bintang Demokrasi** dari Presiden Kazhakstan
3. Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun dari Presiden Republik Indonesia
4. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia
5. Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Republik Indonesia
6. Satya Lencana Pengabdian 25 Tahun dari Universitas Diponegoro.

## PERAN INTERNASIONAL

1. Presiden AACC periode 2015-2016; diperpanjang 2016-2017.
2. Anggota *World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* periode 2015-2017; dilanjutkan 2017-2020.
3. Pemrakarsa Penyelenggaraan *World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* di Indonesia tahun 2024.
4. Pemrakarsa Konferensi MK Asia - Afrika Tahun 2022 (Komitmen dari hasil penandatanganan MoU Asosiasi MK Asia dan Asosiasi MK Afrika Tahun 2017).
5. Pemrakarsa berdirinya Sekretariat Tetap AACC di MKRI Jakarta; Pemrakarsa AACC bidang Pendidikan dan Pelatihan di MK Turki, Ankara; dan Pemrakarsa AACC bidang Riset dan Pengembangan di MK Korea Selatan, Seoul.
6. Pertemuan Bureau Meeting WCCJ, Venice 2016–2017.
7. Berperan aktif dalam organisasi Internasional seperti Asosiasi Mahkamah Konstitusi Berbahasa Perancis ACCPUF dan Conference of the European Constitutional Court,
8. Pemrakarsa Kerjasama Pendidikan antara MK dengan Universitas di Luar Negeri (Mahkamah Internasional Den Haag, National University of Singapore, Chulalongkorn University, Groningen University, Erasmus University, Leiden University, Utrecht University, The Hague University, University of Wisconsin Law School, Flinders University, University of Philipina, University of San Carlos, University of St. Petersburg, Bowman University, People Friendship University).



# Society 5.0 & Industry 4.0

source Keidanren Paper (PDF Opens) & Wikipedia



- **VUCA Istilah di dunia militer tahun 1990an (Fog war)**
- **Volatility = Perubahan yang serba cepat**
  - Visi, tujuan, niat baik
- **Uncertainty = Ketidakpastian**
- **Complexity = Kompleksitas**
  - Situasi, kondisi yang rumit
  - Tidak bisa diselesaikan secara fragmentaris
- **Ambiguity = Ambigu**
  - Realitas yang kabur
  - Fleksibilitas, keluwesan



# Kemampuan-Kompetensi Yang Dibutuhkan dalam Kondisi-Situasi VUCA

1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang rumit;
2. Berfikir dan bertindak kritis dan solutif;
3. Selalu kreatif;
4. Besinergi, dan berkolaborasi;
5. Berfikir dan bersikap positif;
6. Kecerdasan emosional-mampu mengelola hati dan pikiran diri sendiri;
7. Mampu cepat menilai, dan mengambil keputusan;
8. Berorientasi pada pemberian pelayanan yang optimal;
9. Mudah beradaptasi-fleksibel-luwes.

**Kemampuan-kecerdasan itu tidak bisa dilakukan oleh artificial intelligence, hanya dipunyai oleh human being**

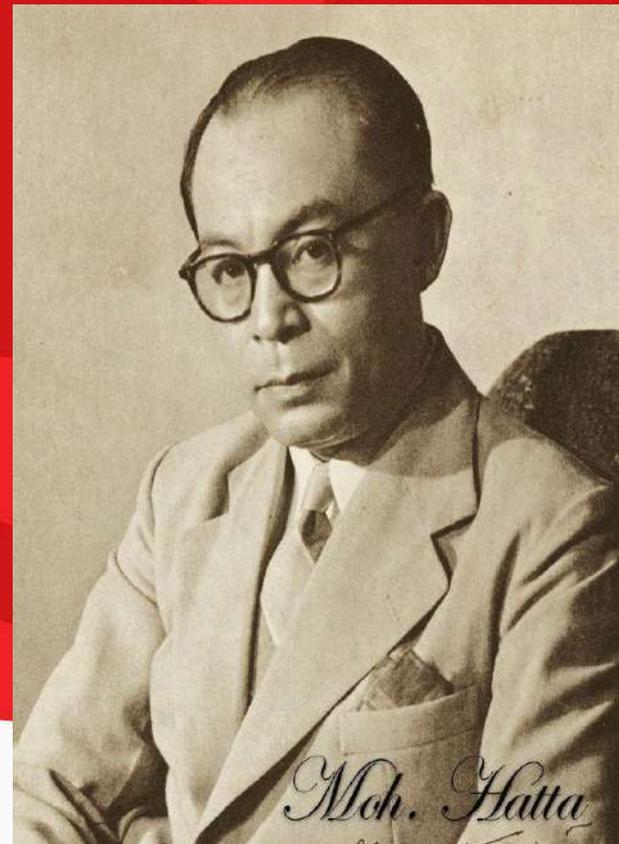
**Antisipasi society 5.0 tetap berpusat pada manusia.**



# PROKLAMATOR

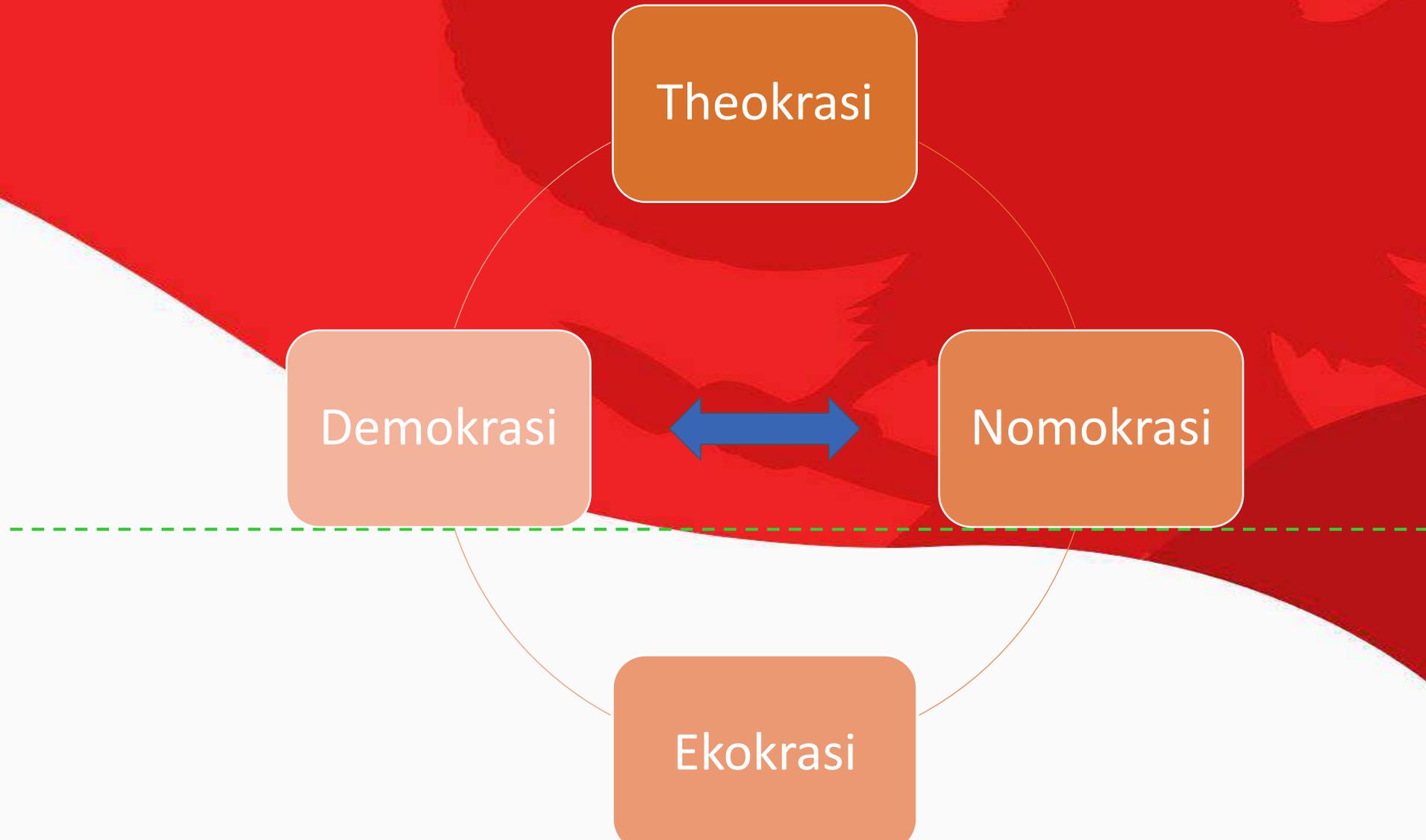


Ir. Soekarno



Moh. Hatta

# Konsep Pengelolaan Negara RI



# BERHUKUM



- Membuat Hukum

- Menerapkan Hukum

# LANDASAN/ DASAR – HIERARKHI MEMBUAT HUKUM

**Politik Hukum Ideal  
PANCASILA**

```
graph TD; A[Politik Hukum Ideal PANCASILA] --> B[Politik Hukum Dasar – UUD 1945]; B --> C[Politik Hukum Instrumental – UU]; C --> D[Produk Hukum dibawah UU];
```

**Politik Hukum Dasar – UUD 1945**

**Politik Hukum Instrumental – UU**

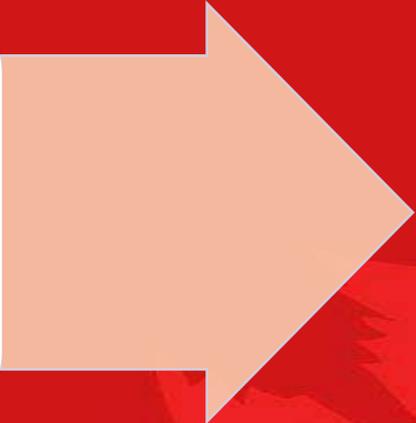
**Produk Hukum dibawah UU**

# 4 KAIDAH PENUNTUN HUKUM DAN KEBIJAKAN NEGARA

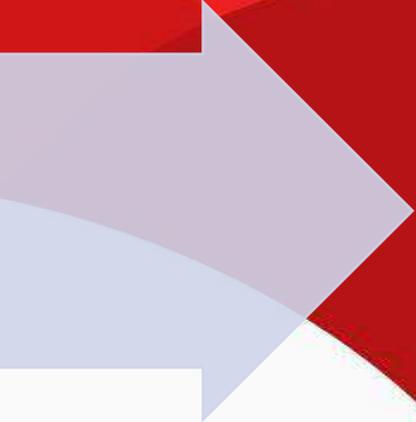
- **Menjaga Integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;**
- **Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;**
- **Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;**
- **Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.**

# KONDISI EKSIESTEING PEMBUATAN PRODUK HUKUM (I)

Tidak/ belum konsisten – koheren –  
berkorespondensi dengan dasar  
landasan dari 4 kaidah penuntunnya



Terjadi inkonsistensi – disharmoni  
secara vertikal - horizontal



# KONDISI EKSIKUSI PEMBUATAN PRODUK HUKUM (II)

Hukum kehilangan orientasi pada tujuan negara Tujuan Hukum itu Sendiri

Hukum sarat dengan kepentingan keluarga golongan penguasa menjauh dari kepentingan umum

→ Hukum kehilangan visi kerakyatan

Hukum Bersifat Transaksional

Hukum Sebagai Komoditi

# KONSEP NEGARA HUKUM Indonesia

## Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

### Prinsip Negara Hukum Pancasila

**Suatu Negara  
Kekeluargaan**

**Keterpaduan Hukum  
Sbg Perubahan Masy  
Dan Cermin Budaya masy**

**Negara hukum  
Yang  
Berkepastian  
Dan Berkeadilan  
Dengan Sifat  
Prismatik**

**Religious  
Nation State**

**Basis Hukum  
Nasionalis didasarkan  
Pada Prinsip yang  
Netral dan Universal**

# Cita Hukum (*Rechtsidee*)

Negara Hukum Pancasila Harus Sesuai dengan Empat Cita Hukum, Yakni :

• menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun teritorial

- **Mewujudkan Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) dan Kedaulatan Hukum (Nomokrasi) Sekaligus**

**Mewujudkan Kesejahteraan Umum dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

- **Menciptakan Toleransi Atas Dasar Kemanusiaan dan Berkeadabandalam Hidup Beragama**

# Membangun Sistem Hukum Nasional

Bertujuan untuk menjamin  
integrasi bangsa dan  
kegairahan masyarakat  
melalui pendekatan  
demokratis

**Berdasarkan atas kesepakatan  
rakyat baik diputuskan melalui  
musyawarah mufakat maupun  
pemungutan suara dan hasilnya  
dapat diuji konsistensinya  
secara yuridis dengan  
rechtsidee**

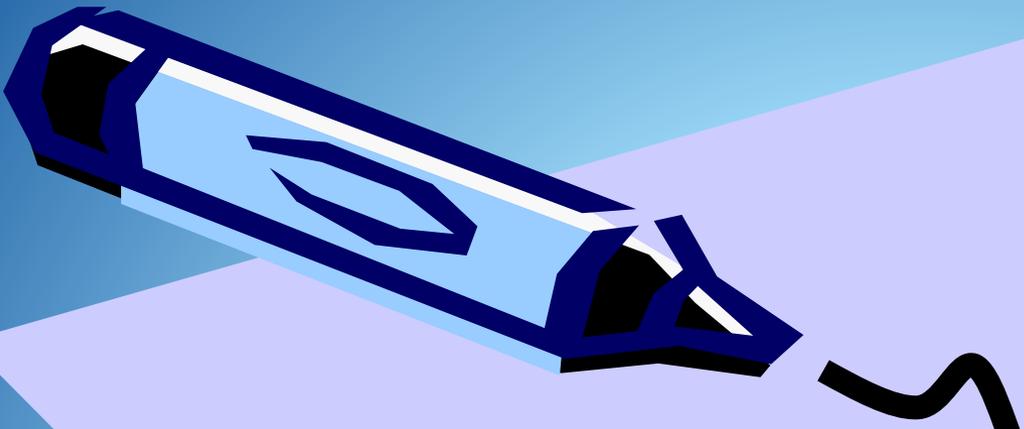
Sistem Hukum Nasional

Bertujuan mewujudkan  
keadilan sosial dan  
keadilan hukum

**Bertujuan Mewujudkan  
toleransi Beragama  
yang berkeadaban**



**TERIMA KASIH**



**EKSISTENSI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DALAM PROSES PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**CERAMAH  
DI PUSDIKLAT MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI WARGA  
NEGARA BAGI MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA (MAKN)  
SELASA 20 SEPTEMBER 2022**

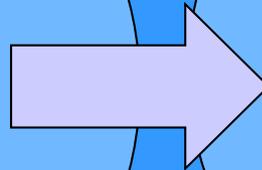


**Prof Dr Aminuddin Salle**

**Kepala Kampung Adat & Budaya  
Balla' Barakkaka ri Galesong  
Desa Pancasila & Konsitusi**



**REVOLUSI  
INDUSTRI  
DI EROPA**



**ASIA,  
AFRIKA, OSEA  
NIA**



# **PADA SAAT REVOLUSI INDUSTRI DI EROPAH**



- **PENEMUAN MESIN KAPASITAS TINGGI**
- **BUTUH BAHAN BAKU DLM JUMLAH BESAR**
- **BUTUH PASAR UNTUK MENYERAP PRODUKSI**
- **SASARAN MEREKA ADALAH: ASIA, AFRIKA**



# **PENJAJAH MEMANDANG NEGERI ANEH DIHUNI MAKHLUK PRIMITIVE, MANUSIA IBLIS**

- TAK ADA HUKUM
- TAK RASIONAL, PERCAYA KPD MISTIK
- INDIVIDU TAK TERLINDUNGI, MENDAHULUKAN KOMUNAL





- Tak ada hukum tertulis sehingga tak ada kepastian hukum
- tak ada penegak hukum: polisi, jaksa, hakim, pengacara
- Percaya mistik yg tak masuk akal
- Tak ada jaminan kehidupan perorangan karena yg didahulukan adalah kepentingan komunal (kelompok)



# **OLEH SEBAB ITU MEREKA MEMAKSAKAN SISTEM HUKUM MEREKA**



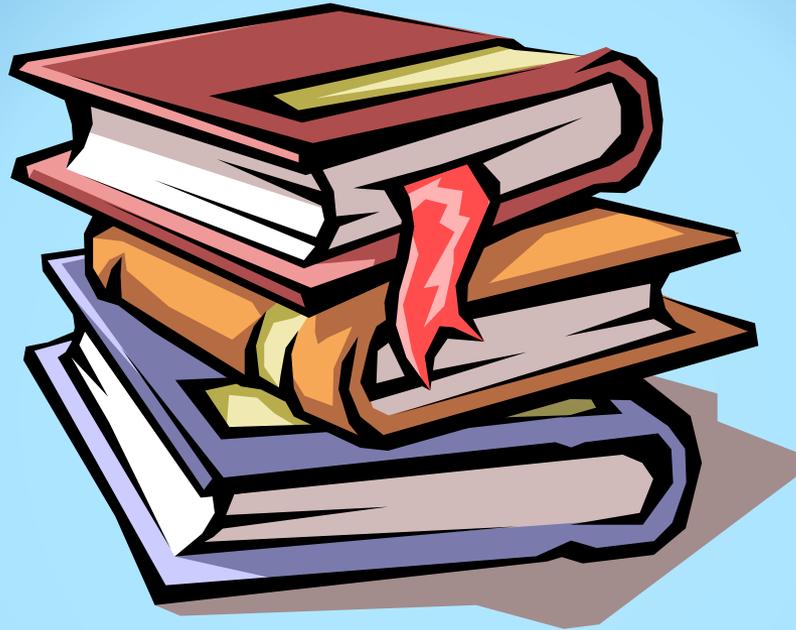
- DALAM BENTUK TERTULIS  
MISALNYA WvK, BW DSTNYA
- MEMBERLAKUKAN HUKUM  
BELANDA DI BIDANGHUKUM  
AGRARIA



# DALAM HUKUM BELANDA DIANUT *DOMEINVERKLARING*



# **IKUT SERTA JUGA BUDAYAWAN, YURIST DSB**



**MEMPELAJARI MASY & KEBUDAYAAN  
SUKU2 BANGSA DI LUAR EROPA &  
AMERIKA GUNA KEPENTINGAN  
KOLONIAL**



# **SAMBIL ITU:**

- Melakukan Penelitian: Van Vollenhoven, Ter Haar, Snouck Hurgronje Dll
- Mendengarkan Pandangan Pakar Indonesia, Antara Lain Soepomo Dll



# MEREKA MEMPELAJARI KEADAAN ITU



- Mengumpulkan bahan-bahan berupa manuscript
- Melakukan penelitian mendalam (contoh Prof Chabot)
- Menguji coba di negerinya



**MEREKA AL MENDPTKAN  
MANUSIA YG SUKA DAMAI,  
HIDUP TENTRAM, TOLERANSI,  
GOTONG-ROYONG**



# SEKARANG TIMBUL KESADARAN BARU BAGI MASY EROPA



- Masyarakat Indonesia manusia Malaikat
- Orang Baratlah yang iblis
- Sebenarnya ada hukum, hanya saja:
  - beda struktur dengan hukum barat
  - Tujuan hukum berbeda
  - Bentuknya tidak tertulis dlm bentuk perundang-undangan





- Mereka mengakui kesalahan perbuatan mereka kpd bangsa kita, dan bersedia memberikan konpensasi
- Mereka sadar bahwa kekayaan yg terbesar yg mereka ambil bukan rempah, hasil hutan dsbnya tetapi adalah kearifan leluhur kita
- Mereka lalu mengadopsi kearifan leluhur kita, antara lain: *restorative justice*



# KEADAAN EROPA SEKARANG

- ✓ **SETIAP HARI TERJADI PHK SIPIR**
- ✓ **BEBERAPA PENJARA DITUTUP KARENA PENJAHAT BERKURANG**
- ✓ **MELAKUKAN PERJANJIAN DNG NORWEGIA, MEMENJARAKAN PENJAHATNYA DI BELANDA**
- ✓ **SEMENTARA DI TEMPAT LAIN, PENJARA PENUH, *OVER CAPACITY* DENGAN SEGALA DAMPAKNYA**



# SEBALIKNYA YANG MENJADI GEJALA BAGI KITA IALAH :

- KEKURANG-TAHUAN
- MENGANGGAP HUKUM LUAR LEBIH BAIK DARI HUKUM SENDIRI
- MENGANGGAP HUKUM KITA KETINGGALAN





- CONTOH SEORANG PENCARI KEADILAN TELAH MENYAMPAIKAN BEBERAPA ORANG WARGANYA DITAHAN DENGAN TUDUHAN MEMBAYAR GANTI KERUGIAN HAK ATAS TANAH KPD YG TIDAK BERHAK



KOLONIAL  
BELANDA



**OKNUM  
PENYELENGGARA  
NEGARA KURANG PAHAM  
BAHWA:**

**Tanah negara  
adalah**

- **TANAH DIKUASAI  
NEGARA = BUKAN  
DIMILIKI OLEH  
NEGARA**
- **U/ SEBESAR-2NYA  
KEMAKMURAN RAKYAT**



**SALAH SATU HAL YG PERLU  
DIPERBAIKI IALAH KEBABLASAN  
DALAM MEMAHAMI TENTANG  
JAMINAN HUKUM BAGI INDIVIDU**



# **OKNUM YG SALAH KAPRAH TTG KEBEBASAN INDIVIDU**

- MENGINJAK MEJA PIMPINAN  
DENGAN ALASAN TUNTUTAN  
KKEBEBASAN BERKESPRESI
- MENEROBOS LAMPU MERAH
- BUAT SAYA INI EGOIS, BUKAN  
INDIVIDUALIS



# SEMENTARA ITU KEADAAN BELANDA SEKARANG



- ✓ **SETIAP HARI TERJADI PHK SIPIR**
- ✓ **BEBERAPA PENJARA DITUTUP KARENA PENJAHAT BERKURANG**
- ✓ **MELAKUKAN PERJANJIAN DNG NORWEGIA, MEMENJARAKAN PENJAHATNYA DI BELANDA**
- ✓ **SEMENTARA DI TEMPAT LAIN, PENJARA PENUH, *OVER CAPACITY* DENGAN SEGALA DAMPAKNYA**



# MENGAPA?

- **MEREKA MENGAMBIL & MENELITI KEARIFAN LELUHUR KITA, MENJADIKANNYA SEBAGAI WARISAN, MENGAMBIL MANFAAT DAN MENGAMALKAN KPD WARGANYA**
- **MENINGGALKAN WARISAN KPD DAERAH JAJAHANNYA: POLITIK ADU DOMBA**



**BAGAIMANA HUKUM YG  
SEBENARNYA YANG MENJADI  
JATI DIRI BANGSA INI**



# SOEPOMO

## HUBUNGAN INDIVIDU & MASY



- MASY BARAT: DAHULUKAN KEPENTINGAN INDIVIDU DNG ASUMSI: KEPENTINGAN SETIAP INDIVIDU =KEPENTINGAN MASY
- MASY TIMUR: DAHULUKAN KEPENTINGAN MASY=SELURUH INDIVIDU TERLINDUNGI

# PERSEKUTUAN HUKUM



MASYARAKAT  
YG BERTALIAN  
SATU SAMA  
LAIN  
(RECHTSGEMEIN  
SCHAFT)



**SUDAH WAKTUNYA  
KITA MENYAMAKAN  
PEMAHAMAN, DENGAN  
PENYELENGGARAAN SEPERTI INI  
YG DILAKUKAN OLEH MK RI  
BERSAMA DENGAN ORGANISASI  
KERAJAAN**





1. PASAL 33 UUD 1945 DINYATAKAN: BUMI, AIR & RUANG ANGKASA **DIKUASAI** OLEH NEGARA & DIPERGUNAKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT
2. BERDASAR UUPA SEGALA BENTUK *DOMEINVERKLARING* DICABUT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



# KEADAAN EROPA SEKARANG

- ✓ **SETIAP HARI TERJADI PHK SIPIR**
- ✓ **BEBERAPA PENJARA DITUTUP KARENA PENJAHAT BERKURANG**
- ✓ **MELAKUKAN PERJANJIAN DNG NORWEGIA, MEMENJARAKAN PENJAHATNYA DI BELANDA**
- ✓ **SEMENTARA DI TEMPAT LAIN, PENJARA PENUH, *OVER CAPACITY* DENGAN SEGALA DAMPAKNYA**



**ALHAMDULILLAH TELAH ADA  
BEBERAPA REGULASI:**



Pasal 18B ayat (2) UUD 1945:  
negara mengakui & menghormati  
kesatuan2 masyarakat hukum adat  
berserta hak-hak tradisionalnya  
sepanjang masih hidup & sesuai  
dengan perkembangan masyarakat &  
prinsip NKRI, yg diatur dlm undang-  
undang



UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, MHA diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

1. masyarakatnya masih dlm bentuk paguyuban,
2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. ada pranata & perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaat; dan
5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari





UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan UU Hak Cipta, MHA adalah kelompok masyarakat yg secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yg kuat dng lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yg menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.



Merawat keberadaan suku bangsa dng menjaga nilai luhur budaya/adat istiadatnya adalah ibarat menjaga peradaban manusia, Negara hadir untuk mengakui & melindungi keberadaan suku bangsa dalam bentuk formal/non formal al lain berupa pengakuan keberadaan MHA



# KESIMPULAN

- **KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ADALAH SESUATU YG ESSENSIAL DALAM PERKEMBANGAN HUKUM KITA**
- **MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN DEMIKIAN ADALAH KEBENARAN**
- **SECARA YURIDIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DIAKUI EKSISTENSINYA MULAI DARI KONSTITUSI & PERATURAN PERUNDANGAN**
- **OLEH SEBAB ITU MAKA MASYARAKAT HUKUM ADAT ADALAH SUBJEK HUKUM YG KOMPETEN DALAM PROSES PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAKAMAH KONSTITUSI**



MENGENAL BALLA' BARAKKAKA  
RI GALESONG



WISATA BUDAYA RRI



BBRG



KUNJUNGAN KE KADIS KEBUDAYAAN KE BBRG



MENGENAL BBRG

PESAN LELUHUR AGAR HIDUP  
TERARAH



BERTANYALAH KPD YH TAHU



APPILAJARAKKO RI PANRITAYYA



APPILANGGERIKO  
KANA TAU TOA



BERTAQWALAH KPD ALLATA'ALA



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **“JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI”**

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.  
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi**

**PUSAT PENDIDIKAN PANGASILA DAN  
KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
Selasa, 20 September 2022**

# Tujuan Bernegara dalam Pembukaan UUD 1945



Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

# Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional

- ❑ **Hak Asasi Manusia (HAM)** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- ❑ **Hak Konstitusional** adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang sesuai dan dijamin oleh konstitusi yang berlaku di negaranya masing-masing.



# Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara



Pemajuan Hak Asasi Manusia, melalui berbagai aspek yang tersedia, khususnya proses legislasi dan tindakan eksekutif

Perlindungan Hak Asasi Manusia, dari pihak-pihak yang berpotensi melanggar HAM

Pemenuhan Hak Asasi Manusia, sebagai upaya untuk menjaga martabat manusia agar tidak terlanggar

Penegakan Hak Asasi Manusia, sebagai pelaksanaan hukum terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran HAM

## Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A s.d. Pasal 28I), antara lain memuat:



- Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan
- Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
- Hak untuk berbudaya sebagai identitas masyarakat tradisional

# Pembatasan Hak Konstitusional

## Pasal 28J UUD 1945:

- (1) Setiap orang **wajib menghormati** hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang **wajib tunduk kepada pembatasan** yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.



# Mahkamah Konstitusi

## sebagai Pelindung Hak Konstitusional WN

### Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**”



# Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1** Menguji Undang-Undang terhadap UUD
- 2** Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara



- 3** Memutus Pembubaran Partai Politik
- 4** Memutus Perselisihan Hasil Pemilu
- 5** Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden

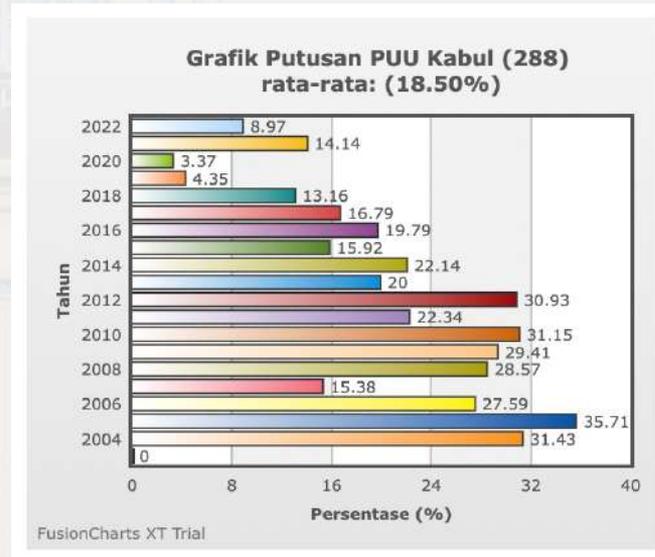
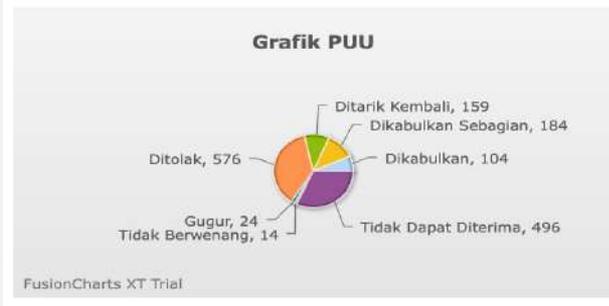
# Fungsi Mahkamah Konstitusi



# Statistik Putusan Mahkamah Konstitusi

(Update per hari ini: 20 September 2022)

| Rekapitulasi Putusan |         |        |            |
|----------------------|---------|--------|------------|
| No                   | Perkara | Jumlah | Persentase |
| 1                    | PUU     | 1557   | 46%        |
| 2                    | SKLN    | 29     | 1%         |
| 3                    | PHPU    | 676    | 20%        |
| 4                    | PHPKADA | 1136   | 33%        |
| Total                |         | 3398   | 100%       |



## Keterangan:

Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

# Contoh Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara, antara lain:



1. Anggaran Pendidikan 20% dari APBN dan APBD
2. Penggunaan KTP/Paspor dalam Pemilu dan Pilkada
3. Status Anak Luar Kawin terhadap Ayah kandungnya
4. Identitas Penghayat Kepercayaan di KTP dan KK

# 1. Anggaran Pendidikan 20% dari APBN dan APBD



Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian Putusannya berhasil mendorong Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya (*constitutional obligation*) untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Putusan MK ini telah membawa implikasi signifikan terhadap keterpenuhan **hak konstitusional warga negara terhadap pendidikan (*right to education*)**, khususnya untuk anak-anak usia wajib belajar

**Sumber:** Putusan Nomor 12/PUU-III/2005, Putusan Nomor 36/PUU-III/2005, Putusan Nomor 24/PUU-V/2007, dll.

## 2. Penggunaan KTP/Paspor dalam Pemilu dan Pilkada



Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa setiap warga negara yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap dapat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku.

Putusan MK ini telah melindungi hak konstitusional warga dalam menggunakan **hak memilih (*right to vote*)** di dalam Pemilu. Dengan adanya Putusan MK tersebut maka setiap warga negara meskipun tidak terdaftar di DPT tetap dapat menggunakan hak suaranya di dalam Pemilu dan Pilkada

**Sumber:** Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009

### 3. Status Anak Luar Kawin terhadap Ayah kandungnya



Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya saja. Artinya, sang ayah secara hukum tidak memiliki beban dan tanggung jawab terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak luar kawin).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya menafsirkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya **serta dengan laki-laki sebagai ayahnya** yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan ini telah memberikan perlindungan **hak konstitusional bagi anak** agar juga memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah kandungnya.

**Sumber:** Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010

## 4. Identitas Penghayat Kepercayaan di KTP dan KK



Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, para penghayat kepercayaan kerap mengalami diskriminasi struktural dan sosial akibat tidak diakomodirnya status penghayat kepercayaan di dalam KTP dan Kartu Keluarga, termasuk dibatasi aksesnya di bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, maupun fasilitas umum. Mereka terpaksa memilih salah satu agama yang tersedia atau dibiarkan kosong (tanda strip) dalam KTP dan KK-nya.

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan agar status penghayat kepercayaan juga dapat dimasukkan ke dalam KTP dan KK bagi para penganutnya. Putusan ini telah mengembalikan **hak-hak administratif kependudukan warga negara** yang berimplikasi signifikan terhadap keterpenuhan hak-hak konstitusional lainnya di berbagai bidang kehidupan.

**Sumber:** Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016

# HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

## Sumber Utama:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
  - PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
4. Putusan-Putusan MK



# KARAKTERISTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI



*Ad celeritatem iudicii (speedy trial)*

*Ius curia novit*

*Audi et alteram partem*

*Praeter omne rationabile dubium*

*Exceed the requested (ultra petita)*

# KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



*Finis illorum et ligatio*

*Erga omnes*

*Ex nunc, ex tunc*

*Non executio per se*

# KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Adanya hak konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

Hak konstitusional pemohon dianggap dirugikan oleh terbitnya UU yang diuji

Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik/khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi



# OBJEK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

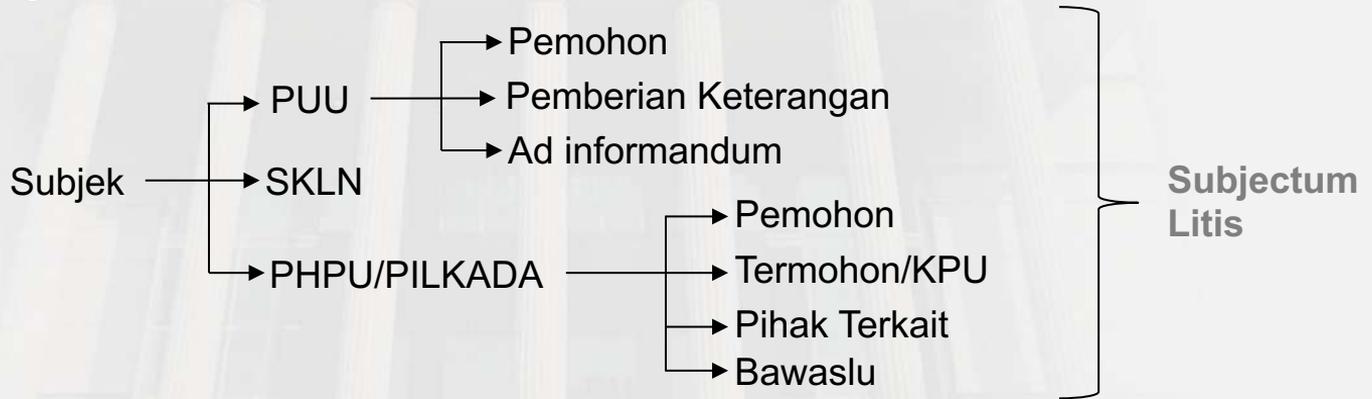
- Dapat dilakukan untuk seluruh UU, termasuk Perppu
- Terdiri dari Pengujian materiil dan formil
- Pengujian Materiil
  - Berkaitan dengan substansi dan norma UU
  - Tidak ada batas waktu
- Pengujian Formil
  - Berkaitan dengan prosedur dan proses pembuatan UU
  - Batas waktu pengajuan permohonan 45 hari

Objectum  
Litis



# SUBJEK/PEMOHON PENGAJUAN PERMOHONAN

- Perorangan WNI, baik Perorangan maupun Kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat [Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945]
- Badan Hukum Publik atau Privat
- Lembaga Negara



# MATERI DAN SISTEMATIKA PERMOHONAN

- Identitas Pemohon atau Kuasanya terdiri dari:
  - Nama, TTL/Umur, Pekerjaan, Agama, Alamat Lengkap
- Uraian Permohonan:
  1. Kewenangan Mahkamah
  2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
  3. Alasan permohonan (*Posita*)
  4. Permohonan (*Petitum*)



# PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA ONLINE



## SIMPEL

Sistem Informasi Permohonan Elektronik

### Apa itu SIMPEL?

Aplikasi berbasis web yang memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (Permohonan Online)

### Manfaat SIMPEL

- Masyarakat dapat mendaftarkan diri dalam mengajukan permohonan secara online
- Memantau perkembangan permohonan/perkara
- Mengakses jadwal sidang
- Mengakses list panggilan sidang
- Mengunduh risalah atau putusan

### Fitur SIMPEL

- Permohonan Pemohon Online
- Keterangan Pihak Terkait
- Tracking Perkara
- Jawaban Termohon

### Alur Registrasi SIMPEL

1. Kliklah alamat website [smpel.mkt.id](http://smpel.mkt.id) pada browser chrome/foxit
2. Mendaftar akun baru dengan klik [Pendaftaran Akun Baru](#) selanjutnya di data pada form secara lengkap, kemudian klik [Registrasi](#)
3. Bukalah email berdasarkan pada email pendaftaran, kemudian klik [Link Aktifkan Akun](#)
4. Setelah diaktifkan, login ke dalam website dengan Username dan Password yang ditentukan sebelumnya, kemudian klik [Login](#)
5. Setelah masuk ke dalam website, unduh [Keterangan Data User](#) pada form yang disediakan, kemudian klik [Unduh](#)

### Modul Permohonan Pemohon

- 01 **Permohonan Pemohon**  
 Modul form permohonan secara lengkap. 8 (delapan) langkah data dengan mengupload berkas dalam format digital. **Klik Simpan dan Kirim** jika sudah terisi data dan berkas yang telah lengkap, serta juga akan form dapat diupdate kembali. **Klik Simpan dan Kirim** jika form sudah diinputkan data dan berkas lengkap.
- 02 **Permohonan Pemohon**  
 Modul untuk mengupload form permohonan yang berkemungkinan akan muncul ke Bank Permohonan yang Berkemungkinan akan diupload pada saat proses di pengadilan.
- 03 **Permohonan Pemohon Online**  
 Modul untuk mengupload form permohonan yang berkemungkinan akan muncul ke Bank Permohonan yang Berkemungkinan akan diupload pada saat proses di pengadilan.

### Modul Pihak Terkait

- 01 **Uraian Keterangan Pihak Terkait**  
 Pihak terkait yang akan diupload ke website per permohonan akan per ke bank di **Uraian Pihak Terkait** untuk menginput data form permohonan/permohonan pihak terkait.
- 02 **Uraian Keterangan Pihak Terkait**  
 Modul form keterangan pihak terkait secara lengkap. 8 (delapan) langkah data dengan mengupload berkas dalam format digital. **Klik Simpan dan Kirim** jika sudah terisi data dan berkas yang telah lengkap, serta juga akan form dapat diupdate kembali. **Klik Simpan dan Kirim** jika form sudah diinputkan data dan berkas lengkap.
- 03 **Uraian Keterangan Pihak Terkait**  
 Modul untuk mengupload form keterangan pihak terkait yang berkemungkinan akan muncul ke Bank Permohonan yang Berkemungkinan akan diupload pada saat proses di pengadilan.

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# TAHAPAN PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

## Pemeriksaan Pendahuluan

- Penyampaian Pokok-Pokok Permohonan Secara Lisan.
- Penyampaian Nasihat Oleh Hakim
- Penyampaian Perbaikan Permohonan

## Pemeriksaan Persidangan

- Pemeriksaan pokok permohonan; alat-alat bukti tertulis;
- Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah; DPR dan/atau DPD; saksi; ahli; Pihak Terkait;
- Pemeriksaan alat-alat bukti
- Penyampaian Kesimpulan

## Pembacaan Putusan





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



**TERIMA  
KASIH**



**ANDI SUHARLIS, S.H.,M.H.**  
**Kasubdit Budaya dan Kemasyarakatan (B3)**  
**Direktorat B**  
**Pada Jaksa Agung Muda Intelijen**  
**Kejaksaan RI**

**- Eksistensi dan  
Pemberdayaan  
Masyarakat Adat  
dalam Negara  
Kesatuan Republik  
Indonesia -**





# 9 NAWA CITA MENUJU INDONESIA HEBAT

Nawacita merupakan sembilan tujuan dan apa yang ingin dicapai pemerintah. Nawacita ini menjadi penting, untuk mengetahui latar belakang lahirnya suatu keputusan.

- 01** Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 02** Membuat pemerintah untuk selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- 03** Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 04** Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat serta terpercaya.
- 05** Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yaitu dengan cara program "Indonesia Pintar" melalui wajib belajar 12 tahun tanpa diminta pungutan biaya.
- 06** Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju serta bangkit bersama dengan bangsa Asia lainnya.
- 07** Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 08** Membangun revolusi karakter bangsa dengan cara membangun pendidikan kewarganegaraan serta penyeragaman sistem pendidikan nasional.
- 09** Memperkuat Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

8. Membangun revolusi karakter bangsa dengan cara membangun Pendidikan kewarganegaraan serta penyeragaman system Pendidikan nasional

9. Memperkuat Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia



## VISI JOKOWI-MA'RUF AMIN UNTUK INDONESIA 2019-2024

Pada malam ini, Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden terpilih pada Pilpres 2019 mengutarakan visi Indonesia untuk pemerintahannya periode kedua. Banyak pernyataan-pernyataan tajam yang diungkapkan Jokowi dalam pidatonya.

### 1 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Ke depan, kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus, sambungkan dengan kawasan pariwisata.

### 2 PEMBANGUNAN SDM

Kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah.

### 3 MENGUNDANG INVESTASI

Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan.

### 4 MEREFORMASI BIROKRASI

Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural! Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah! Hati-hati! Kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas!

### 5 MENJAMIN PENGGUNAAN APBN YANG FOKUS DAN TEPAT SASARAN

Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.





# Dasar Pelaksanaan

◆ Peraturan Jaksa Agung Nomor PER/006/A/JA/07/2011 Jo Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER/006/A/JA/07/2017 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia :

- a. Pasal 183 ayat (1) Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, selanjutnya disebut Direktorat B, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan.
- b. Pasal 184 Subdirektorat B.3 mempunyai tugas yang berkaitan dengan **SEKTOR KETAHANAN BUDAYA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT dan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT.**
- c. Pasal 194 fungsi dukungan Intelijen dalam upaya antisipasi AGHT melalui Kerjasama, Koordinasi, Pembinaan dalam sektor Ketahanan Budaya



**Pidato Mr.  
Mohammad Yamin  
dalam sidang  
BPUPK, 29 Mei  
1945**



Kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum, seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula Borneo, di Tanah Bugis, Ambon, di Minahasa dan lain sebagainya. Susunan itu begitu kuat sehingga tidak bisa diruntuhkan oleh pengaruh Hindu, pengaruh Feodalisme dan pengaruh Eropa.



# Pengakuan Konstitusi

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang.” UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” UUD 1945 Pasal 28I ayat (3)

Masyarakat adat dan bentuk pemerintahannya baik Kerajaan, Kesultanan dll merupakan cikal bakal atau embrio NKRI





# Pemberdayaan Masyarakat Adat



- ◆ Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
- ◆ Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Adat
- ◆ Sumber : RUU Masyarakat Adat



- **Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK)**

Surat Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK nomor 2314/UND/DEPV/BDY.02.00/06/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Rapat Koordinasi Pemutakhiran Matriks Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK)

**GERAKAN** *Revolusi*  
**NASIONAL** *Mental*

#AYOBERUBAH **Integritas•etos kerja•gotong royong**

- ◇ Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) merupakan acuan utama Prioritas Nasional Kebudayaan dalam penyusunan rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang Kebudayaan. Dokumen RIPK ditargetkan selesai pada tahun 2019 agar dapat diintegrasikan ke dalam RPJPN 2020- 2045 serta RPJMN 2020-2024.
- ◇ Berdasarkan penelusuran terhadap Peraturan/Keputusan Menteri/Kepala Badan tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Kementerian/Lembaga dan BUMN yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang kebudayaan, maka terdapat 60 Kementerian/Lembaga dan BUMN yang mempunyai agenda pemajuan kebudayaan, terintegrasi dengan pembagian peran dan tugas yang jelas. Sampai saat ini ada 50 K/L yang sudah memberikan masukan dalam matriks RIPK.



# Kinerja Direktorat B

Vandalisme Keraton  
Jogjakarta(090322)

Perusakan Benteng Baluwarti Keraton  
Kartasura Sukoharjo (110522)





# JAMINTEL DAN MAKN

1. PENYELAMATAN, PENDATAAN DAN PENERTIBAN SERTA PENDAYAGUNAAN ASET-ASET BAIK BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI DALAM RANGKA Mendukung ketahanan budaya, ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi;
2. PENATAAN DAN PENDATAAN ASET-ASET KEUANGAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI AGAR BERMANFAAT BAGI NEGARA;
3. PENDATAAN, PENERTIBAN DAN PENYELAMATAN ASET-ASET BANGUNAN BUDAYA BERUPA BANGUNAN CAGAR BUDAYA YANG BANYAK DIKUASAI, DITEMPATI BAIK OLEH INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN SWASTA DAN MASYARAKAT. HAL INI TELAH DIBICARAKAN DENGAN PRESIDEN, PANGLIMA DAN PARA PIHAK;
4. MENGARAHKAN DAN MEMBERDAYAKAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA AGAR BISA MEMILIKI FUNGSI EKONOMI BAGI NEGARA DAN MASYARAKAT;
5. UPAYA PENGEMBALIAN ASET-ASET BUDAYA YANG ADA DI LUAR NEGERI (BELANDA) BERUPA ASET-ASET BARANG PUSAKA DLL SEBAGAI UPAYA MENGEMBALIKAN KHASANAH BUDAYA BANGSA.

**Senin, 06 Juli 2022**





Kejaksaan Tinggi yang telah menjawab Troop Info Nomor : R.TI-07/D/Dsb/06/2022 tanggal 08 Juni 2022  
Terkait Data Warisan Cagar Budaya  
Per Agustus 2022

| No. | Nama Kejaksaan Tinggi                 | Jumlah Warisan Cagar Budaya  |
|-----|---------------------------------------|--|
| 1.  | Kejaksaan Tinggi Papua                | Kejaksaan Tinggi Papua sejumlah 38 warisan cagar budaya                |
| 2.  | Kejaksaan Tinggi Lampung;             | Kejaksaan Tinggi Lampung sejumlah 1285 warisan cagar budaya            |
| 3.  | Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;    | Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sejumlah 678 warisan cagar budaya    |
| 4.  | Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung;     | Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung sejumlah 339 warisan cagar budaya     |
| 5.  | Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta;      | Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta sejumlah 773 warisan cagar budaya      |
| 6.  | Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;      | Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sejumlah 1296 warisan cagar budaya     |
| 7.  | Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;         | Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sejumlah 1049 warisan cagar budaya        |
| 8.  | Kejaksaan Tinggi Banten;              | Kejaksaan Tinggi Banten sejumlah 615 warisan cagar budaya              |
| 9.  | Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;    | Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sejumlah 424 warisan cagar budaya    |
| 10. | Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;  | Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sejumlah 115 warisan cagar budaya  |
| 11. | Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;          | Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejumlah 458 warisan cagar budaya          |
| 12. | Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;          | Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sejumlah 790 warisan cagar budaya          |
| 13. | Kejaksaan Tinggi Riau;                | Kejaksaan Tinggi Riau sejumlah 94 warisan cagar budaya                 |
| 14. | Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat; | Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejumlah 729 warisan cagar budaya |
| 15. | Kejaksaan Tinggi Jambi;               | Kejaksaan Tinggi Jambi sejumlah 927 warisan cagar budaya               |
| 16. | Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;      | Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sejumlah 413 warisan cagar budaya      |
| 17. | Kejaksaan Tinggi Aceh.                | Kejaksaan Tinggi Aceh sejumlah 2823 warisan cagar budaya               |
| 18. | Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan     | Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sejumlah 562 warisan cagar budaya    |
| 19. | Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta          | Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejumlah 274 warisan Cagar Budaya         |
| 20. | Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan     | Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sejumlah 645 warisan cagar budaya    |
| 21. | Kejaksaan Tinggi Gorontalo            | Kejaksaan Tinggi Gorontalo sejumlah 135 warisan cagar budaya           |
| 22. | Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat       | Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat sejumlah 302 warisan cagar budaya      |



AGHT BUDAYA

=

AGHT IDENTITAS  
BANGSA



# Terimakasih





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3730/DK.06.00/09/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 September 2022

Kepada,  
**YM. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**  
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)** pada tanggal 19 s.d. 22 September 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 20 September 2022  
Waktu : 08.30 s.d. 10.30 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
atau secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*  
Materi : Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**M. Guntur Hamzah**

Tembusan:  
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;  
YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1270501272220913035430



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3739/DK.06.00/09/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 September 2022

Kepada Yth.

**Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)** pada tanggal 19 s.d. 22 September 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 20 September 2022  
Waktu : 11.00 s.d. 13.00 WIB  
Tempat : Pusdik MK, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
atau secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*  
Materi : Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di MK

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;

YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-752723366220915102506



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3711/DK.06.00/09/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

13 September 2022

Kepada Yth.

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)** pada tanggal 19 s.d. 22 September 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 21 September 2022  
Waktu : 14.00 s.d. 16.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
atau secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*  
Materi : Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara  
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**



Digital Signature  
mk1958866124220913034600



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3733/DK.06.00/09/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 September 2022

Kepada Yth.

**Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme**

**Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)** pada tanggal 19 s.d. 22 September 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 21 September 2022  
Waktu : 08.30 s.d. 10.30 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
atau secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*  
Materi : Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai  
Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;

YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-1762192553220913035038



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3734/DK.06.00/09/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 September 2022

Kepada Yth.

**Jaksa Agung Muda Intelijen**

**Dr. Amir Yanto, S.H., M.H.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)** pada tanggal 19 s.d. 22 September 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 21 September 2022  
Waktu : 11.00 s.d. 13.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
atau secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*  
Materi : Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka *Restorative Justice*

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;

YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-1773192209220913034921



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**NOTA DINAS**

**Nomor 2884/2600/DK.06.00/09/2022**

---

Kepada Yth. : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol  
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Hal : Permohonan Dukungan Tim Desain dan Publikasi pada Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bag Majelis  
Adat Kerajaan Nusantara  
Tanggal : 15 September 2022

---

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara pada tanggal 19 s.d. 22 September 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang akan dilaksanakan secara luring, bersama ini kami sampaikan permohonan dukungan tenaga dari Tim Desain dan Publikasi untuk menyukseskan penyelenggaraan kegiatan dimaksud, yang terdiri dari tenaga Desain Grafis, Kameramen, dan Reporter.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



*Digital Signature*  
mk-893142792220913124010



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 3707/DK.06.00/09/2022 13 September 2022  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)

Kepada Yth.

**Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Adat Kerajaan Nusantara  
KPH. DR. Eddy S Wirabhumi, S.H., M.M.**  
di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 3682/DK.00/09/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Undangan Rapat Pembahasan Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan MAKN pada tanggal 12 September 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)** akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 September 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **125 (seratus dua puluh lima)** orang pengurus dan/atau anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) sebagai peserta kegiatan. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 16 September 2022**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-491855518220913120154

Lampiran I

Nomor : 3707/DK.06.00/09/2022

Tanggal : 13 September 2022

**KETENTUAN KEPESERTAAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang yang merupakan pengurus dan/atau anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan.
- b. Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) memberikan daftar nama peserta sebanyak **125 (seratus dua puluh) orang** paling lambat pada tanggal 16 September 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

**2. Tempat Kegiatan**

- a. Kegiatan akan dilaksanakan di Pusdik MK, Jalan Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
- b. Tempat istirahat akan disiapkan hotel di sekitar Pusdik MK.
- c. Transportasi dari hotel ke Pusdik MK akan disiapkan.

**3. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Pusdik MK.
- b. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**4. Akomodasi**

- a. Peserta wajib tinggal di hotel yang telah disediakan oleh Mahkamah Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta melakukan registrasi dan/atau *check in* pada tanggal 19 September 2022 mulai pukul 12.00 WIB di Pusdik MK.
- c. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- d. Peserta mendapatkan akomodasi dan konsumsi di tempat yang telah ditentukan oleh panitia, di luar daripada itu, segala pengeluaran selama di hotel (*mini bar* di kamar, *laundry* dan layanan *room service* lainnya) menjadi tanggungan masing-masing peserta.



- e. Masing-masing peserta wajib melakukan *check out* di hotel pada tanggal 22 September 2022 paling lambat pukul 12.00 WIB. Biaya yang timbul akibat keterlambatan akan menjadi tanggungan masing-masing peserta.

## 5. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi di hotel yang telah disediakan.
- b. Peserta mendapatkan makan siang dan makan malam, serta *snack* di Pusdik MK.
- c. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan sebelum *check out*.

## 6. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya akan dilakukan setelah peserta berada di hotel tempat kegiatan berlangsung.
- b. Panitia akan mengganti biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke hotel tempat kegiatan berlangsung (PP), dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1) Penggantian Biaya Transportasi Udara (Pesawat)

- a) Menyerahkan dokumen-dokumen berikut pada saat registrasi:
  - Surat Tugas dari MAKNI;
  - *Boarding pass* berangkat (asli/bukan *fotocopy*);
  - Tiket kedatangan dan kepulangan; dan
  - Bukti biaya transport dari tempat kedudukan ke bandara (PP).
- b) Tiket pesawat yang diganti adalah **tiket pesawat ekonomi** yang berangkat dari tempat kedudukan dan pulang kembali ke tempat kedudukan. Panitia tidak akan mengganti biaya transportasi yang tiketnya bukan berasal dari dan/atau kembali ke tempat kedudukan peserta.
- c) Harga tiket yang diganti adalah harga tiket riil sesuai yang tertera di tiket dan hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan. Apabila terdapat perbedaan antara harga yang tercantum dalam tiket dengan hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan, panitia akan mengganti biaya tiket sesuai harga hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan.
- d) Peserta disarankan berangkat dari bandara terdekat tempat kedudukan.
- e) Tanggal tiket kedatangan paling lama 1 (satu) hari sebelum registrasi kegiatan dan tanggal tiket kepulangan paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu *check out*. Panitia tidak akan mengganti harga tiket di luar ketentuan tersebut.
- f) Nama di tiket harus sesuai dengan nama peserta.
- g) Biaya perubahan jadwal (*reschedulling*) kedatangan dan kepulangan menjadi tanggung jawab peserta.

### 2) Penggantian Biaya Transportasi Darat/Laut

- a) Biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan (PP) dan dari Bandara Soekarno Hatta atau Halim Perdanakusuma ke hotel tempat kegiatan berlangsung (PP) diganti sesuai dengan bukti riil.



- b) Peserta yang menggunakan kendaraan darat (termasuk kendaraan pribadi), akan mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan bukti riil (kwitansi, struk BBM, dan struk tol).
  - c) Peserta yang menggunakan jasa transportasi **kereta api atau transportasi laut**, harus menyerahkan tiket dan bukti biaya transport dari tempat kedudukan ke stasiun atau pelabuhan kepada panitia, disertai dengan *boarding pass*.
  - d) Transportasi kedatangan dari bandara/stasiun tujuan menuju Pusdik MK menggunakan kendaraan taksi bandara/online dengan melampirkan bukti riil. Sedangkan transportasi dari Pusdik MK menuju bandara/stasiun tujuan menggunakan kendaraan yang akan disediakan oleh Pusdik MK.
- c. Penggantian biaya transportasi kedatangan akan dilaksanakan setelah penutupan kegiatan, sesuai dengan bukti yang telah diserahkan, sedangkan untuk transport darat kepulangan akan dibayarkan setelah peserta mengirimkan bukti riil yang diterima oleh panitia paling lambat hari Minggu, 25 September 2022.

## 7. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan sudah melakukan vaksin covid-19 minimal 2 kali.
- c. Peserta diwajibkan mengunduh dan meng-*install* aplikasi Peduli Lindungi pada *handphone* masing-masing untuk *check in* dan *check out* di lingkungan hotel.
- d. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

## 8. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 3707/DK.06.00/09/2022

Tanggal : 13 September 2022

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA**

---

**Hari, Tanggal** : **Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 September 2022**

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Peserta** : Pengurus dan/atau Anggota MAKN

| HARI/<br>TANGGAL                    | WAKTU             | MATERI  | NARASUMBER/PETUGAS  | LOKASI           |
|-------------------------------------|-------------------|---|---|------------------|
| <b>PERTAMA</b>                      |                   |   |   |                  |
| <b>Senin,<br/>19 September 2022</b> | 12.00 – 15.00 WIB | Registrasi Peserta  | Panitia   | Ruang Registrasi |
|                                     | 15.00 – 17.00 WIB | Penjelasan Teknis dan <i>Pre-Test</i>   | Panitia   | GK 3             |
|                                     | 17.00 – 18.30 WIB | ISHOMA  |   |                  |
|                                     | 18.30 – 20.30 WIB | <b>Pembukaan :</b><br>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya<br>2. Pembacaan Teks Pancasila<br>3. Mars Mahkamah Konstitusi | <b>– YM Ketua MK</b><br><b>– Ketua Umum MAKN</b><br><b>– Sekretaris Jenderal MK</b> | Aula GK 3        |



|                                      |                   |   |   |           |
|--------------------------------------|-------------------|---|---|-----------|
|                                      |                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li> <li>5. Pentas Tari MAKN</li> <li>6. Sambutan Ketua Umum MAKN</li> <li>7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>8. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>9. Pembacaan Doa</li> </ol> |   |           |
|                                      | 20.30 WIB         | <b>Istrahat</b>   |   |           |
| <b>KEDUA</b>                         |                   |   |   |           |
| <b>Selasa,<br/>20 September 2022</b> | 08.30 – 10.30 WIB | <b>Sesi I:<br/>Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>   | <b>Narasumber:</b><br>Mahkamah Konstitusi | Aula GK 3 |
|                                      | 10.30 – 11.00 WIB | <i>Coffee Break</i>   |   |           |
|                                      | 11.00 – 13.00 WIB | <b>Sesi II:<br/>Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di MK</b>  | <b>Narasumber:</b><br>Mahkamah Konstitusi | Aula GK 3 |
|                                      | 13.00 – 14.00 WIB | ISHOMA  |   |           |
|                                      | 14.00 – 16.00 WIB | <b>Sesi III:<br/>Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara</b>   | <b>Narasumber:</b><br>Mahkamah Konstitusi | Aula GK 3 |
|                                      | 16.00 WIB         | Istrahat  |   |           |



| KETIGA                      |                   |  |   |           |
|-----------------------------|-------------------|--|---|-----------|
| Rabu,<br>21 September 2022  | 08.30 – 10.30 WIB | <b>Sesi IV:</b><br><b>Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai Konstitusi</b>   | <b>Narasumber:</b><br>Mahkamah Konstitusi   | Aula GK 3 |
|                             | 10.30 – 11.00 WIB | <i>Coffee Break</i>  |   |           |
|                             | 11.00 – 13.00 WIB | <b>Sesi V:</b><br><b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Kerangka <i>Restorative Justice</i></b>   | <b>Narasumber:</b><br>Mahkamah Konstitusi   | Aula GK 3 |
|                             | 13.00 – 14.00 WIB | ISHOMA   |   |           |
|                             | 14.00 – 16.00 WIB | <b>Sesi VI:</b><br><b>Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</b>  | <b>Narasumber:</b><br>Mahkamah Konstitusi   | Aula GK 3 |
|                             | 16.00 WIB         | Istrahat   |   |           |
| KEEMPAT                     |                   |  |   |           |
| Kamis,<br>22 September 2022 | 08.00 – 08.30 WIB | <i>Post-Test</i>   |   | Aula GK 3 |
|                             | 08.30 – 10.30 WIB | <b>Penutupan:</b><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Peserta</li> <li>4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li> <li>5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– YM Wakil Ketua MK</li> <li>– Sekretaris Jenderal MK</li> </ul> | Aula GK 3 |



|  |                   |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|
|  |                   | 6. Hymne Mahkamah Konstitusi<br>7. Pembacaan Doa |  |  |
|  | 10.30 – 11.30 WIB | Selesai  |  |  |



Lampiran III

Nomor : 3707/DK.06.00/09/2022

Tanggal : 13 September 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA**

---

| No  | Nama + Gelar | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Nama Kerajaan | Jabatan | Alamat | Nomor Handphone | Email |
|-----|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|-----------------|-------|
| 1   |              |              |               |               |               |         |        |                 |       |
| 2   |              |              |               |               |               |         |        |                 |       |
| 3   |              |              |               |               |               |         |        |                 |       |
| 4   |              |              |               |               |               |         |        |                 |       |
| 5   |              |              |               |               |               |         |        |                 |       |
| ... |              |              |               |               |               |         |        |                 |       |
| ... |              |              |               |               |               |         |        |                 |       |
| ... |              |              |               |               |               |         |        |                 |       |
| 120 |              |              |               |               |               |         |        |                 |       |





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 3741/DK.06.00/09/2022

15 September 2022

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah Kunci  
dan Membuka Acara**

Kepada,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**

di Jakarta

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)** pada tanggal 19 s.d. 22 September 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci sekaligus membuka secara resmi kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 19 September 2022

Waktu : 18.30 – 20.30 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

**M. Guntur Hamzah**

Tembusan:

YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-302951875220915101329



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3742/DK.06.00/09/2022

15 September 2022

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah Kunci  
dan Menutup Acara**

Kepada,

**Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.**

di Jakarta

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)** pada tanggal 19 s.d. 22 September 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci sekaligus menutup secara resmi kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 22 September 2022

Waktu : 08.30 – 10.30 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

**M. Guntur Hamzah**

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk419740411220915101507



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3738/DK.06.00/09/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

15 September 2022

Kepada Yth.

**Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Adat Kerajaan Nusantara  
KPH. DR. Eddy S Wirabhumi, S.H., M.M.**  
di Jakarta

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)** pada tanggal 19 s.d. 22 September 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 19 September 2022

Waktu : 18.30 – 20.30 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan Sdr. Suhardi, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-423003707220915102013



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## SURAT TUGAS

12/2600/09/2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Kerja Sama bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara, perlu adanya narasumber dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf *a*.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Kerja Sama bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara
- Hari/tanggal : Senin s.d. Kamis/ 19 s.d. 22 September 2022
- Waktu : **Jadwal Terlampir**
- Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak km 83, Tugu Selatan, Cisarua, Bogor.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 19 September 2022  
a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**



Digital Signature  
mk91469949220922113703

**Lampiran Surat Tugas**  
**Nomor : 12/2600/09/2022**  
**Tanggal: 19 September 2022**

**Daftar Narasumber**

| No | Nama                                  | Jabatan    | Tanggal           |
|----|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 1  | Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H. | Narasumber | 20 September 2022 |
| 2  | Andi Suharlis, SH., MH.               | Narasumber | 21 September 2022 |
| 3  | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E         | Narasumber | 21 September 2022 |





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA

## PERJANJIAN KERJA SAMA

### KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA

NOMOR : 77/PK/2022

NOMOR : 04/PK/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **September**, tahun **Dua ribu dua puluh dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Margono**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DR. KPH Eddy S Wirabhumi, S.H., M.M.**, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Adat Kerajaan Nusantara, berkedudukan di Kantor Sekretariat MAKN: Gedung YBY Lt.3 Jalan Barito II N0.31 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Majelis Adat Kerajaan Nusantara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 2**

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 19 s.d. 22 September 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
  - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
  - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
  - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan kurang lebih sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang pengurus dan/atau anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara sebagai

peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

- b. Menjamin peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara belum pernah mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **16 September 2022**.

#### **Bagian Kedua**

##### **Hak**

##### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **16 September 2022**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara.

#### **BAB IV**

##### **BIAYA**

##### **Pasal 5**

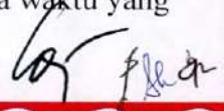
- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

#### **BAB V**

##### **JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.



**BAB VI**  
**BEA MATERAI DAN PAJAK**  
**Pasal 7**

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**PIHAK KESATU,**  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI



**Imam Margono**  
Plt. Kepala Pusat

*Handwritten signature* Pendidikan Pancasila dan Konstitusi *f*

**PIHAK KEDUA,**  
Majelis Adat Kerajaan Nusantara



**DR. KPH Eddy S Wirabhumi, S.H., M.M.**  
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP)



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA

## PERJANJIAN KERJA SAMA

### KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA

NOMOR : 77/PK/2022

NOMOR : 04/PK/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **September**, tahun **Dua ribu dua puluh dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Margono**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DR. KPH Eddy S Wirabhumi, S.H., M.M.**, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Adat Kerajaan Nusantara, berkedudukan di Kantor Sekretariat MAKN: Gedung YBY Lt.3 Jalan Barito II N0.31 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Majelis Adat Kerajaan Nusantara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

*Handwritten signature and date*

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 2**

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 19 s.d. 22 September 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
  - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
  - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
  - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan kurang lebih sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang pengurus dan/atau anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara sebagai

peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

- b. Menjamin peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara belum pernah mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **16 September 2022**.

**Bagian Kedua**  
**Hak**  
**Pasal 4**

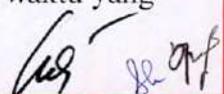
- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **16 September 2022**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara.

**BAB IV**  
**BIAYA**  
**Pasal 5**

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.



**BAB VI**  
**BEA MATERAI DAN PAJAK**  
**Pasal 7**

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**PIHAK KESATU,**  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI



**Imam Margono**  
Plt. Kepala Pusat

9 Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

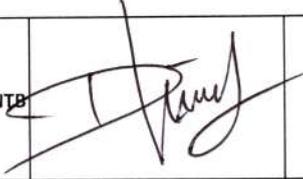
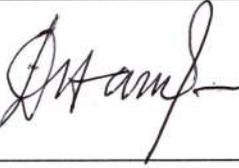
**PIHAK KEDUA,**  
Majelis Adat Kerajaan Nusantara

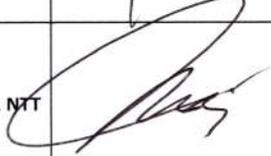


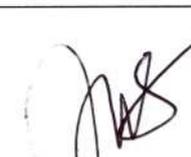
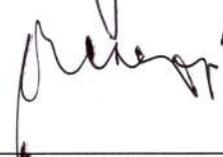
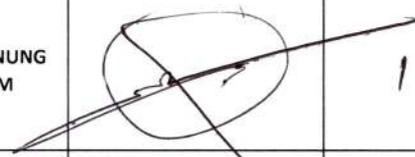
**DR. KPH Eddy S Wirabhumi, S.H., M.M.**  
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Registrasi dan Tanda Terima Seminarkit  
 Senin, 19 September 2022  
 Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan  
 Anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)

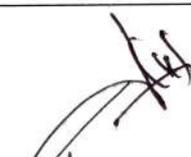
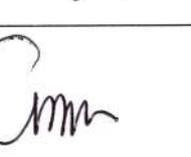
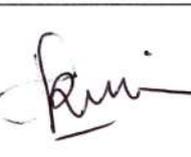
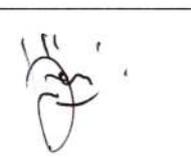
| No | Nama   | Unsur  | Jabatan   | Asal Kerajaan/DK   | Tanda tangan | Kamar  |
|----|--|--|---|--|--------------|--------|
| 1  | PYM SPDB DRS.<br>EDWARDS SYAH<br>PERNONG, SH. M.H.   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 02 - SULTAN SEKALA<br>BRAK YANG DIPERTUAN<br>KE-23 | KERAJAAN ADAT PAKSI<br>PAK SEKALA BRAK,<br>KEPAKSIAN PERNONG,<br>LAMPUNG |              |        |
| 2  | PYM SRI RADYA I<br>LUKMAN<br>SOEMADISOERIA   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 03 - RAJA SUMEDANG<br>LARANG                       | KERATON SUMEDANG<br>LARANG, JABAR  |              | 3206   |
| 3  | YM KPH GUSTI INDRO<br>KUSUMO   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 04 - RAJA PAKU<br>ALAMAN X (AN Mandat)             | PURO PAKU ALAMAN,<br>YOGYAKARTA  |              | 3310   |
| 4  | PYM RADEN PANJI<br>MUCH. MUCHTAR<br>ATMOKUSUMO, M. AK  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 05 - PEMANGKU ADAT<br>KESULTANAN SUMENEP           | KESULTANAN SUMENEP,<br>JATIM   |              | IIII   |
| 5  | PYM LEOPOLD NICHOLAS<br>NISNONI, BBA   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 06 - RAJA KERAJAAN<br>KUPANG                       | KERAJAAN KUPANG, NTT   |              | 3305   |
| 6  | PYM SULTAN H. ADJI<br>BACHRUL HADIE, SH.,<br>MBA   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 07 - SULTAN<br>KESULTANAN GUNUNG<br>TABUR          | KESULTANAN GUNUNG<br>TABUR, KALTIM                                       |              |        |
| 7  | PYM ANDI KEMALA IDJO<br>DAENG SILA, SH.<br>KARAENG LEMBANG<br>PARANG BATARA GOWA<br>III SULTAN MALIKUSSAID<br>II | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 08 - RAJA GOWA<br>XXXVIII                          | KERAJAAN GOWA, SULSEL  |              |        |
| 8  | PYM ACHMAD SYAH  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 09 - SULTAN JAILOLO                                | KESULTANAN JAILOLO,<br>HALMAHERA BARAT                                   |              | 2 2310 |
| 9  | PYM TUANKU MAHMUD<br>ARIA LAMANTJIJI<br>PERKASA ALAM SYAH  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 10 - SULTAN DELI                                   | KESULTANAN DELI, SUMUT   |              |        |
| 10 | PYM TUANKU RAJO<br>GODANG FIRMAN<br>BAGINDO TAN AMEH   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 11 - RAJA ALAM<br>JAMBO LIPO                       | KERAJAAN JAMBO LIPO,<br>SUMBAR   |              | 1 3208 |
| 11 | YM KASHAR HAROEN<br>TENGGU PANGERAN  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 13 - SULTAN<br>PALELAWAN (AN<br>mandat)            | KESULTANAN PALELAWAN,<br>RIAU  |              | 1303   |

|    |   |                                       |  |   |   |           |
|----|---|---------------------------------------|--|---|---|-----------|
| 12 | YM DHIMAS JUNIO NARASHIMARAO, S. Ked  | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 14 - PUTRA RAJA DOMPU (AN mandat)                               | KESULTANAN DOMPU, NTB                         |    | 3200      |
| 13 | PYM ST YODHI PRAYOGO, SE., MEI. SULTAN INDERA RAHIMSYAH DAULAT SULTAN MUHAMMAD SYAH | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 15 - SULTAN INDERAPURA  | KESULTANAN INDERAPURA, SUMBAR                 |    | 1316      |
| 14 | YM GKR TIMOER   | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 17 - RAJA KASUNANAN SURAKARTA SURAKARTA HADININGRAT (AN mandat) | KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT, SOLO, JATENG | Danna   | 2302      |
| 15 | YM DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M. Pd  | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 18 - KETUA LDA KSA  | KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT, SOLO, JATENG | Danna   | 2309      |
| 16 | PYM P. HANDI, SE. MM. RAJA KAPRABON XI  | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 21 - RAJA KAPRABONAN  | KERATON KAPRABONAN CIREBON, JABAR             |    | 2100      |
| 17 | PYM PEMANGKU SULTAN DATU ABDUL HAMID  | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 23 - PEMANGKU SULTAN KESULTANAN BULUNGAN                        | KESULTANAN BULUNGAN, KALTARA                  |   | 3309      |
| 18 | YM INDA PANGGIAN  | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 25 - RAJA KESULTANAN SAMBALIUNG (AN mandat)                     | KESULTANAN SAMBALIUNG, KALTIM                 |   |           |
| 19 | YM SRI RAHAYU KURNIASIH   | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 26 - SULTAN KUTAWARINGIN (AN mandat)                            | KESULTANAN KUTAWARINGIN, KALTENG              |  | 1115      |
| 20 | PYM DECKY TANASALE  | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 28 - RAJA LEINITU   | KERAJAAN LEINITU, MALUKU                      |  | 3317 3317 |
| 21 | PYM ARIEF RUMAGESAN   | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 29 - RAJA SEKAR FAKFAK  | KERAJAAN SEKAR FAKFAK, PAPUA BARAT            |  | 3303      |
| 22 | YM PANGERAN RAJA RUSLAN, SH., M.Kn  | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 30 - SULTAN KACIREBONAN IX (AN mandat)                          | KERATON KACIREBONAN, JABAR                    |   |           |
| 23 | YM POCUT MERIAH ZAKIYAH SAFIATUNNISA  | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 31 - SULTAN ACEH DARUSSALAM (AN mandat)                         | KESULTANAN ACEH DARUSSALAM, ACEH              |  | 3300      |

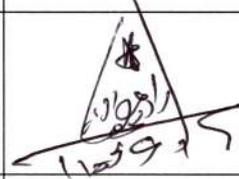
|    |  |  |  |  |   |         |
|----|--|--|--|--|---|---------|
| 24 | YM WIRDA ANATANIA<br>MAHA RATU SURO<br>MAHKOTA AGUNG | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 35 - SULTAN KOTA<br>PONTIANAK IX (AN<br>mandat) | ISTANA KADRIAH<br>KESULTANAN PONTIANAK |    | 3313    |
| 25 | PYM YESAYA ROBERT<br>MAURITS KOROH                   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 36 - RAJA AMARASI                               | KERAJAAN AMARASI, NTT                  |    | Puslita |
| 26 | PYM VICOAS TB AMALO<br>S.                            | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 37 - RAJA NUSAK<br>TERMANU ROTE                 | KERAJAAN NUSAK<br>TERMANU ROTE, NTT    |    | 2312    |
| 27 | PYM DRS. H. KHAERUN<br>DAHLAN, MM.<br>Adriabhasmito  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 40 - RAJA MEKONGGA                              | KERAJAAN MEKONGGA,<br>SULTRA           |    | 2109    |
| 28 | PYM DR. LA ODE<br>MUHAMMAD IZZAT<br>MANA'ARFA, M. Si | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 41 - SULTAN BUTON                               | KESULTANAN BUTON,<br>SULTRA            |    | 1317    |
| 29 | PYM ANDI BASO HAMID<br>PABENTENG RAJABONE<br>XXXV    | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 42 - RAJA BONE XXXV                             | KERAJAAN BONE, SULSEL                  |   | 3101    |
| 30 | YM MEGA LANDON<br>RUNDING                            | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 44 - RATU PUANG<br>BALUSU TORUT (AN<br>mandat)  | KERAJAAN PUANG BALUSU<br>TORUT, SULSEL |   |         |
| 31 | PYM LA ODE<br>SARIFUDDIN, S. Pd                      | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 46 - RAJA WANSE<br>WAKATOBI                     | KERAJAAN WANSE<br>WAKATOBI, SULTRA     |  |         |
| 32 | YM REVLI IBRAHIM<br>ISKANDAR                         | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 51 - SULTAN BACAN<br>(AN mandat)                | KESULTANAN BACAN,<br>HALMAHERA SELATAN |  | 2305    |
| 33 | YM RATNA DEWI<br>MUCLISA                             | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 54 - SULTAN BIMA<br>(AN mandat)                 | KESULTANAN BIMA, NTB                   |  | 1320    |
| 34 | YM ABDUL WAHID                                       | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 55 - RAJA MARADIKA<br>MAMUJU (AN mandat)        | KERAJAAN MARADIKA<br>MAMUJU, SULBAR    |  | 2208    |
| 35 | YM DR. KPH EDDY<br>WIRABHUMI, SH., MM.               | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)               | DPP 01 - KETUA UMUM<br>MAKN                        | KASUNANAN SURAKARTA<br>HADININGRAT     |  | 2309    |

|    |   |   |   |  |   |                          |
|----|---|---|---|--|---|--------------------------|
| 36 | YM DRA. Hj. R.AY YANI<br>WSS KUSWODIDJOJO   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 02- SEKJEN MAKN                       | KESULTANAN SUMENEP   |    | 1310                     |
| 37 | YM SEEM R. CANGGU,<br>SE., MM. RAJA DUAT<br>PERBANGSA KERAJAAN<br>ADAT PAKSI PAK SEKALA<br>BRAK, KEPAKSIAN<br>PERNONG | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 03 - KETUA 1 MAKN                     | KERAJAAN ADAT PAKSI<br>PAK SEKALA BRAK,<br>KEPAKSIAN PERNONG,<br>LAMPUNG |    | 3103                     |
| 38 | YM TB AMRI WARDHANA<br>SH., MH.   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 05 - KETUA 3 MAKN                     | KESULTANAN<br>SUROSOWAN, BANTEN  |    | <del>20200</del><br>2200 |
| 39 | YM Ir. H. LALU GAFAR<br>ISMAIL KERTANEGARA,<br>MM.  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 07 - KETUA 5 MAKN                     | KEDATUAN SELAPARANG<br>LOMBOK, NTB                                       |    |                          |
| 40 | YM MOKOLE ANDI<br>MUSLIMIN MS SANGIA<br>PUSU, ST., M.PW., IAI   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 08 - KETUA 6 MAKN                     | KERAJAAN POLEANG<br>MORONENE, SULTRA                                     |   |                          |
| 41 | YM ADJI RADEN<br>MOHAMMAD BAKHRUN   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 09 - KETUA 7 MAKN                     | KESULTANAN GUNUNG<br>TABUR, KALTIM                                       |    | 1                        |
| 42 | YM KHAERUDIN JOJUGU   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 10 - KETUA 8 MAKN                     | KESULTANAN JAILOLO,<br>HALMAHERA BARAT                                   |  | 2320                     |
| 43 | YM RADEN PANJI AGOES<br>IRIANTO, SH   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 11 - WAKIL SEKJEN<br>MAKN             | KESULTANAN SUMENEP,<br>JATIM   |  | 1311                     |
| 44 | YM DIAH PURO<br>PAKUALAMAN  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)<br>(AN Mandat) | DPP 12 - WAKIL SEKJEN<br>MAKN (AN mandat) | PURO PAKUALAMAN,<br>YOGYAKARTA   |   | 3310                     |
| 45 | YM TITIE PRAPTI OETAMI<br>JUANITA   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 13 - BENDAHARA<br>UMUM MAKN           | KESULTANAN<br>SUMENEP/KEPAKSIAN<br>PERNONG SEKALA BRAK,<br>LAMPUNG       |   | 3317                     |
| 46 | YM RATU RAJA ARIMBI<br>NURTINA, S.T.  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 14 - WAKIL<br>BENDAHARA UMUM<br>MAKN  | KESULTANAN KANOMAN<br>CIREBON  |   |                          |
| 47 | YM TONNY SARITUA<br>PURBA, SP.  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 15 - WAKIL<br>BENDAHARA UMUM<br>MAKN  | KERAJAAN PURBA<br>SIMALUNGUN   |  | 1                        |

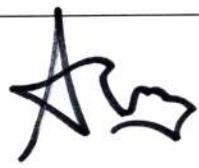
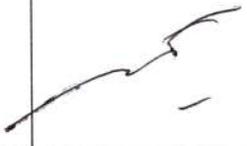
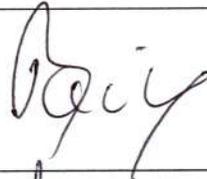
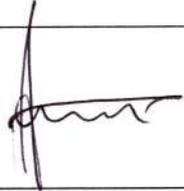
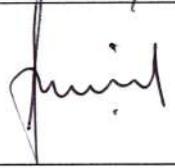
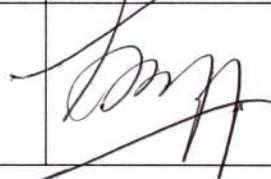
2208

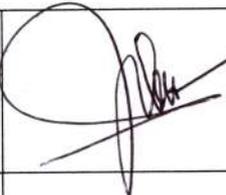
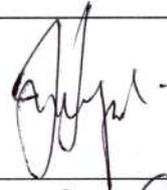
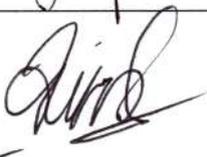
|    |  |  |  |   |   |      |
|----|--|--|--|---|---|------|
| 48 | YM BONTONA WANCE H LA ANE PURU, S. Sos   | DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)             | DPP 16 - WAKIL BENDAHARA UMUM MAKN                                   | KERAJAAN WANSE WAKATOBI, SULTRA   |    | 2317 |
| 49 | YM Hj. RR. MIRA ENDAH YULIANI, SE., MM.  | DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)             | DPP 17 - ORGANISASI, PROTOKOL, HUMAS MAKN                            | KESULTANAN DOMPU, NTB   |    | 3200 |
| 50 | YM KRT KUSNO UTOMO DININGRAT             | DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) (AN Mandat) | DPP 18 - ORGANISASI, PROTOKOL, HUMAS MAKN (AN mandat)                | KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT SOLO, JATENG                            |    |      |
| 51 | YM MARGARETHA BAMBA MANGIRI, SH., MP. AK | DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)             | DPP 20 - ADVOKASI HUKUM MAKN   | KERAJAAN KAPUANG TORAJA   |    | 3315 |
| 52 | YM DONNA CONNIE NISNONI                  | DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)             | DPP 21 - MEDIA DAN INFORMASI MAKN                                    | KERAJAAN KUPANG, NTT  |    | 1109 |
| 53 | YM DRS PRAMUDIYANTO                      | DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) (AN Mandat) | DPP AN mandat  |   |   |      |
| 54 | YM NURZEPTI PALELAWAN                    | DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) (AN Mandat) | DPP 24 - CAGAR BUDAYA, PERMUSEUMAN, DAN SEJARAH (AN mandat)          | PURI KARANG ASEM, BALI  |  | 1303 |
| 55 | YM ANDI HIMAWATI KEMALA IDJO, S. Sos     | DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)             | DPP 25 - KEMARITIMAN, PARIWISATA, SENI BUDAYA, DAN ADAT TRADISI MAKN | KERAJAAN GOWA, SULSEL   |   |      |
| 56 | YM PANGERAN HASMINTO DACHLAN, SH., M. Si | DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)             | DPP 27 - PENDIDIKAN, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN HIDUP                    | KERAJAAN MEKONGGA, SULTRA   |  | 2109 |
| 57 | YM NIKEN                                 | DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) (AN Mandat) | DPP 29 - PENDIDIKAN, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN HIDUP (AN mandat)        | JAILOLO<br>KESULTANAN <del>TERNATE</del> ,<br>MALUT<br>TALAMAHERA UTARA |  | 2310 |
| 58 | YM PANGERAN CEVI YUSUF ISNENDAR          | DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)             | DPP 30 - BISNIS, INVESTASI, HUBUNGAN LUAR NEGERI                     | KESULTANAN BANJAR, SULSES   |  | 2202 |
| 59 | YM RADEN TYASTONO AMBORO                 | DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) (AN Mandat) | DPP AN mandat  |   |   |      |

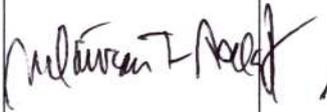
?

|    |   |                                  |   |                                    |   |                      |
|----|---|----------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------|
| 60 | YM PAHALA SAGALA,<br>SH., MH.   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP 33 - ADVOKASI<br>HUKUM                    |                                    |    | 1301                 |
| 61 | YM POCUT MERUAH<br>NENENG, SH., MH.   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP 34 - ORGANISASI,<br>KODE ETIK, KEROHANIAN | KERAJAAN ACEH<br>DARUSSALAM, ACEH  |    | 3300                 |
| 62 | YM KEMAS IWAN<br>SAPUTRA, S. Kom, SH.,<br>MH.   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP 36 - ADVOKASI<br>HUKUM                    |                                    |    |                      |
| 63 | YM KANJENG MASAYU<br>POPPY ALMAYA<br>WERDININGRUM, M. Psi,<br>Psikolog, C.HT., M. NLP | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP 37 - ORGANISASI,<br>PROTOKOL, HUMAS       | KASUNANAN SURAKARTA<br>HADININGRAT |    |                      |
| 64 | YM RADEN ARIA<br>SUDIYANTO<br>SATJAH DININGRAT, M.<br>Pd                              | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP - KEPALA<br>SEKRETARIAT MAKN<br>(KSM)     | KESULTANAN SUMENEP                 |    | 2307                 |
| 65 | YM BRIGJEN TNI MUNIF<br>PRASOJO, S. IP., M.Han  | DEWAN PAKAR<br>(DP)              | ANGGOTA DEWAN<br>PAKAR MAKN                   |                                    |   | 1310                 |
| 66 | YM PANGERAN MAS<br>BAYI RADEN SURYA<br>AGUS ALI IMRON                                 | DEWAN PAKAR<br>(DP)              | ANGGOTA DEWAN<br>PAKAR MAKN                   |                                    |  |                      |
| 67 | YM DESY MELINDA<br>URSANTI  | DEWAN PAKAR<br>(DP)              | ANGGOTA DEWAN<br>PAKAR MAKN                   |                                    |   |                      |
| 68 | YM DR. KMS HERMAN,<br>SH., M.H.   | BAKUM                            | KETUA BAKUM MAKN                              |                                    |  | <del>1301</del> 1301 |
| 69 | YM MUHAMMAD<br>KARTIKA YUDHA  | BAKUM                            | ANGGOTA BAKUM MAKN                            |                                    |  | 2308                 |
| 70 | YM RM. PURWADI<br>A. Saputra, SH, M.H   | BAKUM                            | ANGGOTA BAKUM MAKN                            |                                    |  | 1 3109               |
| 71 | YM IWAN SAPUTRA<br>IMRON  | BAKUM                            | ANGGOTA BAKUM MAKN                            |                                    |   |                      |

|    |   |             |                    |                                   |                    |        |
|----|---|-------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|
| 72 | YM KEMAS <del>ANTONY</del><br><i>Ridwan Anthony Tanjung</i> | BAKUM       | ANGGOTA BAKUM MAKN |                                   | <i>bakum</i>       |        |
| 73 | YM Dr. R.H. BAMBANG SRIWIJATNO, SH., MM., MH                | BAKUM       | ANGGOTA BAKUM MAKN |                                   | <i>[Signature]</i> | 3109   |
| 74 | YM DATUK ADIL FREDY HABERHAM                                | DPW SUMUT   | DPW SUMUT          | KERAJAAN DELI MAIMUN              |                    |        |
| 75 | YM PANGERAN SERDANG BADAGAI                                 | DPW SUMUT   | DPW SUMUT          | KERAJAAN SENDANG BADAGAI          | <i>[Signature]</i> | 1 3111 |
| 76 | YM SULISTIO Dt RAJO INDO, SH.                               | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         | KERAJAAN JAMBU LIPO               |                    |        |
| 77 | YM YULIARDI PANGLIMO RAJO                                   | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         |                                   | <i>[Signature]</i> | 1318   |
| 78 | YM GUSMANADI, S. Pd., MH Dt RAJO KAYO                       | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         |                                   | <i>[Signature]</i> | 1318   |
| 79 | YM MARHASNIDA TUAN PUTRI ANCIK, S.Pd SIGUNTUR               | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         | KERAJAAN SIGUNTUR                 | <i>[Signature]</i> | 3308   |
| 80 | <del>BERBUDI</del><br>YM BOWO LEKSONO, SE., SH., MH.        | DPW LAMPUNG | DPW LAMPUNG        | KERAJAAN ADAT SEKALA BRAK PERNONG | <i>[Signature]</i> | 1305   |
| 81 | YM <del>RUDI PURNAWAN</del><br>✓ <i>FRIZAL</i>              | DPW LAMPUNG | DPW LAMPUNG        |                                   | <i>[Signature]</i> | 1305   |
| 82 | <del>MM</del><br>YM GUSTI MUHAMAD HADIANSYAH, ST., MT.      | DPW KALTENG | DPW KALTENG        |                                   | <i>[Signature]</i> | 2202   |
| 83 | YM ESAMARTH AGUNG MAULANA                                   | DPW KALTENG | DPW KALTENG        |                                   | <i>[Signature]</i> | 1115   |

|    |   |            |   |  |   |      |
|----|---|------------|---|--|---|------|
| 84 | YM MUH. ARIF SONDA<br>KARAENG KULLE                     | DPW SULSEL | DEWAN KERAJAAN  |  |    | 2107 |
| 85 | YM ANDI MARDIANA WE<br>PADAULENG                        | DPW SULSEL | C. DEWAN KERAJAAN   |  |    | 3301 |
| 86 | YM H. ANDI<br>PARENRENGI, SH.                           | DPW SULSEL | WAKIL KETUA BID.<br>HUKUM                                 |  |    | 2119 |
| 87 | YM ANDI BASO ILYAS<br>OPU MALANRE, ST.                  | DPW SULSEL | WAKIL KETUA BID.<br>PEMBERDAYAAN USAHA<br>EKONOMI KREATIF |  |    |      |
| 88 | YM ANDI PATARAI A.<br>MANGINRURU ANDI IDJO              | DPW SULSEL | WAKIL SEKRETARIS  |    |    | 2119 |
| 89 | YM ANDI ILHAM<br>LATUNRA, M. Si                         | DPW SULSEL | WAKIL SEKRETARIS  |  |   |      |
| 90 | YM ANDI BESSE KARINA<br>HAMID, ST.                      | DPW SULSEL | BENDAHARA   |  |   | 3101 |
| 91 | YM PROF. Dr. H. ANDI<br>AHMAD RUSLAN, SH.,<br>MH.       | DPW SULSEL | ADVOKASI HUKUM  |  |  | 1312 |
| 92 | YM ANDI RADIANTO, SH.,<br>MH.                           | DPW SULSEL | ADVOKASI HUKUM  |  |   |      |
| 93 | YM PROF. Dr. ANDI<br>IBRAHIM, S. Ag., SS., M.<br>Pd     | DPW SULSEL | DEWAN PAKAR   | LIMBUANG<br>MAIWA<br>ENREKANG<br>SUL-SEL   |  | 1312 |
| 94 | YM FENTJE DANIEL<br>MANOPPO, S.Sos                      | DPW SULUT  | DPW SULUT   | KERAJAAN BOLAANG<br>MONGONDOW  |  | 1119 |
| 95 | <sup>Dr</sup> YM Dra. Hj. MUKU<br>MANOPPO, S.KM., S.Kes | DPW SULUT  | DPW SULUT   |  |  | 3107 |

|     |  |               |                            |                             |   |      |      |
|-----|--|---------------|----------------------------|-----------------------------|---|------|------|
| 96  | YM LAODE MUSAFI KULISUSU   | DK DPW SULTRA | RAJA KULISUSU              | KERAJAAN KULISUSU           |    | 2    | 3220 |
| 97  | YM DR. Hj. SURIANA GENDE MORONENE  | DPW SULTRA    | PENGURUS HARIAN DPW SULTRA | KERAJAAN MORONENE           |    |      | 1315 |
| 98  | YM H. AKSAN SASARI   | DPW SULTRA    | PENGURUS HARIAN DPW SULTRA |                             |   |      |      |
| 99  | YM LA ODE ARSAL  | DPW SULTRA    | DPW SULTRA                 | KAPAITALAO KESULTANAN BUTON |   |      |      |
| 100 | YM LAODE JABARU BUTON  | DPW SULTRA    | DPW SULTRA                 | KESULTANAN BUTON            |   | 2311 |      |
| 101 | <i>Dr. Rusliyanto</i><br>Y.M. RIFLY M. KATILIA S.,<br>S. Sos., M. Ec. Dev. | DPW GORONTALO | DPW GORONTALO              |                             |   | 1308 |      |
| 102 | YM ROSWATI LASIMPALA., SH., MH.  | DPW GORONTALO | DPW GORONTALO              |                             |  | 3107 |      |
| 103 | YM KAICIL ZULKIFLI., SE  | DPW GORONTALO | DPW GORONTALO              |                             |  | 1308 |      |
| 104 | YM RB. AGUNG SATRIO PRABOWO AGSRIE, SH.                                    | DPW JATIM     | DPW JATIM                  | KESULTANAN SUMENEP          |  | 1311 |      |
| 105 | YM RP. RANGGA Y. MUCHEYZ PUTERA  | DPW JATIM     | DPW JATIM                  | KESULTANAN SUMENEP          |  | 1111 |      |
| 106 | YM JAN BENYAMIN  | DPW NTT       | KETUA DPW NTT              | KERAJAAN BABAU              |  |      |      |
| 107 | <i>y.a.a</i><br>YM DONNA <del>WANDA</del> NISONI                           | DPW NTT       | PENGURUS DPW NTT           | KERAJAAN KUPANG             |  | 2306 |      |

|     |  |            |                      |                              |   |      |      |
|-----|--|------------|----------------------|------------------------------|---|------|------|
| 108 | YM HIZKIANA<br>YONATHAN AMABI<br>MINTARNINGSIH | DPW NTT    | PENGURUS DPW NTT     |                              |    | 2306 |      |
| 109 | YM H.L. GEDE SYAMSUL<br>MUJAHIDIN              | DPW NTB    | KETUA HARIAN DPW NTB |                              |   |      |      |
| 110 | YM H.L. MAHDARAIN, ST.                         | DPW NTB    | PENGURUS DPW NTB     |                              |    |      |      |
| 111 | YM FREDY BENYAMIN<br>WAAS                      | DPW AMBON  | DK NEGERI HUTUMI     | KERAJAAN NEGERI<br>HUTUMIRY. |    | 1    | 3307 |
| 112 | YM JENSE TERESIA<br>LEIMENA                    | DPW AMBON  | DK NEGERI EMA        | KERAJAAN NEGERI EMA          |    | 1    | 3308 |
| 113 | YM MICHAEL A.H.P. DE<br>QUELJOE                | DPW AMBON  | DK NEGERI KILANG     | KERAJAAN NEGERI KILANG       |   | 1    | 3307 |
| 114 | YM DATJE TAHAPARY                              | DPW AMBON  | DK NEGERI AKOON      | KERAJAAN NEGERI AKOON        |  | 1    | 1202 |
| 115 | YM T. ZULMIZAN F.<br>ASSAGAFF, SE., M.Si       | DPW KEPRI  | DPW KEPRI            |                              |  |      |      |
| 116 | YM. H. TENGGU<br>WAHIDUDIN                     | DPW KEPRI  | DPW KEPRI            |                              |  |      |      |
| 117 | YM EDY HANAFAI                                 | DPW KEPRI  | DPW KEPRI            |                              |  | 1202 |      |
| 118 | YM TUBAGUS ASHABUL<br>ZAM ZAM                  | DPW BANTEN | DPW BANTEN           |                              |   | 3202 |      |
| 119 | YM TUBAGUS ANTON<br>MASHURI                    | DPW BANTEN | DPW BANTEN           |                              |   | 2316 |      |

|     |                                 |                  |                  |  |  |        |
|-----|---------------------------------|------------------|------------------|--|--|--------|
| 120 | YM TUBAGUS KRISNA BAYU          | DPW BANTEN       | DPW BANTEN       |  |   | 2316   |
| 121 | YM Rd. ENDY SETIADJI            | DPW JABAR        | DPW JABAR        |  |   | 1 3202 |
| 122 | YM Rd. AYKE SEPTIAWAN           | DPW JABAR        | DPW JABAR        |  |   | 1 1119 |
| 123 | YM NI Rd. RINA RINIANTI         | DPW JABAR        | DPW JABAR        |  |  |        |
| 124 | YM YANUARDI SYUKUR, M.Si        | DPW MALUKU UTARA | DPW MALUKU UTARA |  |   | 2301   |
| 125 | YM ISKANDAR ZULKARNAIN JO MAYOR | DPW MALUKU UTARA | DPW MALUKU UTARA |  |  | 2320   |

|     |   |  |   |                                    |  |
|-----|---|--|---|------------------------------------|--|
| 126 | YM DATUK ADIL FREDY HABERHAM              | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT<br>(AN Mandat) | DK 10 - SULTAN DELI (AN mandat)                             | KESULTANAN DELI, SUMUT             |  |
| 127 | YM LA ODE ANAS                            | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT<br>(AN Mandat) | DK 46 - RAJA WANSE WAKATOBI<br>(AN mandat)                  | KERAJAAN WANSE WAKATOBI,<br>SULTRA |  |
| 128 | YM DRS. K.H. A. BUSYRO KARIM, M.<br>Si    | DEWAN PAKAR (DP)                         | ANGGOTA DEWAN PAKAR MAKN                                    | KESULTANAN SUMENEP                 |  |
| 129 | YM REZA FAUZI RAHMAN, SH.                 | BAKUM                                    | ANGGOTA BAKUM MAKN  |                                    |  |
| 130 | YM ANDI LUH ALANG                         | DPW SULSEL                               | ANGGOTA BID.<br>KEMARITIMAN, PARIWISATA, DAN<br>SENI BUDAYA |                                    |  |
| 131 | YM ANDI AKBAR MAPPEWALI,<br>A.Ptnh., M.H. | DPW SULSEL                               | ANGGOTA BID. INVESTASI DAN<br>KERJASAMA                     |                                    |  |
| 132 | YM LA ODE USMAN BAGABASE                  | DPW SULTRA                               | DPW SULTRA  |                                    |  |
| 133 | YM KP ISMO                                | DPW JATENG                               | DPW JATENG  | KASUNANAN SURAKARTA                |  |
| 134 | ISTRI BUSYRO                              |  |   |                                    |  |
| 135 | WINI                                      |  |   |                                    |  |
| 136 | ADITYO                                    |  |   |                                    |  |
| 137 | ADRI                                      |  |   |                                    |  |
| 138 | ISTRI AMRI WARDHANA                       |  |   |                                    |  |

|     |           |  |  |  |     |
|-----|-----------|--|--|--|-----|
| 139 | ROSNAWATI |  |  |  | 131 |
| 140 | KURNIASIH |  |  |  | 130 |
| 141 | ANJAR     |  |  |  | 129 |

142 MUHAMMAD RAJULAN

DPW  
SULTRA

DPW  
SULTRA

KESULTANAN  
BUTON



Daftar Registrasi dan Tanda Terima seminar Kit

Senin, 19 September 2022

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)

| No | Nama                  | No. HP                      | Asal Kerajaan/DK                      | Tanda tangan  | Kamar            |
|----|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|------------------|
| 1  | Sanggar Cendana Wangi | 081280281095<br>(ada 4 org) | kepang →                              |    | 123              |
| 2  | Ibu Linda Moeda       | }                           |                                       |    | }                |
| 3  | Ibu Euy Manafe        |                             | <u>Donna Connie Nisoni</u><br>kepang. |   |                  |
| 4  | Ibu Yani Dethan       |                             |                                       |   |                  |
| 5  | Ibu Stanny Ngadax     |                             |                                       |   |                  |
| 6  | Nerataga              |                             |                                       | 124   |                  |
| 7  | Fentye dan            |                             |                                       |   |                  |
| 8  | ANNA . C.             | 082114276438                |                                       |  | GRHA . 1<br>1.2. |
| 9  | Pera Fari B.          | 081280626437                | PAKUM                                 |  |                  |

Daftar Hadir Peserta  
 Selasa, 20 September 2022  
 Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan  
 Anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)

| No | Nama                            | No. HP            | Asal Kerajaan/DK       | Tanda tangan     | Kamar       |
|----|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------|
| 1  | <del>RM. PURWADI. AS</del>      | 0812.135922.11    | BAKUM<br>CIREBON.      | <del></del>      | 238         |
| 2  | Rm. <del>Wahid</del> S.A.       | 089637862248      | Cirebon                | <del>Wahid</del> | 238         |
| 3  | MURZEPPI                        | 0812 6547<br>3608 | Pekalongan<br>Ki au    | <del>Fi</del>    |             |
| 4  | St Rusdal<br>Sultan Inayat Syah |                   |                        |                  | 6K 4<br>242 |
| 5  |                                 |                   |                        |                  |             |
| 6  | Taufik<br>Manoppo               | 085756631671      | Botaang -<br>Mongondow | <del></del>      | 6K 4<br>241 |
| 7  |                                 |                   |                        |                  |             |
| 8  |                                 |                   |                        |                  |             |
| 9  |                                 |                   |                        |                  |             |

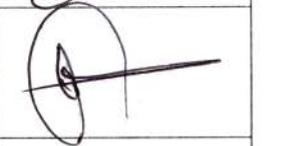
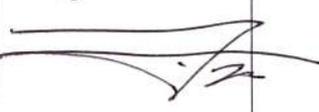
DAFTAR KAMAR

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)

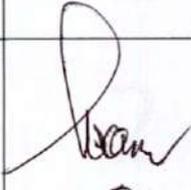
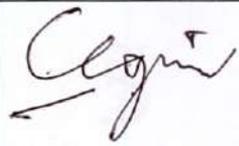
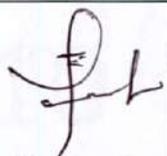
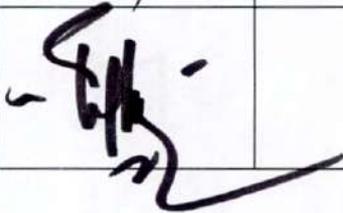
| No   | Nama  | No HP                 | Nomor Kamar | Asal Kerajaan/DK/Kelompok | Tanda tangan |
|------|---|-----------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| 1    | RA. Hy Yani WSS K.<br>(Sekjen MAKN)                                   | 0822929<br>57057      | 1.2.        |                           |              |
| 2    | Donna @. Nisnoni  |                       | 1.2.        |                           |              |
| 3    | Anna.<br>(Asisten Sekjen)   |                       | 1.2.        |                           |              |
| 4    | Bunga   |                       | 1.4.        |                           |              |
| ✓ 5  | Nicolaas NISNONI<br>(Raja Kupang NTT)                                 | 7                     | 113         |                           |              |
| ✓ 6  | Jesaya R.M Koroh<br>(Raja Amarasi, NTT)                               |                       | 114         |                           |              |
| ✓ 7  | ANJAR RAHMULONO<br>(Kupang)   |                       | 113         |                           |              |
| ✓ 8  | Goadis Betanici<br>(Kupang)   |                       | 115         |                           |              |
| 9    | Nabu Koroh (Gandonga)   |                       | 114         |                           |              |
| ✓ 10 | DONNA Y.A.A. NISNONI  | DPW NTT               | 115         |                           |              |
| ✓ 11 | JAN CHR. BENYAMIN   | DDP NTT<br>Ratuqaimar | 117         | KERA MAKN<br>NTT.         |              |
| ✓ 12 | H.Y. MINTARUNGSAH   | PPW NTT               | 122         | Sek. MAKN<br>NTT          |              |
| 13   | DR. H. LAODE MU-<br>HAMMAD IZAT -<br>MANARFA. N. SE<br>(SULTAN BUTON) | 0811 4027<br>67       | 106         | SULTAN<br>BUTON           |              |

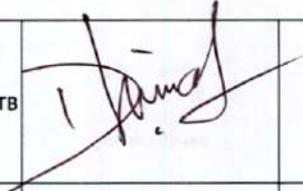
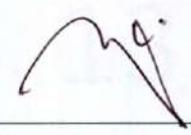
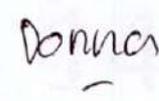
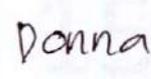
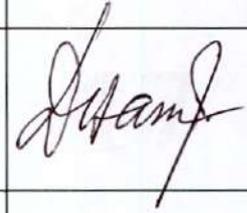
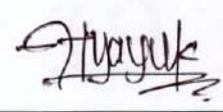
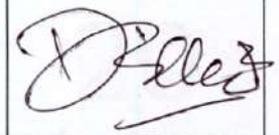
Sign  
for  
copy

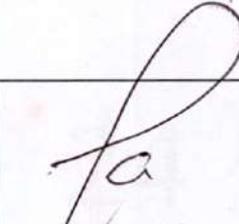
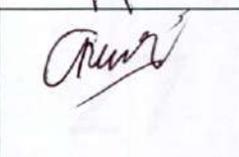
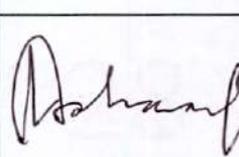
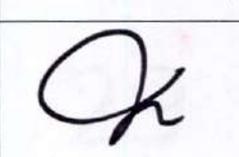
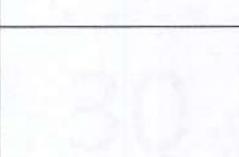
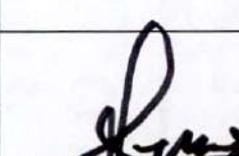
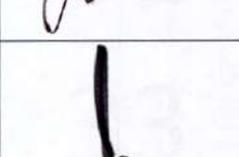
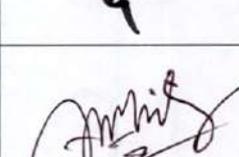
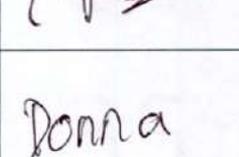
|   | nama  | NO Hp              | NO KEMER       | Kecamatan/Dk/Kelurahan               | Transkrip |
|---|---|--------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|
| ✓ | DRS. L D ODE<br>DABARU. M.S.                      | 0012 4990<br>5900  | 105            | SAPATI<br>C. PM KESUL<br>TANAN BUTAN |           |
| ✓ | LA ODE AHLUL MUSAFA<br>Cahaya kearifance<br>(RHA) | 08225926146        | 105            | KERAJARAN KULIKSIY<br>(DIC)          |           |
| ✓ | ACHMAD SYAH<br>SULTAN JALOW                       | 00124258<br>9069   | 109.           | (DK).                                |           |
| ✓ | NIKEN<br>Permasuri                                | 001245810<br>136.  | 109.           | DPW                                  |           |
|   | Tuan Razi<br>Gody Firman<br>1/390. Tan Aul        | 002300<br>163826   | 112.           | Sumber                               |           |
|   | S. Hh. Razi -<br>Kapo                             | 081267<br>934333   | 107            | Jumban                               |           |
|   | YULI HARDI<br>BANG LIMO B                         | 08126732<br>8298   | 107            | SUMBAR                               |           |
|   | Symlie DIBGO<br>Razi Lelo<br>ABEA tarman          | 002283<br>460994   | 103            | Sumber                               |           |
|   | DT. PHL Betan                                     | 08258144<br>5704   | 103            | Sumber                               |           |
|   | AIDIL FITRI<br>DT Pangulu Basik                   | 0812 678<br>3443   | (110)          | Sumber                               |           |
|   | TENBUK ZULMIZAN<br>F.A.                           | 08376309<br>5959   | 64237<br>(237) | Kepri                                |           |
|   | RM. PURWADI. A                                    | 0812.1359<br>2211. | 238            | BELKASI                              |           |
|   | RM WILDAN   |                    | 238.           | BELKASI                              |           |
|   | M. Sya Mula Manoff<br>Gky. Mles                   | 0813 8625<br>7675  | 239.           | Balang<br>Majabat<br>Guliy.          |           |
|   | Fantje Deniel manoppo.                            | 08117306070        | 240            | Balang Majabat<br>Saeit              |           |

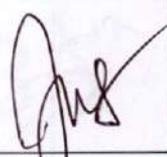
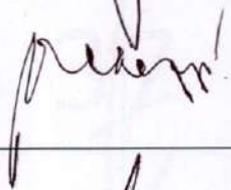
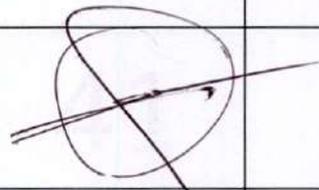
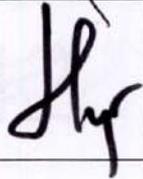
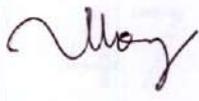
|    |                                |                      |     |           |   |
|----|--------------------------------|----------------------|-----|-----------|---|
| 29 | Syamir DT BGD<br>Rajo Lolo     | 082283<br>460994     | 103 |           |  |
| 30 | ABER Tasman<br>PT PHL Batuan   | 08238144<br>5904     |     | PCndoping |  |
| 31 | AIDIL FITRI<br>DATUK PHL BOSAK | 0812<br>6785<br>3443 | 119 |           |  |
| 32 |                                |                      |     |           |   |
| 33 |                                |                      |     |           |   |
| 34 |                                |                      |     |           |   |
| 35 |                                |                      |     |           |   |
| 36 |                                |                      |     |           |   |
| 37 |                                |                      |     |           |   |
| 38 |                                |                      |     |           |   |
| 39 |                                |                      |     |           |   |
| 40 |                                |                      |     |           |   |
| 41 |                                |                      |     |           |   |
| 42 |                                |                      |     |           |   |
| 43 |                                |                      |     |           |   |

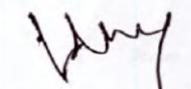
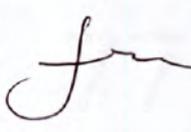
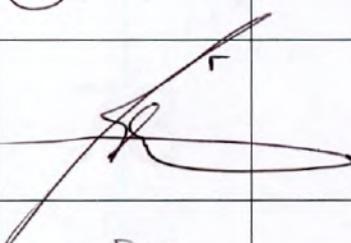
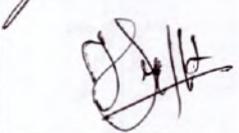
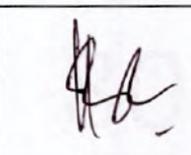
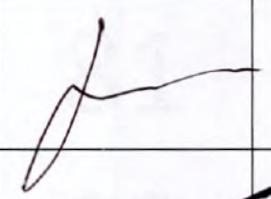
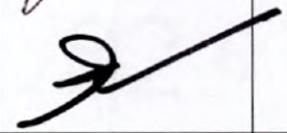
Daftar Hadir Peserta  
 Selasa, 20 September 2022  
 Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan  
 Anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)

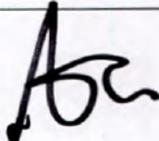
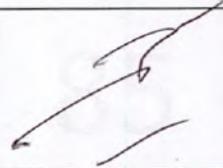
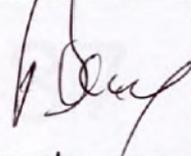
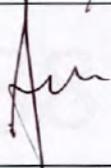
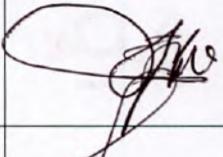
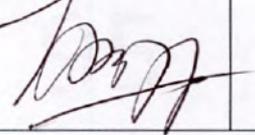
| No | Nama   | Unsur  | Jabatan   | Asal Kerajaan/DK  | Tanda tangan  | Kamar |
|----|--|--|---|---|---|-------|
| 1  | PYM SPDB DRS.<br>EDWARDS SYAH<br>PERNONG, SH. M.H.   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 02 - SULTAN SEKALA<br>BRAK YANG DIPERTUAN<br>KE-23 | KERAJAAN ADAT PAKSI<br>PAK SEKALA BRAK,<br>KEPAKSAN PERNONG,<br>LAMPUNG |   |       |
| 2  | PYM SRI RADYA I<br>LUKMAN<br>SOEMADISOERIA   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 03 - RAJA SUMEDANG<br>LARANG                       | KERATON SUMEDANG<br>LARANG, JABAR                                       |    |       |
| 3  | YM KPH GUSTI INDRU<br>KUSUMO   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 04 - RAJA PAKU<br>ALAMAN X (AN Mandat)             | PURO PAKU ALAMAN,<br>YOGYAKARTA   |    |       |
| 4  | PYM RADEN PANJI<br>MUCH. MUCHTAR<br>ATMOKUSUMO, M. AK  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 05 - PEMANGKU ADAT<br>KESULTANAN SUMENEP           | KESULTANAN SUMENEP,<br>JATIM  |    |       |
| 5  | PYM LEOPOLD NICHOLAS<br>NISNONI, BBA   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 06 - RAJA KERAJAAN<br>KUPANG                       | KERAJAAN KUPANG, NTT  |   |       |
| 6  | PYM SULTAN H. ADJI<br>BACHRUL HADIE, SH.,<br>MBA   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 07 - SULTAN<br>KESULTANAN GUNUNG<br>TABUR          | KESULTANAN GUNUNG<br>TABUR, KALTIM                                      |  |       |
| 7  | PYM ANDI KEMALA IDJO<br>DAENG SILA, SH.<br>KARAENG LEMBANG<br>PARANG BATARA GOWA<br>III SULTAN MALIKUSSAID<br>II | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 08 - RAJA GOWA<br>XXXVIII                          | KERAJAAN GOWA, SULSEL   |   |       |
| 8  | PYM ACHMAD SYAH  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 09 - SULTAN JAILOLO                                | KESULTANAN JAILOLO,<br>HALMAHERA BARAT                                  |  |       |
| 9  | PYM TUANKU MAHMUD<br>ARIA LAMANTJII<br>PERKASA ALAM SYAH   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 10 - SULTAN DELI                                   | KESULTANAN DELI, SUMUT  |   |       |
| 10 | PYM TUANKU RAJO<br>GODANG FIRMAN<br>BAGINDO TAN AMEH   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 11 - RAJA ALAM<br>JAMBO LIPO                       | KERAJAAN JAMBO LIPO,<br>SUMBAR  |  |       |
| 11 | YM KASHAR HAROEN<br>TENGGU PANGERAN  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 13 - SULTAN<br>PALELAWAN (AN<br>mandat)            | KESULTANAN PALELAWAN,<br>RIAU   |  |       |

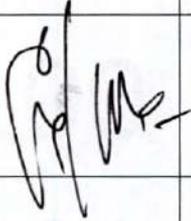
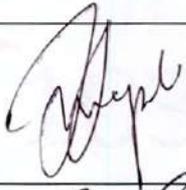
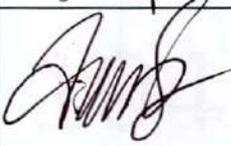
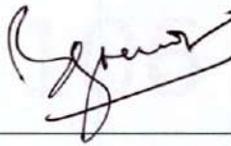
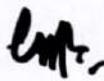
|    |   |  |  |   |   |  |
|----|---|--|--|---|---|--|
| 12 | YM DHIMAS JUNIO<br>NARASHIMARAO, S. Ked   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 14 - PUTRA RAJA<br>DOMPU (AN mandat)                              | KESULTANAN DOMPU, NTB                               |    |  |
| 13 | PYM ST YUDDHI<br>PRAYOGO, SE., MEI.<br>SULTAN INDERA<br>RAHIMSYAH DAULAT<br>SULTAN MUHAMMAD<br>SYAH | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 15 - SULTAN<br>INDERAPURA   | KESULTANAN<br>INDERAPURA, SUMBAR                    |    |  |
| 14 | YM GKRA TIMOER  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 17 - RAJA<br>KASUNANAN<br>SURAKARTA<br>HADININGRAT (AN<br>mandat) | KASUNANAN SURAKARTA<br>HADININGRAT, SOLO,<br>JATENG |    |  |
| 15 | YM DRA. GRAY KOES<br>MOERTIYAH, M. Pd   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 18 - KETUA LDA KSA  | KASUNANAN SURAKARTA<br>HADININGRAT, SOLO,<br>JATENG |    |  |
| 16 | PYM P. HANDI, SE. MM.<br>RAJA KAPRABON XI   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 21 - RAJA<br>KAPRABONNAN  | KERATON KAPRABONAN<br>CIREBON, JABAR                |    |  |
| 17 | PYM PEMANGKU SULTAN<br>DATU ABDUL HAMID   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 23 - PEMANGKU<br>SULTAN KESULTANAN<br>BULUNGAN                    | KESULTANAN BULUNGAN,<br>KALTARA                     |   |  |
| 18 | YM INDA PANGGIAN  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 25 - RAJA<br>KESULTANAN<br>SAMBALIUNG (AN<br>mandat)              | KESULTANAN<br>SAMBALIUNG, KALTIM                    |  |  |
| 19 | YM SRI RAHAYU<br>KURNIASIH  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 26 - SULTAN<br>KUTAWARINGIN (AN<br>mandat)                        | KESULTANAN<br>KUTAWARINGIN, KALTENG                 |  |  |
| 20 | PYM DECKY TANASALE  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 28 - RAJA LEINITU   | KERAJAAN LEINITU,<br>MALUKU                         |  |  |
| 21 | PYM ARIEF RUMAGESAN   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 29 - RAJA SEKAR<br>FAKFAK   | KERAJAAN SEKAR FAKFAK,<br>PAPUA BARAT               |  |  |
| 22 | YM PANGERAN RAJA<br>RUSLAN, SH., M.Kn   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 30 - SULTAN<br>KACIREBONAN IX (AN<br>mandat)                      | KERATON KACIREBONAN,<br>JABAR                       |  |  |
| 23 | YM POCUT MERIAH<br>ZAKIYYAH SAFIATUNNISA  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 31 - SULTAN ACEH<br>DARUSSALAM (AN<br>mandat)                     | KESULTANAN ACEH<br>DARUSSALAM, ACEH                 |  |  |

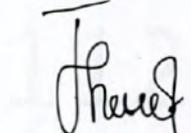
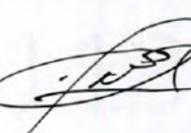
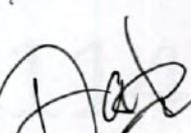
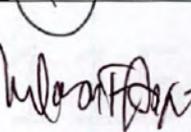
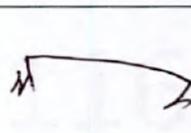
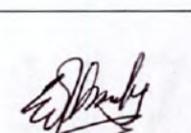
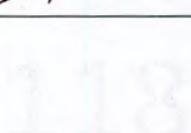
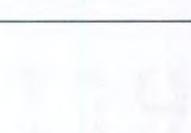
|    |  |                                       |  |                                     |   |   |
|----|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| 24 | YM WIRDA ANATANIA MAHA RATU SURO MAHKOTA AGUNG | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 35 - SULTAN KOTA PONTIANAK IX (AN mandat) | ISTANA KADRIAH KESULTANAN PONTIANAK |     |   |
| 25 | PYM YESAYA ROBERT MAURITS KOROH                | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 36 - RAJA AMARASI                         | KERAJAAN AMARASI, NTT               |    |   |
| 26 | PYM VICOAS TB AMALO S.                         | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 37 - RAJA NUSAK TERMANU ROTE              | KERAJAAN NUSAK TERMANU ROTE, NTT    |    |   |
| 27 | PYM DRS H. KHAERUN DAHLAN, MM.                 | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 40 - RAJA MEKONGGA                        | KERAJAAN MEKONGGA, SULTRA           |    |   |
| 28 | PYM DR. LA ODE MUHAMMAD IZZAT MANA'ARFA, M. Si | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 41 - SULTAN BUTON                         | KESULTANAN BUTON, SULTRA            |    | 2 |
| 29 | PYM ANDI BASO HAMID PABENTENG RAJABONE XXXV    | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 42 - RAJA BONE XXXV                       | KERAJAAN BONE, SULSEL               |   |   |
| 30 | YM MEGA LANDON RUNDING                         | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 44 - RATU PUANG BALUSU TORUT (AN mandat)  | KERAJAAN PUANG BALUSU TORUT, SULSEL |  |   |
| 31 | PYM LA ODE SARIFUDDIN, S. Pd                   | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 46 - RAJA WANSE WAKATOBI                  | KERAJAAN WANSE WAKATOBI, SULTRA     |  |   |
| 32 | YM REVL IBRAHIM ISKANDAR                       | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 51 - SULTAN BACAN (AN mandat)             | KESULTANAN BACAN, HALMAHERA SELATAN |  |   |
| 33 | YM RATNA DEWI MUCLISA                          | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 54 - SULTAN BIMA (AN mandat)              | KESULTANAN BIMA, NTB                |  |   |
| 34 | YM ABDUL WAHID                                 | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 55 - RAJA MARADIKA MAMUJU (AN mandat)     | KERAJAAN MARADIKA MAMUJU, SULBAR    |  |   |
| 35 | YM DR. KPH EDDY WIRABHUMI, SH., MM.            | DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)            | DPP 01 - KETUA UMUM MAKN                     | KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT     |  |   |

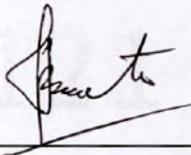
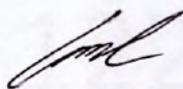
|    |   |   |   |  |   |  |
|----|---|---|---|--|---|--|
| 36 | YM DRA. Hj. R.AY YANI<br>WSS KUSWODIDJOJO   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 02- SEKJEN MAKN                       | KESULTANAN SUMENEP   |    |  |
| 37 | YM SEEM R. CANGGU,<br>SE., MM. RAJA DUAT<br>PERBANGSA KERAJAAN<br>ADAT PAKSI PAK SEKALA<br>BRAK, KEPAKSIAN<br>PERNONG | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 03 - KETUA 1 MAKN                     | KERAJAAN ADAT PAKSI<br>PAK SEKALA BRAK,<br>KEPAKSIAN PERNONG,<br>LAMPUNG |    |  |
| 38 | YM TB AMRI WARDHANA<br>SH., MH.   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 05 - KETUA 3 MAKN                     | KESULTANAN<br>SUROSOWAN, BANTEN  |    |  |
| 39 | YM Ir. H. LALU GAFAR<br>ISMAL KERTANEGARA,<br>MM.   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 07 - KETUA 5 MAKN                     | KEDATUAN SELAPARANG<br>LOMBOK, NTB                                       |    |  |
| 40 | YM MOKOLE ANDI<br>MUSLIMIN MS SANGIA<br>PUSU, ST., M.PW., IAI   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 08 - KETUA 6 MAKN                     | KERAJAAN POLEANG<br>MORONENE, SULTRA                                     | 40  |  |
| 41 | YM ADJI RADEN<br>MOHAMMAD BAKHRUN   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 09 - KETUA 7 MAKN                     | KESULTANAN GUNUNG<br>TABUR, KALTIM                                       |   |  |
| 42 | YM KHAERUDIN JOJUGU   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 10 - KETUA 8 MAKN                     | KESULTANAN JAILOLO,<br>HALMAHERA BARAT                                   |  |  |
| 43 | YM RADEN PANJI AGOES<br>IRIANTO, SH   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 11 - WAKIL SEKJEN<br>MAKN             | KESULTANAN SUMENEP,<br>JATIM   | Agoes   |  |
| 44 | YM DIAH PURO<br>PAKUALAMAN  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)<br>(AN Mandat) | DPP 12 - WAKIL SEKJEN<br>MAKN (AN mandat) | PURO PAKUALAMAN,<br>YOGYAKARTA   | 44  |  |
| 45 | YM TITIE PRAPTI OETAMI  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 13 - BENDAHARA<br>UMUM MAKN           | KESULTANAN<br>SUMENEP/KEPAKSIAN<br>PERNONG SEKALA BRAK,<br>LAMPUNG       | 45  |  |
| 46 | YM RATU RAJA ARIMBI<br>NURTINA, S.T.  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 14 - WAKIL<br>BENDAHARA UMUM<br>MAKN  | KESULTANAN KANOMAN<br>CIREBON  | 46  |  |
| 47 | YM TONNY SARITUA<br>PURBA, SP.  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 15 - WAKIL<br>BENDAHARA UMUM<br>MAKN  | KERAJAAN PURBA<br>SIMALUNGUN   |  |  |

|    |   |             |                    |                                   |   |  |
|----|---|-------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|
| 72 | YM KEMAS ANTONY                               | BAKUM       | ANGGOTA BAKUM MAKN |                                   |    |  |
| 73 | YM Dr. R.H. BAMBANG SRIWIJATNO, SH., MM., MH  | BAKUM       | ANGGOTA BAKUM MAKN |                                   |    |  |
| 74 | YM DATUK ADIL FREDY HABERHAM                  | DPW SUMUT   | DPW SUMUT          | KERAJAAN DELI MAIMUN              |   |  |
| 75 | YM PANGERAN SERDANG BADAGAI                   | DPW SUMUT   | DPW SUMUT          | KERAJAAN SENDANG BADAGAI          |    |  |
| 76 | YM SULISTIO Dt RAJO INDO, SH.                 | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         | KERAJAAN JAMBU LIPO               |   |  |
| 77 | YM YULIARDI PANGLIMO RAJO                     | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         |                                   |   |  |
| 78 | YM GUSHANADI, S. Pd., MH Dt RAJO KAYO         | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         |                                   |  |  |
| 79 | YM MARHASNIDA TUAN PUTRI ANCIK, S.Pd SIGUNTUR | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         | KERAJAAN SIGUNTUR                 |  |  |
| 80 | YM BOWO LEKSONO, SE., SH., MH.                | DPW LAMPUNG | DPW LAMPUNG        | KERAJAAN ADAT SEKALA BRAK PERNONG |  |  |
| 81 | YM RUDI PURNAWAN                              | DPW LAMPUNG | DPW LAMPUNG        |                                   |  |  |
| 82 | YM GUSTI MUHAMAD HADIANSYAH, ST., MT.         | DPW KALTENG | DPW KALTENG        |                                   |  |  |
| 83 | YM ESAMARTH AGUNG MAULANA                     | DPW KALTENG | DPW KALTENG        |                                   |  |  |

|    |   |            |   |                               |   |  |
|----|---|------------|---|-------------------------------|---|--|
| 84 | YM MUH. ARIF SONDA<br>KARAENG KULLE                 | DPW SULSEL | DEWAN KERAJAAN  |                               |    |  |
| 85 | YM ANDI MARDIANA WE<br>PADAULENG                    | DPW SULSEL | C. DEWAN KERAJAAN   |                               |    |  |
| 86 | YM H. ANDI<br>PARENRENGI, SH.                       | DPW SULSEL | WAKIL KETUA BID.<br>HUKUM                                 |                               |    |  |
| 87 | YM ANDI BASO ILYAS<br>OPU MALANRE, ST.              | DPW SULSEL | WAKIL KETUA BID.<br>PEMBERDAYAAN USAHA<br>EKONOMI KREATIF |                               |    |  |
| 88 | YM ANDI PATARAI A.<br>MANGINRURU ANDI IDJO          | DPW SULSEL | WAKIL SEKRETARIS  |                               |    |  |
| 89 | YM ANDI ILHAM<br>LATUNRA, M. Si                     | DPW SULSEL | WAKIL SEKRETARIS  |                               | 89  |  |
| 90 | YM ANDI BESSE KARINA<br>HAMID, ST.                  | DPW SULSEL | BENDAHARA   |                               |  |  |
| 91 | YM PROF. Dr. H. ANDI<br>AHMAD RUSLAN, SH.,<br>MH.   | DPW SULSEL | ADVOKASI HUKUM  |                               |  |  |
| 92 | YM ANDI RADIANTO, SH.,<br>MH.                       | DPW SULSEL | ADVOKASI HUKUM  |                               | 92  |  |
| 93 | YM PROF. Dr. ANDI<br>IBRAHIM, S. Ag., SS., M.<br>Pd | DPW SULSEL | DEWAN PAKAR   |                               |  |  |
| 94 | YM FENTJE DANIEL<br>MANOPPO                         | DPW SULUT  | DPW SULUT   | KERAJAAN BOLAANG<br>MONGONDOW |  |  |
| 95 | YM Dra. Hj. MUKU<br>MANOPPO, S.KM., S.Kes           | DPW SULUT  | DPW SULUT   |                               |  |  |

|     |   |                  |                               |                                |   |   |
|-----|---|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|
| 96  | YM LAODE MUSAFI<br>KULISUSU                   | DK DPW SULTRA    | RAJA KULISUSU                 | KERAJAAN KULISUSU              |    |   |
| 97  | YM DR. HJ. SURIANA<br>GENDE MORONENE          | DPW SULTRA       | PENGURUS HARIAN DPW<br>SULTRA | KERAJAAN MORONENE              |    |   |
| 98  | YM H. AKSAN SASARI                            | DPW SULTRA       | PENGURUS HARIAN DPW<br>SULTRA |                                |    |   |
| 99  | YM LA ODE ARSAL                               | DPW SULTRA       | DPW SULTRA                    | KAPAITALAO KESULTANAN<br>BUTON |    |   |
| 100 | YM LAODE JABARU<br>BUTON                      | DPW SULTRA       | DPW SULTRA                    | KESULTANAN BUTON               |    |   |
| 101 | YM RIFLY M. KATILI A.P.,<br>S. Sos., M.Ec.Dev | DPW<br>GORONTALO | DPW GORONTALO                 |                                |   |   |
| 102 | YM ROSWATI<br>LASIMPALA., SH., MH.            | DPW<br>GORONTALO | DPW GORONTALO                 |                                |  |   |
| 103 | YM KAICIL ZULKIFLI., SE                       | DPW<br>GORONTALO | DPW GORONTALO                 |                                |  |   |
| 104 | YM RB. AGUNG SATRIO<br>PRABOWO AGSRIE, SH.    | DPW JATIM        | DPW JATIM                     | KESULTANAN SUMENEP             |  |   |
| 105 | YM RP. RANGGA Y.<br>MUCHEYZ PUTERA            | DPW JATIM        | DPW JATIM                     | KESULTANAN SUMENEP             |  |   |
| 106 | YM JAN BENYAMIN                               | DPW NTT          | KETUA DPW NTT                 | KERAJAAN BABAU                 |  |   |
| 107 | YM DONNA MALEDA<br>NISNONI                    | DPWNTT           | PENGURUS DPW NTT              | KERAJAAN KUPANG                |  |  |

|     |  |            |                      |                           |   |  |
|-----|--|------------|----------------------|---------------------------|---|--|
| 108 | YM HIZKIANA<br>YONATHAN AMABI<br>MINTARNINGSIH | DPW NTT    | PENGURUS DPW NTT     |                           |    |  |
| 109 | YM H.L. GEDE SYAMSUL<br>MUJAHIDIN              | DPW NTB    | KETUA HARIAN DPW NTB |                           |    |  |
| 110 | YM H.L. MAHDARAIN, ST.                         | DPW NTB    | PENGURUS DPW NTB     |                           |    |  |
| 111 | YM FREDY BENYAMIN<br>WAAS                      | DPW AMBON  | DK NEGERI HUTUMI     | KERAJAAN NEGERI<br>HUTUMI |    |  |
| 112 | YM JENSE TERESIA<br>LEIMENA                    | DPW AMBON  | DK NEGERI EMA        | KERAJAAN NEGERI EMA       |    |  |
| 113 | YM MICHAEL A.H.P. DE<br>QUELJOE                | DPW AMBON  | DK NEGERI KILANG     | KERAJAAN NEGERI KILANG    |   |  |
| 114 | YM DATJE TAHAPARY                              | DPW AMBON  | DK NEGERI AKOON      | KERAJAAN NEGERI AKOON     |  |  |
| 115 | YM T. ZULMIZAN F.<br>ASSAGAFF, SE., M.Si       | DPW KEPRI  | DPW KEPRI            |                           |  |  |
| 116 | YM. H. TENGGU<br>WAHIDUDIN                     | DPW KEPRI  | DPW KEPRI            |                           |  |  |
| 117 | YM EDY HANAFAI                                 | DPW KEPRI  | DPW KEPRI            |                           |  |  |
| 118 | YM TUBAGUS ASHABUL<br>ZAM ZAM                  | DPW BANTEN | DPW BANTEN           |                           |  |  |
| 119 | YM TUBAGUS ANTON<br>MASHURI                    | DPW BANTEN | DPW BANTEN           |                           |  |  |

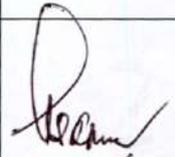
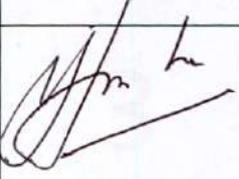
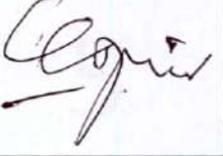
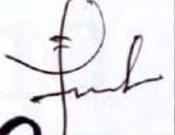
|     |                                    |                     |                  |  |  |  |
|-----|------------------------------------|---------------------|------------------|--|--|--|
| 120 | YM TUBAGUS KRISNA BAYU             | DPW BANTEN          | DPW BANTEN       |  |   |  |
| 121 | YM Rd. ENDY SETIADJI               | DPW JABAR           | DPW JABAR        |  |   |  |
| 122 | YM Rd. AYKE SEPTIAWAN              | DPW JABAR           | DPW JABAR        |  |   |  |
| 123 | YM NI Rd. RINA RINIANTI            | DPW JABAR           | DPW JABAR        |  |  |  |
| 124 | YM YANUARDI SYUKUR,<br>M.Si        | DPW MALUKU<br>UTARA | DPW MALUKU UTARA |  |   |  |
| 125 | YM ISKANDAR<br>ZULKARNAIN JO MAYOR | DPW MALUKU<br>UTARA | DPW MALUKU UTARA |  |  |  |

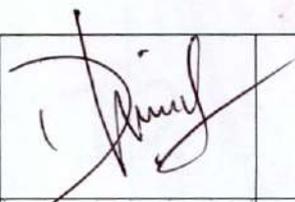
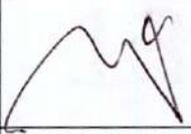
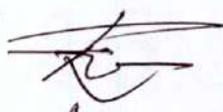
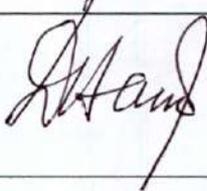
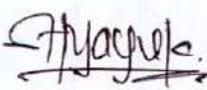
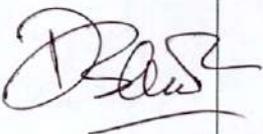
|     |   |  |   |                                    |     |
|-----|---|--|---|------------------------------------|-----|
| 126 | YM DATUK ADIL FREDY HABERHAM              | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT<br>(AN Mandat) | DK 10 - SULTAN DELI (AN mandat)                             | KESULTANAN DELI, SUMUT             | 126 |
| 127 | YM LA ODE ANAS                            | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT<br>(AN Mandat) | DK 46 - RAJA WANSE WAKATOBI<br>(AN mandat)                  | KERAJAAN WANSE WAKATOBI,<br>SULTRA | 127 |
| 128 | YM DRS. K.H. A. BUSYRO KARIM, M.<br>Si    | DEWAN PAKAR (DP)                         | ANGGOTA DEWAN PAKAR MAKN                                    | KESULTANAN SUMENEP                 | 128 |
| 129 | YM REZA FAUZI RAHMAN, SH.                 | BAKUM                                    | ANGGOTA BAKUM MAKN  |                                    | 129 |
| 130 | YM ANDI LUH ALANG                         | DPW SULSEL                               | ANGGOTA BID.<br>KEMARITIMAN, PARIWISATA, DAN<br>SENI BUDAYA |                                    | 130 |
| 131 | YM ANDI AKBAR MAPPEWALI,<br>A.Ptnh., M.H. | DPW SULSEL                               | ANGGOTA BID. INVESTASI DAN<br>KERJASAMA                     |                                    | 131 |
| 132 | YM LA ODE USMAN BAGABASE                  | DPW SULTRA                               | DPW SULTRA  |                                    | 132 |
| 133 | YM KP ISMO                                | DPW JATENG                               | DPW JATENG  | KASUNANAN SURAKARTA                | 133 |
| 134 | ISTRI BUSYRO                              |  |   |                                    | 134 |
| 135 | WINI                                      |  |   |                                    | 135 |
| 136 | ADITYO                                    |  |   |                                    | 136 |
| 137 | ADRI                                      |  |   |                                    | 137 |
| 138 | ISTRI AMRI WARDHANA                       |  |   |                                    | 138 |

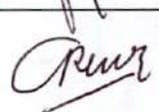
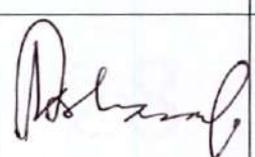
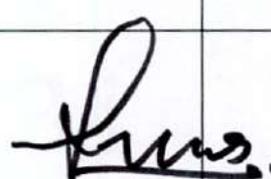
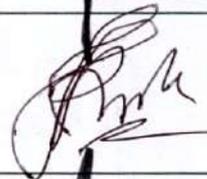
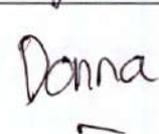
|     |           |  |  |  |     |
|-----|-----------|--|--|--|-----|
| 139 | ROSNAWATI |  |  |  | 139 |
| 140 | KURNIASIH |  |  |  | 140 |
| 141 | ANJAR     |  |  |  | 141 |

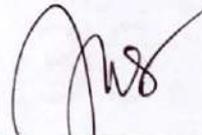
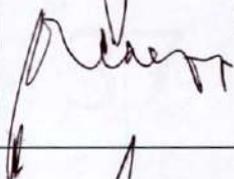
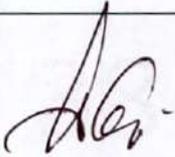
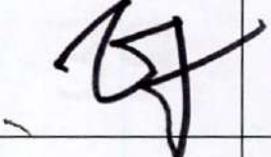
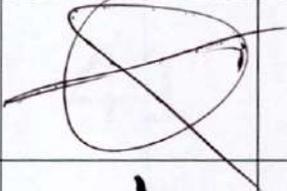
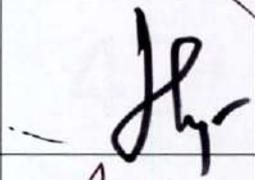
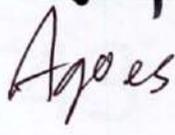
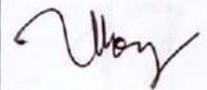
*Djuz*

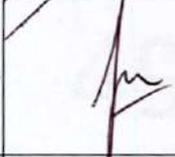
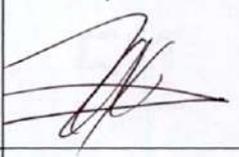
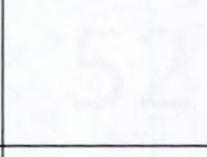
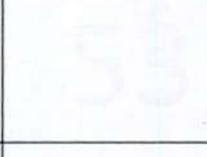
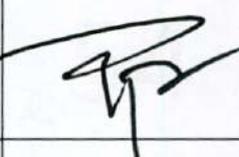
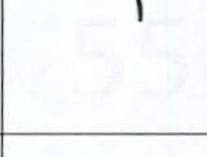
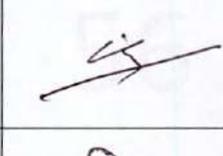
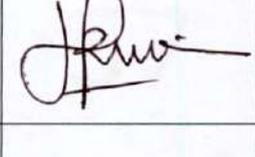
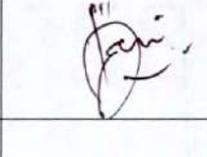
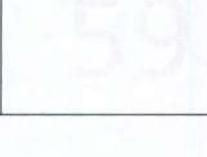
Daftar Hadir Peserta  
Rabu, 21 September 2022  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan  
Anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)

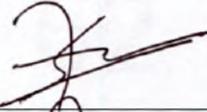
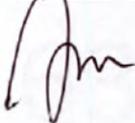
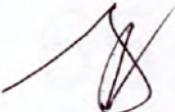
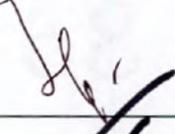
| No | Nama   | Unsur  | Jabatan   | Asal Kerajaan/DK   | Tanda tangan  | Kamar |
|----|--|--|---|--|---|-------|
| 1  | PYM SPDB DRS.<br>EDWARDS SYAH<br>PERNONG, SH. M.H.   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 02 - SULTAN SEKALA<br>BRAK YANG DIPERTUAN<br>KE-23 | KERAJAAN ADAT PAKSI<br>PAK SEKALA BRAK,<br>KEPAKSIAN PERNONG,<br>LAMPUNG |   |       |
| 2  | PYM SRI RADYA I<br>LUKMAN<br>SOEMADISOERIA   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 03 - RAJA SUMEDANG<br>LARANG                       | KERATON SUMEDANG<br>LARANG, JABAR  |    |       |
| 3  | YM KPH GUSTI INDRO<br>KUSUMO   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 04 - RAJA PAKU<br>ALAMAN X (AN Mandat)             | PURO PAKU ALAMAN,<br>YOGYAKARTA  |    |       |
| 4  | PYM RADEN PANJI<br>MUCH. MUCHTAR<br>ATMOKUSUMO, M. AK  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 05 - PEMANGKU ADAT<br>KESULTANAN SUMENEP           | KESULTANAN SUMENEP,<br>JATIM   |    |       |
| 5  | PYM LEOPOLD NICHOLAS<br>NISNONI, BBA   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 06 - RAJA KERAJAAN<br>KUPANG                       | KERAJAAN KUPANG, NTT   |   |       |
| 6  | PYM SULTAN H. ADJI<br>BACHRUL HADIE, SH.,<br>MBA   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 07 - SULTAN<br>KESULTANAN GUNUNG<br>TABUR          | KESULTANAN GUNUNG<br>TABUR, KALTIM                                       |  |       |
| 7  | PYM ANDI KEMALA IDJO<br>DAENG SILA, SH.<br>KARAENG LEMBANG<br>PARANG BATARA GOWA<br>III SULTAN MALIKUSSAID<br>II | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 08 - RAJA GOWA<br>XXXVIII                          | KERAJAAN GOWA, SULSEL  |   |       |
| 8  | PYM ACHMAD SYAH  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 09 - SULTAN JAILOLO                                | KESULTANAN JAILOLO,<br>HALMAHERA BARAT                                   |  |       |
| 9  | PYM TUANKU MAHMUD<br>ARIA LAMANTJJI<br>PERKASA ALAM SYAH   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 10 - SULTAN DELI                                   | KESULTANAN DELI, SUMUT   |   |       |
| 10 | PYM TUANKU RAJO<br>GODANG FIRMAN<br>BAGINDO TAN AMEH   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 11 - RAJA ALAM<br>JAMBO LIPO                       | KERAJAAN JAMBO LIPO,<br>SUMBAR   |  |       |
| 11 | YM KASHAR HAROEN<br>TENGGU PANGERAN  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 13 - SULTAN<br>PALELAWAN (AN<br>mandat)            | KESULTANAN PALELAWAN,<br>RIAU  |  |       |

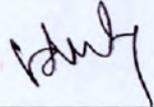
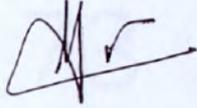
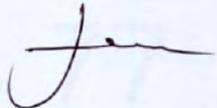
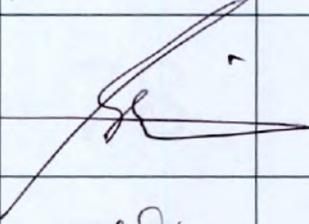
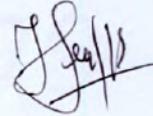
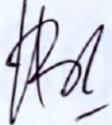
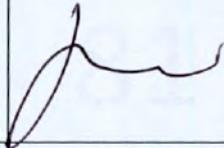
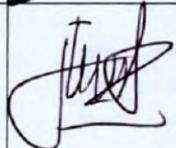
|    |  |  |  |   |   |  |
|----|--|--|--|---|---|--|
| 12 | YM DHIMAS JUNIO<br>NARASHIMARAO, S. Ked  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 14 - PUTRA RAJA<br>DOMPU (AN mandat)                              | KESULTANAN DOMPU, NTB                               |    |  |
| 13 | PYM ST YODHI<br>PRAYOGO, SE., MEI.<br>SULTAN INDERA<br>RAHIMSYAH DAULAT<br>SULTAN MUHAMMAD<br>SYAH | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 15 - SULTAN<br>INDERAPURA   | KESULTANAN<br>INDERAPURA, SUMBAR                    |    |  |
| 14 | YM GKRA TIMOER   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 17 - RAJA<br>KASUNANAN<br>SURAKARTA<br>HADININGRAT (AN<br>mandat) | KASUNANAN SURAKARTA<br>HADININGRAT, SOLO,<br>JATENG | Donna   |  |
| 15 | YM DRA. GRAY KOES<br>MOERTIYAH, M. Pd  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 18 - KETUA LDA KSA  | KASUNANAN SURAKARTA<br>HADININGRAT, SOLO,<br>JATENG | Donna   |  |
| 16 | PYM P. HANDI, SE. MM.<br>RAJA KAPRABON XI  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 21 - RAJA<br>KAPRABONNAN  | KERATON KAPRABONAN<br>CIREBON, JABAR                |    |  |
| 17 | PYM PEMANGKU SULTAN<br>DATU ABDUL HAMID  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 23 - PEMANGKU<br>SULTAN KESULTANAN<br>BULUNGAN                    | KESULTANAN BULUNGAN,<br>KALTARA                     |   |  |
| 18 | YM INDA PANGGIAN   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 25 - RAJA<br>KESULTANAN<br>SAMBALIUNG (AN<br>mandat)              | KESULTANAN<br>SAMBALIUNG, KALTIM                    |   |  |
| 19 | YM SRI RAHAYU<br>KURNIASIH   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 26 - SULTAN<br>KUTAWARINGIN (AN<br>mandat)                        | KESULTANAN<br>KUTAWARINGIN, KALTENG                 |  |  |
| 20 | PYM DECKY TANASALE   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 28 - RAJA LEINITU   | KERAJAAN LEINITU,<br>MALUKU                         |  |  |
| 21 | PYM ARIEF RUMAGESAN  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 29 - RAJA SEKAR<br>FAKFAK   | KERAJAAN SEKAR FAKFAK,<br>PAPUA BARAT               |  |  |
| 22 | YM PANGERAN RAJA<br>RUSLAN, SH., M.Kn  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 30 - SULTAN<br>KACIREBONAN IX (AN<br>mandat)                      | KERATON KACIREBONAN,<br>JABAR                       |   |  |
| 23 | YM POCUT MERIAH<br>ZAKIYYAH SAFIATUNNISA   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 31 - SULTAN ACEH<br>DARUSSALAM (AN<br>mandat)                     | KESULTANAN ACEH<br>DARUSSALAM, ACEH                 |  |  |

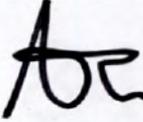
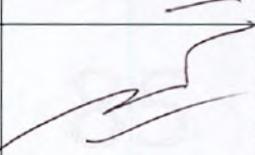
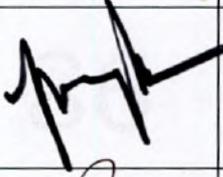
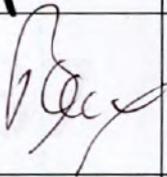
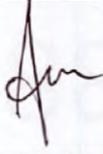
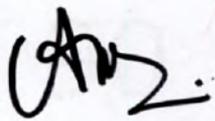
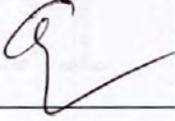
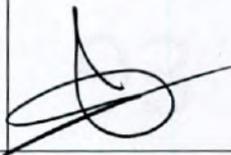
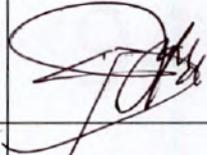
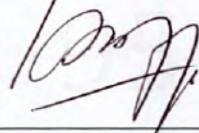
|    |  |  |  |  |   |  |
|----|--|--|--|--|---|--|
| 24 | YM WIRDA ANATANIA<br>MAHA RATU SURO<br>MAHKOTA AGUNG | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 35 - SULTAN KOTA<br>PONTIANAK IX (AN<br>mandat) | ISTANA KADRIAH<br>KESULTANAN PONTIANAK |     |  |
| 25 | PYM YESAYA ROBERT<br>MAURITS KOROH                   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 36 - RAJA AMARASI                               | KERAJAAN AMARASI, NTT                  |    |  |
| 26 | PYM VICOAS TB AMALO<br>S.                            | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 37 - RAJA NUSAK<br>TERMANU ROTE                 | KERAJAAN NUSAK<br>TERMANU ROTE, NTT    |    |  |
| 27 | PYM DRS H. KHAERUN<br>DAHLAN, MM.                    | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 40 - RAJA MEKONGGA                              | KERAJAAN MEKONGGA,<br>SULTRA           |    |  |
| 28 | PYM DR. LA ODE<br>MUHAMMAD IZZAT<br>MANA'ARFA, M. Si | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 41 - SULTAN BUTON                               | KESULTANAN BUTON,<br>SULTRA            |    |  |
| 29 | PYM ANDI BASO HAMID<br>PABENTENG RAJABONE<br>XXXV    | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 42 - RAJA BONE XXXV                             | KERAJAAN BONE, SULSEL                  |   |  |
| 30 | YM MEGA LANDON<br>RUNDING                            | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 44 - RATU PUANG<br>BALUSU TORUT (AN<br>mandat)  | KERAJAAN PUANG BALUSU<br>TORUT, SULSEL |   |  |
| 31 | PYM LA ODE<br>SARIFUDDIN, S. Pd                      | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 46 - RAJA WANSE<br>WAKATOBI                     | KERAJAAN WANSE<br>WAKATOBI, SULTRA     |  |  |
| 32 | YM REVL IBRAHIM<br>ISKANDAR                          | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 51 - SULTAN BACAN<br>(AN mandat)                | KESULTANAN BACAN,<br>HALMAHERA SELATAN |  |  |
| 33 | YM RATNA DEWI<br>MUCLISA                             | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 54 - SULTAN BIMA<br>(AN mandat)                 | KESULTANAN BIMA, NTB                   |  |  |
| 34 | YM ABDUL WAHID                                       | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 55 - RAJA MARADIKA<br>MAMUJU (AN mandat)        | KERAJAAN MARADIKA<br>MAMUJU, SULBAR    |  |  |
| 35 | YM DR. KPH EDDY<br>WIRABHUMI, SH., MM.               | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)               | DPP 01 - KETUA UMUM<br>MAKN                        | KASUNANAN SURAKARTA<br>HADININGRAT     |  |  |

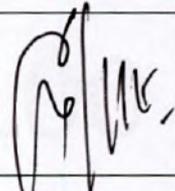
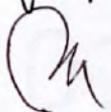
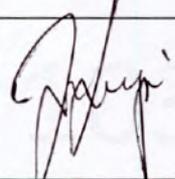
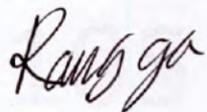
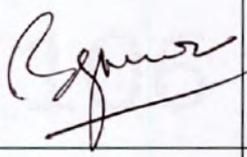
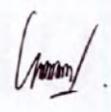
|    |   |   |   |  |   |  |
|----|---|---|---|--|---|--|
| 36 | YM DRA. Hj. R.AY YANI<br>WSS KUSWODIDJOJO   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 02- SEKJEN MAKN                       | KESULTANAN SUMENEP   |    |  |
| 37 | YM SEEM R. CANGGU,<br>SE., MM. RAJA DUAT<br>PERBANGSA KERAJAAN<br>ADAT PAKSI PAK SEKALA<br>BRAK, KEPAKSIAN<br>PERNONG | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 03 - KETUA 1 MAKN                     | KERAJAAN ADAT PAKSI<br>PAK SEKALA BRAK,<br>KEPAKSIAN PERNONG,<br>LAMPUNG |    |  |
| 38 | YM TB AMRI WARDHANA<br>SH., MH.   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 05 - KETUA 3 MAKN                     | KESULTANAN<br>SUROSOWAN, BANTEN  |    |  |
| 39 | YM Ir. H. LALU GAFAR<br>ISMAIL KERTANEGARA,<br>MM.  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 07 - KETUA 5 MAKN                     | KEDATUAN SELAPARANG<br>LOMBOK, NTB                                       |    |  |
| 40 | YM MOKOLE ANDI<br>MUSLIMIN MS SANGIA<br>PUSU, ST., M.PW., IAI   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 08 - KETUA 6 MAKN                     | KERAJAAN POLEANG<br>MORONENE, SULTRA                                     |    |  |
| 41 | YM ADJI RADEN<br>MOHAMMAD BAKHRUN   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 09 - KETUA 7 MAKN                     | KESULTANAN GUNUNG<br>TABUR, KALTIM                                       |   |  |
| 42 | YM KHAERUDIN JOJUGU   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 10 - KETUA 8 MAKN                     | KESULTANAN JAILOLO,<br>HALMAHERA BARAT                                   |  |  |
| 43 | YM RADEN PANJI AGOES<br>IRIANTO, SH   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 11 - WAKIL SEKJEN<br>MAKN             | KESULTANAN SUMENEP,<br>JATIM   |  |  |
| 44 | YM DIAH PURO<br>PAKUALAMAN  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)<br>(AN Mandat) | DPP 12 - WAKIL SEKJEN<br>MAKN (AN mandat) | PURO PAKUALAMAN,<br>YOGYAKARTA   |  |  |
| 45 | YM TITIE PRAPTI OETAMI  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 13 - BENDAHARA<br>UMUM MAKN           | KESULTANAN<br>SUMENEP/KEPAKSIAN<br>PERNONG SEKALA BRAK,<br>LAMPUNG       |  |  |
| 46 | YM RATU RAJA ARIMBI<br>NURTINA, S.T.  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 14 - WAKIL<br>BENDAHARA UMUM<br>MAKN  | KESULTANAN KANOMAN<br>CIREBON  |  |  |
| 47 | YM TONNY SARITUA<br>PURBA, SP.  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 15 - WAKIL<br>BENDAHARA UMUM<br>MAKN  | KERAJAAN PURBA<br>SIMALUNGUN   |  |  |

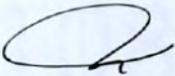
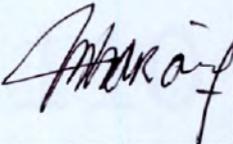
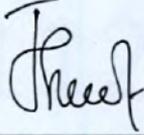
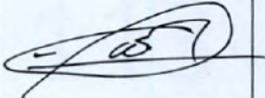
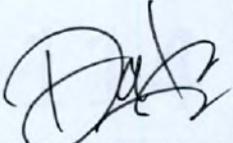
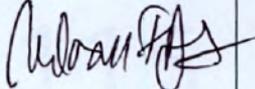
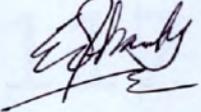
|    |  |   |   |  |   |  |
|----|--|---|---|--|---|--|
| 48 | YM BONTONA WANCE H<br>LA ANE PURU, S. Sos      | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 16 - WAKIL<br>BENDAHARA UMUM<br>MAKN                                      | KERAJAAN WANSE<br>WAKATOBI, SULTRA                 |    |  |
| 49 | YM Hj. RR. MIRA ENDAH<br>YULIANI, SE., MM.     | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 17 - ORGANISASI,<br>PROTOKOL, HUMAS<br>MAKN                               | KESULTANAN DOMPU, NTB                              |    |  |
| 50 | YM KRT KUSNO UTOMO<br>DININGRAT                | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)<br>(AN Mandat) | DPP 18 - ORGANISASI,<br>PROTOKOL, HUMAS<br>MAKN (AN mandat)                   | KASUNANAN SURAKARTA<br>HADININGRAT SOLO,<br>JATENG |    |  |
| 51 | YM MARGARETHA<br>BAMBA MANGIRI, SH.,<br>MP. AK | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 20 - ADVOKASI<br>HUKUM MAKN   | KERAJAAN KAPUANG<br>TORAJA                         |    |  |
| 52 | YM DONNA CONNIE<br>NISNONI                     | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 21 - MEDIA DAN<br>INFORMASI MAKN  | KERAJAAN KUPANG, NTT                               |    |  |
| 53 | YM DRS PRAMUDIYANTO                            | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)<br>(AN Mandat) | DPP AN mandat   |  |   |  |
| 54 | YM NURZEPTI<br>PALELAWAN                       | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)<br>(AN Mandat) | DPP 24 - CAGAR BUDAYA,<br>PERMUSEUMAN, DAN<br>SEJARAH (AN mandat)             | PURI KARANG ASEM, BALI                             |  |  |
| 55 | YM ANDI HIMAWATI<br>KEMALA IDJO, S. Sos        | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 25 - KEMARITIMAN,<br>PARIWISATA, SENI<br>BUDAYA, DAN ADAT<br>TRADISI MAKN | KERAJAAN GOWA, SULSEL                              |  |  |
| 56 | YM PANGERAN<br>HASMINTO DACHLAN,<br>SH., M. Si | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 27 - PENDIDIKAN,<br>SOSIAL, DAN<br>LINGKUNGAN HIDUP                       | KERAJAAN MEKONGGA,<br>SULTRA                       |  |  |
| 57 | YM NIKEN                                       | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)<br>(AN Mandat) | DPP 29 - PENDIDIKAN,<br>SOSIAL, DAN<br>LINGKUNGAN HIDUP (AN<br>mandat)        | KESULTANAN TERNATE,<br>MALUT                       |  |  |
| 58 | YM PANGERAN CEVI<br>YUSUF ISNENDAR             | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 30 - BISNIS,<br>INVESTASI, HUBUNGAN<br>LUAR NEGERI                        | KESULTANAN BANJAR,<br>SULSES                       |  |  |
| 59 | YM RADEN TYASTONO<br>AMBORO                    | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)<br>(AN Mandat) | DPP AN mandat   |  |  |  |

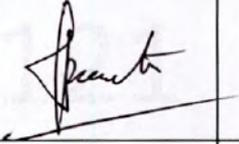
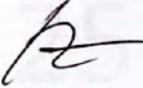
|    |   |                                  |   |                                    |   |  |
|----|---|----------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| 60 | YM PAHALA SAGALA,<br>SH., MH.   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP 33 - ADVOKASI<br>HUKUM                    |                                    |    |  |
| 61 | YM POCUT MERUAH<br>NENENG, SH., MH.   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP 34 - ORGANISASI,<br>KODE ETIK, KEROHANIAN | KERAJAAN ACEH<br>DARUSSALAM, ACEH  |    |  |
| 62 | YM KEMAS IWAN<br>SAPUTRA, S. Kom, SH.,<br>MH.   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP 36 - ADVOKASI<br>HUKUM                    |                                    |    |  |
| 63 | YM KANJENG MASAYU<br>POPPY ALMAYA<br>WERDININGRUM, M. Psi,<br>Psikolog, C.HT., M. NLP | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP 37 - ORGANISASI,<br>PROTOKOL, HUMAS       | KASUNANAN SURAKARTA<br>HADININGRAT |    |  |
| 64 | YM RADEN ARIA<br>SUDIYANTO<br>SATJAHDININGRAT, M.<br>Pd                               | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP - KEPALA<br>SEKRETARIAT MAKN<br>(KSM)     | KESULTANAN SUMENEP                 |    |  |
| 65 | YM BRIGJEN TNI MUNIF<br>PRASOJO, S. IP., M.Han  | DEWAN PAKAR<br>(DP)              | ANGGOTA DEWAN<br>PAKAR MAKN                   |                                    |   |  |
| 66 | YM PANGERAN MAS<br>BAYI RADEN SURYA<br>AGUS ALI IMRON                                 | DEWAN PAKAR<br>(DP)              | ANGGOTA DEWAN<br>PAKAR MAKN                   |                                    |  |  |
| 67 | YM DESY MELINDA<br>URSANTI  | DEWAN PAKAR<br>(DP)              | ANGGOTA DEWAN<br>PAKAR MAKN                   |                                    |  |  |
| 68 | YM DR. KMS HERMAN,<br>SH., M.H.   | BAKUM                            | KETUA BAKUM MAKN                              |                                    |  |  |
| 69 | YM MUHAMMAD<br>KARTIKA YUDHA  | BAKUM                            | ANGGOTA BAKUM MAKN                            |                                    |  |  |
| 70 | YM RM. PURWADI  | BAKUM                            | ANGGOTA BAKUM MAKN                            |                                    |  |  |
| 71 | YM IWAN SAPUTRA<br>IMRON  | BAKUM                            | ANGGOTA BAKUM MAKN                            |                                    |   |  |

|    |   |             |                    |                                   |   |  |
|----|---|-------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|
| 72 | YM KEMAS ANTONY                               | BAKUM       | ANGGOTA BAKUM MAKN |                                   |    |  |
| 73 | YM Dr. R.H. BAMBANG SRIWIJATNO, SH., MM., MH  | BAKUM       | ANGGOTA BAKUM MAKN |                                   |    |  |
| 74 | YM DATUK ADIL FREDY HABERHAM                  | DPW SUMUT   | DPW SUMUT          | KERAJAAN DELI MAIMUN              |   |  |
| 75 | YM PANGERAN SERDANG BADAGAI                   | DPW SUMUT   | DPW SUMUT          | KERAJAAN SENDANG BADAGAI          |    |  |
| 76 | YM SULISTIO Dt RAJO INDO, SH.                 | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         | KERAJAAN JAMBU LIPO               |   |  |
| 77 | YM YULIARDI PANGLIMO RAJO                     | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         |                                   |   |  |
| 78 | YM GUSHANADI, S. Pd., MH Dt RAJO KAYO         | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         |                                   |  |  |
| 79 | YM MARHASNIDA TUAN PUTRI ANCIK, S.Pd SIGUNTUR | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         | KERAJAAN SIGUNTUR                 |  |  |
| 80 | YM BOWO LEKSONO, SE., SH., MH.                | DPW LAMPUNG | DPW LAMPUNG        | KERAJAAN ADAT SEKALA BRAK PERNONG |  |  |
| 81 | YM RUDI PURNAWAN                              | DPW LAMPUNG | DPW LAMPUNG        |                                   |  |  |
| 82 | YM GUSTI MUHAMAD HADIANSYAH, ST., MT.         | DPW KALTENG | DPW KALTENG        |                                   |  |  |
| 83 | YM ESAMARTH AGUNG MAULANA                     | DPW KALTENG | DPW KALTENG        |                                   |  |  |

|    |   |            |   |                               |   |  |
|----|---|------------|---|-------------------------------|---|--|
| 84 | YM MUH. ARIF SONDA<br>KARAENG KULLE                 | DPW SULSEL | DEWAN KERAJAAN  |                               |    |  |
| 85 | YM ANDI MARDIANA WE<br>PADAULENG                    | DPW SULSEL | C. DEWAN KERAJAAN   |                               |    |  |
| 86 | YM H. ANDI<br>PARENRENGI, SH.                       | DPW SULSEL | WAKIL KETUA BID.<br>HUKUM                                 |                               |    |  |
| 87 | YM ANDI BASO ILYAS<br>OPU MALANRE, ST.              | DPW SULSEL | WAKIL KETUA BID.<br>PEMBERDAYAAN USAHA<br>EKONOMI KREATIF |                               |    |  |
| 88 | YM ANDI PATARAI A.<br>MANGINRURU ANDI IDJO          | DPW SULSEL | WAKIL SEKRETARIS  |                               |    |  |
| 89 | YM ANDI ILHAM<br>LATUNRA, M. Si                     | DPW SULSEL | WAKIL SEKRETARIS  |                               | 89  |  |
| 90 | YM ANDI BESSE KARINA<br>HAMID, ST.                  | DPW SULSEL | BENDAHARA   |                               |  |  |
| 91 | YM PROF. Dr. H. ANDI<br>AHMAD RUSLAN, SH.,<br>MH.   | DPW SULSEL | ADVOKASI HUKUM  |                               |  |  |
| 92 | YM ANDI RADIANTO, SH.,<br>MH.                       | DPW SULSEL | ADVOKASI HUKUM  |                               | 92  |  |
| 93 | YM PROF. Dr. ANDI<br>IBRAHIM, S. Ag., SS., M.<br>Pd | DPW SULSEL | DEWAN PAKAR   |                               |  |  |
| 94 | YM FENTJE DANIEL<br>MANOPPO                         | DPW SULUT  | DPW SULUT   | KERAJAAN BOLAANG<br>MONGONDOW |  |  |
| 95 | YM Dra. Hj. MUKU<br>MANOPPO, S.KM., S.Kes           | DPW SULUT  | DPW SULUT   |                               |  |  |

|     |   |                  |                               |                                |   |
|-----|---|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 96  | YM LAODE MUSAFI<br>KULISUSU                   | DK DPW SULTRA    | RAJA KULISUSU                 | KERAJAAN KULISUSU              |    |
| 97  | YM DR. Hj. SURIANA<br>GENDE MORONENE          | DPW SULTRA       | PENGURUS HARIAN DPW<br>SULTRA | KERAJAAN MORONENE              |    |
| 98  | YM H. AKSAN SASARI                            | DPW SULTRA       | PENGURUS HARIAN DPW<br>SULTRA |                                | 98  |
| 99  | YM LA ODE ARSAL                               | DPW SULTRA       | DPW SULTRA                    | KAPAITALAO KESULTANAN<br>BUTON | 99  |
| 100 | YM LAODE JABARU<br>BUTON                      | DPW SULTRA       | DPW SULTRA                    | KESULTANAN BUTON               |    |
| 101 | YM RIFLY M. KATILI A.P.,<br>S. Sos., M.Ec.Dev | DPW<br>GORONTALO | DPW GORONTALO                 |                                |   |
| 102 | YM ROSWATI<br>LASIMPALA., SH., MH.            | DPW<br>GORONTALO | DPW GORONTALO                 |                                |  |
| 103 | YM KAICIL ZULKIFLI., SE                       | DPW<br>GORONTALO | DPW GORONTALO                 |                                |  |
| 104 | YM RB. AGUNG SATRIO<br>PRABOWO AGSRIE, SH.    | DPW JATIM        | DPW JATIM                     | KESULTANAN SUMENEP             |  |
| 105 | YM RP. RANGGA Y.<br>MUCHEYZ PUTERA            | DPW JATIM        | DPW JATIM                     | KESULTANAN SUMENEP             |  |
| 106 | YM JAN BENYAMIN                               | DPW NTT          | KETUA DPW NTT                 | KERAJAAN BABAU                 |  |
| 107 | YM DONNA MALEDA<br>NISNONI                    | DPWNTT           | PENGURUS DPW NTT              | KERAJAAN KUPANG                |  |

|     |  |            |                      |                           |   |  |
|-----|--|------------|----------------------|---------------------------|---|--|
| 108 | YM HIZKIANA<br>YONATHAN AMABI<br>MINTARNINGSIH | DPW NTT    | PENGURUS DPW NTT     |                           |    |  |
| 109 | YM H.L. GEDE SYAMSUL<br>MUJAHIDIN              | DPW NTB    | KETUA HARIAN DPW NTB |                           |    |  |
| 110 | YM H.L. MAHDARAIN, ST.                         | DPW NTB    | PENGURUS DPW NTB     |                           |    |  |
| 111 | YM FREDY BENYAMIN<br>WAAS                      | DPW AMBON  | DK NEGERI HUTUMI     | KERAJAAN NEGERI<br>HUTUMI |    |  |
| 112 | YM JENSE TERESIA<br>LEIMENA                    | DPW AMBON  | DK NEGERI EMA        | KERAJAAN NEGERI EMA       |    |  |
| 113 | YM MICHAEL A.H.P. DE<br>QUELJOE                | DPW AMBON  | DK NEGERI KILANG     | KERAJAAN NEGERI KILANG    |   |  |
| 114 | YM DATJE TAHAPARY                              | DPW AMBON  | DK NEGERI AKOON      | KERAJAAN NEGERI AKOON     |  |  |
| 115 | YM T. ZULMIZAN F.<br>ASSAGAFF, SE., M.Si       | DPW KEPRI  | DPW KEPRI            |                           |  |  |
| 116 | YM. H. TENGGU<br>WAHIDUDIN                     | DPW KEPRI  | DPW KEPRI            |                           |  |  |
| 117 | YM EDY HANAFI                                  | DPW KEPRI  | DPW KEPRI            |                           |  |  |
| 118 | YM TUBAGUS ASHABUL<br>ZAM ZAM                  | DPW BANTEN | DPW BANTEN           |                           |  |  |
| 119 | YM TUBAGUS ANTON<br>MASHURI                    | DPW BANTEN | DPW BANTEN           |                           |  |  |

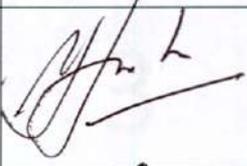
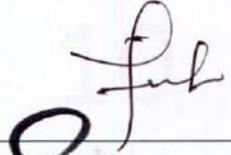
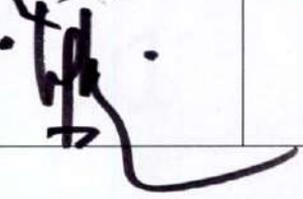
|     |                                 |                  |                  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| 120 | YM TUBAGUS KRISNA BAYU          | DPW BANTEN       | DPW BANTEN       |  |   |  |
| 121 | YM Rd. ENDY SETIADJI            | DPW JABAR        | DPW JABAR        |  |   |  |
| 122 | YM Rd. AYKE SEPTIAWAN           | DPW JABAR        | DPW JABAR        |  |   |  |
| 123 | YM NI Rd. RINA RINIANTI         | DPW JABAR        | DPW JABAR        |  |   |  |
| 124 | YM YANUARDI SYUKUR, M.Si        | DPW MALUKU UTARA | DPW MALUKU UTARA |  |   |  |
| 125 | YM ISKANDAR ZULKARNAIN JO MAYOR | DPW MALUKU UTARA | DPW MALUKU UTARA |  |  |  |

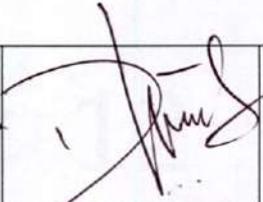
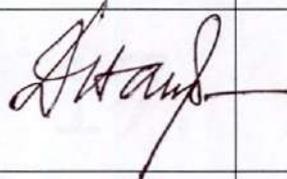
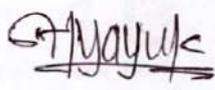
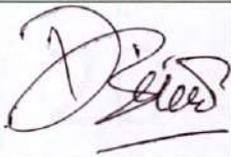
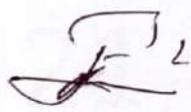
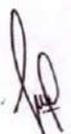
|     |   |  |   |                                    |     |
|-----|---|--|---|------------------------------------|-----|
| 126 | YM DATUK ADIL FREDY HABERHAM              | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT<br>(AN Mandat) | DK 10 - SULTAN DELI (AN mandat)                             | KESULTANAN DELI, SUMUT             | 126 |
| 127 | YM LA ODE ANAS                            | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT<br>(AN Mandat) | DK 46 - RAJA WANSE WAKATOBI<br>(AN mandat)                  | KERAJAAN WANSE WAKATOBI,<br>SULTRA | 127 |
| 128 | YM DRS. K.H. A. BUSYRO KARIM, M.<br>SI    | DEWAN PAKAR (DP)                         | ANGGOTA DEWAN PAKAR MAKN                                    | KESULTANAN SUMENEP                 | 128 |
| 129 | YM REZA FAUZI RAHMAN, SH.                 | BAKUM                                    | ANGGOTA BAKUM MAKN  |                                    | 129 |
| 130 | YM ANDI LUH ALANG                         | DPW SULSEL                               | ANGGOTA BID.<br>KEMARITIMAN, PARIWISATA, DAN<br>SENI BUDAYA |                                    | 130 |
| 131 | YM ANDI AKBAR MAPPEWALI,<br>A.Ptnh., M.H. | DPW SULSEL                               | ANGGOTA BID. INVESTASI DAN<br>KERJASAMA                     |                                    | 131 |
| 132 | YM LA ODE USMAN BAGABASE                  | DPW SULTRA                               | DPW SULTRA  |                                    | 132 |
| 133 | YM KP ISMO                                | DPW JATENG                               | DPW JATENG  | KASUNANAN SURAKARTA                | 133 |
| 134 | ISTRI BUSYRO                              |  |   |                                    | 134 |
| 135 | WINI                                      |  |   |                                    | 135 |
| 136 | ADITYO                                    |  |   |                                    | 136 |
| 137 | ADRI                                      |  |   |                                    | 137 |
| 138 | ISTRI AMRI WARDHANA                       |  |   |                                    | 138 |

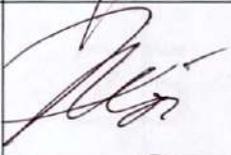
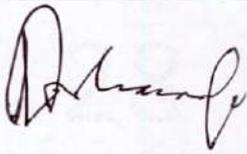
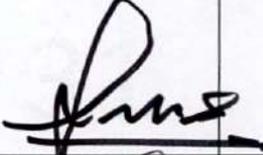
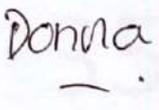
|     |           |  |  |  |     |
|-----|-----------|--|--|--|-----|
| 139 | ROSNAWATI |  |  |  | 139 |
| 140 | KURNIASIH |  |  |  | 140 |
| 141 | ANJAR     |  |  |  | 141 |

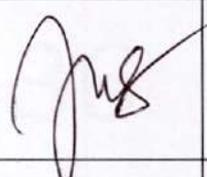
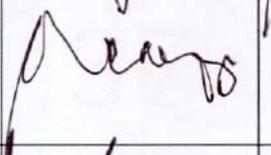
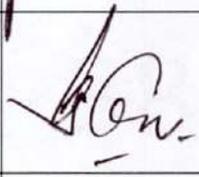
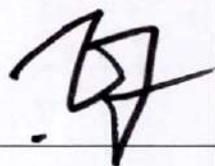
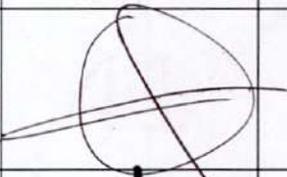
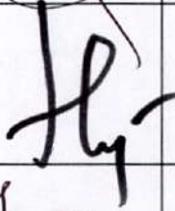
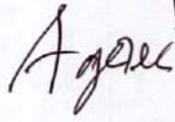
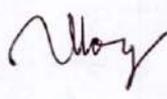
*Ata*

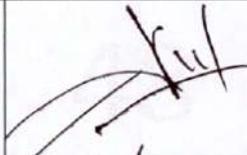
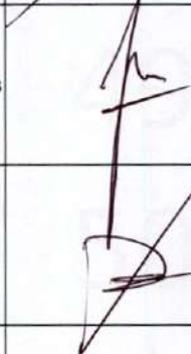
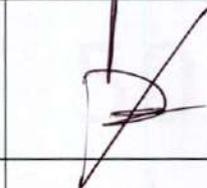
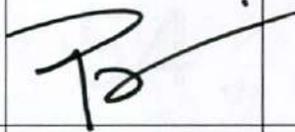
Daftar Hadir Peserta  
Kamis, 22 September 2022  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan  
Anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)

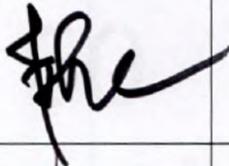
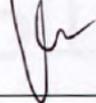
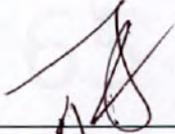
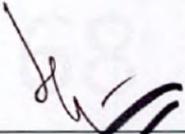
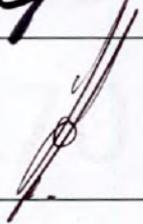
| No | Nama   | Unsur  | Jabatan   | Asal Kerajaan/DK   | Tanda tangan  | Kamar |
|----|--|--|---|--|---|-------|
| 1  | PYM SPDB DRS.<br>EDWARDS SYAH<br>PERNONG, SH. M.H.   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 02 - SULTAN SEKALA<br>BRAK YANG DIPERTUAN<br>KE-23 | KERAJAAN ADAT PAKSI<br>PAK SEKALA BRAK,<br>KEPAKSIAN PERNONG,<br>LAMPUNG |   |       |
| 2  | PYM SRI RADYA I<br>LUKMAN<br>SOEMADISOERIA   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 03 - RAJA SUMEDANG<br>LARANG                       | KERATON SUMEDANG<br>LARANG, JABAR  |    |       |
| 3  | YM KPH GUSTI INDRO<br>KUSUMO   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 04 - RAJA PAKU<br>ALAMAN X (AN Mandat)             | PURO PAKU ALAMAN,<br>YOGYAKARTA  |    |       |
| 4  | PYM RADEN PANJI<br>MUCH. MUCHTAR<br>ATMOKUSUMO, M. AK  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 05 - PEMANGKU ADAT<br>KESULTANAN SUMENEP           | KESULTANAN SUMENEP,<br>JATIM   |    |       |
| 5  | PYM LEOPOLD NICHOLAS<br>NISNONI, BBA   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 06 - RAJA KERAJAAN<br>KUPANG                       | KERAJAAN KUPANG, NTT   |   |       |
| 6  | PYM SULTAN H. ADJI<br>BACHRUL HADIE, SH.,<br>MBA   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 07 - SULTAN<br>KESULTANAN GUNUNG<br>TABUR          | KESULTANAN GUNUNG<br>TABUR, KALTIM                                       |  |       |
| 7  | PYM ANDI KEMALA IDJO<br>DAENG SILA, SH.<br>KARAENG LEMBANG<br>PARANG BATARA GOWA<br>III SULTAN MALIKUSSAID<br>II | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 08 - RAJA GOWA<br>XXXVIII                          | KERAJAAN GOWA, SULSEL  |   |       |
| 8  | PYM ACHMAD SYAH  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 09 - SULTAN JAILOLO                                | KESULTANAN JAILOLO,<br>HALMAHERA BARAT                                   |  |       |
| 9  | PYM TUANKU MAHMUD<br>ARIA LAMANTJJI<br>PERKASA ALAM SYAH   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 10 - SULTAN DELI                                   | KESULTANAN DELI, SUMUT   |   |       |
| 10 | PYM TUANKU RAJO<br>GODANG FIRMAN<br>BAGINDO TAN AMEH   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 11 - RAJA ALAM<br>JAMBO LIPO                       | KERAJAAN JAMBO LIPO,<br>SUMBAR   |  |       |
| 11 | YM KASHAR HAROEN<br>TENGGU PANGERAN  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 13 - SULTAN<br>PALELAWAN (AN<br>mandat)            | KESULTANAN PALELAWAN,<br>RIAU  |  |       |

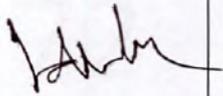
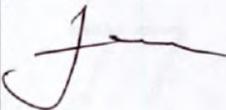
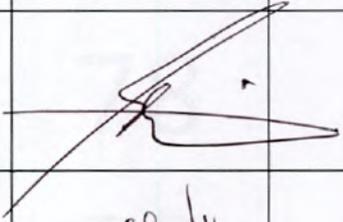
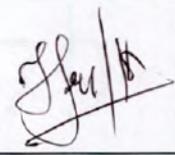
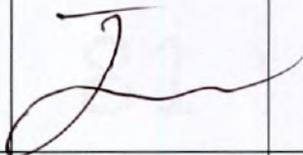
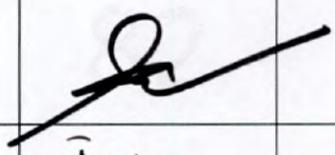
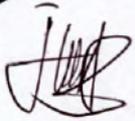
|    |  |  |  |   |   |  |
|----|--|--|--|---|---|--|
| 12 | YM DHIMAS JUNIO<br>NARASHIMARAO, S. Ked  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 14 - PUTRA RAJA<br>DOMPU (AN mandat)                              | KESULTANAN DOMPU, NTB                               |     |  |
| 13 | PYM ST YUDHI<br>PRAYOGO, SE., MEI.<br>SULTAN INDERA<br>RAHIMSYAH DAULAT<br>SULTAN MUHAMMAD<br>SYAH | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 15 - SULTAN<br>INDERAPURA   | KESULTANAN<br>INDERAPURA, SUMBAR                    |    |  |
| 14 | YM GKRA TIMOER   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 17 - RAJA<br>KASUNANAN<br>SURAKARTA<br>HADININGRAT (AN<br>mandat) | KASUNANAN SURAKARTA<br>HADININGRAT, SOLO,<br>JATENG | Donna   |  |
| 15 | YM DRA. GRAY KOES<br>MOERTIYAH, M. Pd  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 18 - KETUA LDA KSA  | KASUNANAN SURAKARTA<br>HADININGRAT, SOLO,<br>JATENG | Donna   |  |
| 16 | PYM P. HANDI, SE. MM.<br>RAJA KAPRABON XI  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 21 - RAJA<br>KAPRABONNAN  | KERATON KAPRABONAN<br>CIREBON, JABAR                |    |  |
| 17 | PYM PEMANGKU SULTAN<br>DATU ABDUL HAMID  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 23 - PEMANGKU<br>SULTAN KESULTANAN<br>BULUNGAN                    | KESULTANAN BULUNGAN,<br>KALTARA                     |   |  |
| 18 | YM INDA PANGGIAN   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 25 - RAJA<br>KESULTANAN<br>SAMBALIUNG (AN<br>mandat)              | KESULTANAN<br>SAMBALIUNG, KALTIM                    |   |  |
| 19 | YM SRI RAHAYU<br>KURNIASIH   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 26 - SULTAN<br>KUTAWARINGIN (AN<br>mandat)                        | KESULTANAN<br>KUTAWARINGIN, KALTENG                 |  |  |
| 20 | PYM DECKY TANASALE   | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 28 - RAJA LEINITU   | KERAJAAN LEINITU,<br>MALUKU                         |  |  |
| 21 | PYM ARIEF RUMAGESAN  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT                | DK 29 - RAJA SEKAR<br>FAKFAK   | KERAJAAN SEKAR FAKFAK,<br>PAPUA BARAT               |  |  |
| 22 | YM PANGERAN RAJA<br>RUSLAN, SH., M.Kn  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 30 - SULTAN<br>KACIREBONAN IX (AN<br>mandat)                      | KERATON KACIREBONAN,<br>JABAR                       |   |  |
| 23 | YM POCUT MERIAH<br>ZAKIYAH SAFIATUNNISA  | DEWAN<br>KERAJAAN (DK)<br>PUSAT (AN<br>Mandat) | DK 31 - SULTAN ACEH<br>DARUSSALAM (AN<br>mandat)                     | KESULTANAN ACEH<br>DARUSSALAM, ACEH                 |  |  |

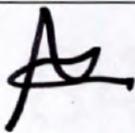
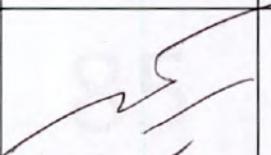
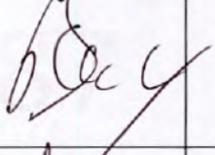
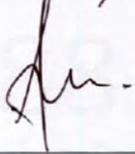
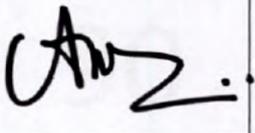
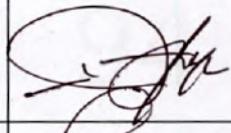
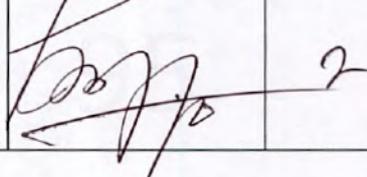
|    |  |                                       |  |                                     |   |  |
|----|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| 24 | YM WIRDA ANATANIA MAHA RATU SURO MAHKOTA AGUNG | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 35 - SULTAN KOTA PONTIANAK IX (AN mandat) | ISTANA KADRIAH KESULTANAN PONTIANAK |     |  |
| 25 | PYM YESAYA ROBERT MAURITS KOROH                | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 36 - RAJA AMARASI                         | KERAJAAN AMARASI, NTT               |    |  |
| 26 | PYM VICOAS TB AMALOS.                          | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 37 - RAJA NUSAK TERMANU ROTE              | KERAJAAN NUSAK TERMANU ROTE, NTT    |    |  |
| 27 | PYM DRS H. KHAERUN DAHLAN, MM.                 | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 40 - RAJA MEKONGGA                        | KERAJAAN MEKONGGA, SULTRA           |    |  |
| 28 | PYM DR. LA ODE MUHAMMAD IZZAT MANA'ARFA, M. SI | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 41 - SULTAN BUTON                         | KESULTANAN BUTON, SULTRA            |    |  |
| 29 | PYM ANDI BASO HAMID PABENTENG RAJABONE XXXV    | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 42 - RAJA BONE XXXV                       | KERAJAAN BONE, SULSEL               |   |  |
| 30 | YM MEGA LANDON RUNDING                         | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 44 - RATU PUANG BALUSU TORUT (AN mandat)  | KERAJAAN PUANG BALUSU TORUT, SULSEL |   |  |
| 31 | PYM LA ODE SARIFUDDIN, S. Pd                   | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT             | DK 46 - RAJA WANSE WAKATOBI                  | KERAJAAN WANSE WAKATOBI, SULTRA     |  |  |
| 32 | YM REVLI IBRAHIM ISKANDAR                      | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 51 - SULTAN BACAN (AN mandat)             | KESULTANAN BACAN, HALMAHERA SELATAN |  |  |
| 33 | YM RATNA DEWI MUCLISA                          | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 54 - SULTAN BIMA (AN mandat)              | KESULTANAN BIMA, NTB                |  |  |
| 34 | YM ABDUL WAHID                                 | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT (AN Mandat) | DK 55 - RAJA MARADIKA MAMUJU (AN mandat)     | KERAJAAN MARADIKA MAMUJU, SULBAR    |  |  |
| 35 | YM DR. KPH EDDY WIRABHUMI, SH., MM.            | DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)            | DPP 01 - KETUA UMUM MAKN                     | KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT     |  |  |

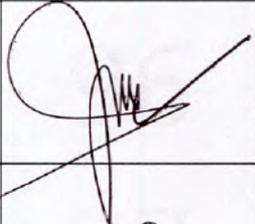
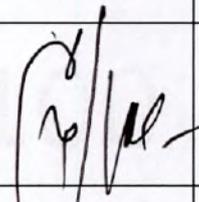
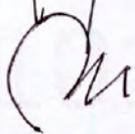
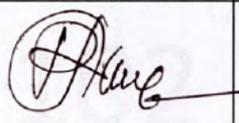
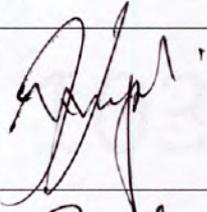
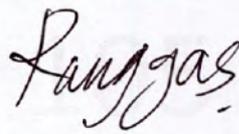
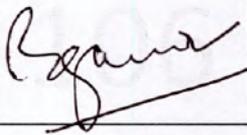
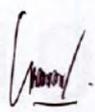
|    |   |   |   |  |   |  |
|----|---|---|---|--|---|--|
| 36 | YM DRA. Hj. R.AY YANI<br>WSS KUSWODIDJOJO   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 02 - SEKJEN MAKN                      | KESULTANAN SUMENEP   |    |  |
| 37 | YM SEEM R. CANGGU,<br>SE., MM. RAJA DUAT<br>PERBANGSA KERAJAAN<br>ADAT PAKSI PAK SEKALA<br>BRAK, KEPAKSIAN<br>PERNONG | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 03 - KETUA 1 MAKN                     | KERAJAAN ADAT PAKSI<br>PAK SEKALA BRAK,<br>KEPAKSIAN PERNONG,<br>LAMPUNG |    |  |
| 38 | YM TB AMRI WARDHANA<br>SH., MH.   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 05 - KETUA 3 MAKN                     | KESULTANAN<br>SUROSOWAN, BANTEN  |    |  |
| 39 | YM Ir. H. LALU GAFAR<br>ISMAIL KERTANEGARA,<br>MM.  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 07 - KETUA 5 MAKN                     | KEDATUAN SELAPARANG<br>LOMBOK, NTB                                       |    |  |
| 40 | YM MOKOLE ANDI<br>MUSLIMIN MS SANGIA<br>PUSU, ST., M.PW., IAI   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 08 - KETUA 6 MAKN                     | KERAJAAN POLEANG<br>MORONENE, SULTRA                                     |   |  |
| 41 | YM ADJI RADEN<br>MOHAMMAD BAKHRUN   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 09 - KETUA 7 MAKN                     | KESULTANAN GUNUNG<br>TABUR, KALTIM                                       |   |  |
| 42 | YM KHAERUDIN JOJUGU   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 10 - KETUA 8 MAKN                     | KESULTANAN JAILOLO,<br>HALMAHERA BARAT                                   |  |  |
| 43 | YM RADEN PANJI AGOES<br>IRIANTO, SH   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 11 - WAKIL SEKJEN<br>MAKN             | KESULTANAN SUMENEP,<br>JATIM   |  |  |
| 44 | YM DIAH PURO<br>PAKUALAMAN  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)<br>(AN Mandat) | DPP 12 - WAKIL SEKJEN<br>MAKN (AN mandat) | PURO PAKUALAMAN,<br>YOGYAKARTA   |   |  |
| 45 | YM TITIE PRAPTI OETAMI  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 13 - BENDAHARA<br>UMUM MAKN           | KESULTANAN<br>SUMENEP/KEPAKSIAN<br>PERNONG SEKALA BRAK,<br>LAMPUNG       |   |  |
| 46 | YM RATU RAJA ARIMBI<br>NURTINA, S.T.  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 14 - WAKIL<br>BENDAHARA UMUM<br>MAKN  | KESULTANAN KANOMAN<br>CIREBON  |   |  |
| 47 | YM TONNY SARITUA<br>PURBA, SP.  | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 15 - WAKIL<br>BENDAHARA UMUM<br>MAKN  | KERAJAAN PURBA<br>SIMALUNGUN   |  |  |

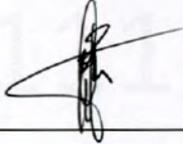
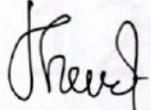
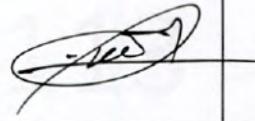
|    |  |   |   |  |   |   |
|----|--|---|---|--|---|---|
| 48 | YM BONTONA WANCE H<br>LA ANE PURU, S. Sos      | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 16 -WAKIL<br>BENDAHARA UMUM<br>MAKN                                       | KERAJAAN WANSE<br>WAKATOBI, SULTRA                 |    |   |
| 49 | YM Hj. RR. MIRA ENDAH<br>YULIANI, SE., MM.     | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 17 - ORGANISASI,<br>PROTOKOL, HUMAS<br>MAKN                               | KESULTANAN DOMPU, NTB                              |    |   |
| 50 | YM KRT KUSNO UTOMO<br>DININGRAT                | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)<br>(AN Mandat) | DPP 18 - ORGANISASI,<br>PROTOKOL, HUMAS<br>MAKN (AN mandat)                   | KASUNANAN SURAKARTA<br>HADININGRAT SOLO,<br>JATENG |    |   |
| 51 | YM MARGARETHA<br>BAMBA MANGIRI, SH.,<br>MP. AK | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 20 - ADVOKASI<br>HUKUM MAKN   | KERAJAAN KAPUANG<br>TORAJA                         |    |   |
| 52 | YM DONNA CONNIE<br>NISNONI                     | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 21 - MEDIA DAN<br>INFORMASI MAKN  | KERAJAAN KUPANG, NTT                               |    |   |
| 53 | YM DRS PRAMUDIYANTO                            | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)<br>(AN Mandat) | DPP AN mandat   |  |   |   |
| 54 | YM NURZEPTI<br>PALELAWAN                       | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)<br>(AN Mandat) | DPP 24 - CAGAR BUDAYA,<br>PERMUSEUMAN, DAN<br>SEJARAH (AN mandat)             | PURI KARANG ASEM, BALI                             |  |   |
| 55 | YM ANDI HIMAWATI<br>KEMALA IDJO, S. Sos        | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 25 - KEMARITIMAN,<br>PARIWISATA, SENI<br>BUDAYA, DAN ADAT<br>TRADISI MAKN | KERAJAAN GOWA, SULSEL                              |   |   |
| 56 | YM PANGERAN<br>HASMINTO DACHLAN,<br>SH., M. Si | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 27 - PENDIDIKAN,<br>SOSIAL, DAN<br>LINGKUNGAN HIDUP                       | KERAJAAN MEKONGGA,<br>SULTRA                       |  |   |
| 57 | YM NIKEN                                       | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)<br>(AN Mandat) | DPP 29 - PENDIDIKAN,<br>SOSIAL, DAN<br>LINGKUNGAN HIDUP (AN<br>mandat)        | KESULTANAN TERNATE,<br>MALUT                       |  | 2 |
| 58 | YM PANGERAN CEVI<br>YUSUF ISNENDAR             | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)                | DPP 30 - BISNIS,<br>INVESTASI, HUBUNGAN<br>LUAR NEGERI                        | KESULTANAN BANJAR,<br>SULSES                       |  |   |
| 59 | YM RADEN TYASTONO<br>AMBORO                    | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP)<br>(AN Mandat) | DPP AN mandat   |  |   |   |

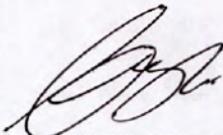
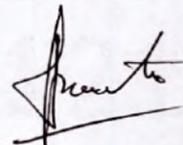
|    |   |                                  |   |                                    |   |  |
|----|---|----------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| 60 | YM PAHALA SAGALA,<br>SH., MH.   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP 33 - ADVOKASI<br>HUKUM                    |                                    |    |  |
| 61 | YM POCUT MERUAH<br>NENENG, SH., MH.   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP 34 - ORGANISASI,<br>KODE ETIK, KEROHANIAN | KERAJAAN ACEH<br>DARUSSALAM, ACEH  |    |  |
| 62 | YM KEMAS IWAN<br>SAPUTRA, S. Kom, SH.,<br>MH.   | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP 36 - ADVOKASI<br>HUKUM                    |                                    |    |  |
| 63 | YM KANJENG MASAYU<br>POPPY ALMAYA<br>WERDININGRUM, M. Psi,<br>Psikolog, C.HT., M. NLP | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP 37 - ORGANISASI,<br>PROTOKOL, HUMAS       | KASUNANAN SURAKARTA<br>HADININGRAT |    |  |
| 64 | YM RADEN ARIA<br>SUDIYANTO<br>SATJAH DININGRAT, M.<br>Pd                              | DEWAN<br>PENGURUS<br>PUSAT (DPP) | DPP - KEPALA<br>SEKRETARIAT MAKN<br>(KSM)     | KESULTANAN SUMENEP                 |    |  |
| 65 | YM BRIGIEN TNI MUNIF<br>PRASOJO, S. IP., M.Han  | DEWAN PAKAR<br>(DP)              | ANGGOTA DEWAN<br>PAKAR MAKN                   |                                    |   |  |
| 66 | YM PANGERAN MAS<br>BAYI RADEN SURYA<br>AGUS ALI IMRON                                 | DEWAN PAKAR<br>(DP)              | ANGGOTA DEWAN<br>PAKAR MAKN                   |                                    |  |  |
| 67 | YM DESY MELINDA<br>URSANTI  | DEWAN PAKAR<br>(DP)              | ANGGOTA DEWAN<br>PAKAR MAKN                   |                                    |  |  |
| 68 | YM DR. KMS HERMAN,<br>SH., M.H.   | BAKUM                            | KETUA BAKUM MAKN                              |                                    |  |  |
| 69 | YM MUHAMMAD<br>KARTIKA YUDHA  | BAKUM                            | ANGGOTA BAKUM MAKN                            |                                    |  |  |
| 70 | YM RM. PURWADI  | BAKUM                            | ANGGOTA BAKUM MAKN                            |                                    |  |  |
| 71 | YM IWAN SAPUTRA<br>IMRON  | BAKUM                            | ANGGOTA BAKUM MAKN                            |                                    |  |  |

|    |   |             |                    |                                   |   |  |
|----|---|-------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|
| 72 | YM KEMAS ANTONY                               | BAKUM       | ANGGOTA BAKUM MAKN |                                   |    |  |
| 73 | YM Dr. R.H. BAMBANG SRIWIJATNO, SH., MM., MH  | BAKUM       | ANGGOTA BAKUM MAKN |                                   |    |  |
| 74 | YM DATUK ADIL FREDY HABERHAM                  | DPW SUMUT   | DPW SUMUT          | KERAJAAN DELI MAIMUN              | 74  |  |
| 75 | YM PANGERAN SERDANG BADAGAI                   | DPW SUMUT   | DPW SUMUT          | KERAJAAN SENDANG BADAGAI          |    |  |
| 76 | YM SULISTIO Dt RAJO INDO, SH.                 | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         | KERAJAAN JAMBU LIPO               | 76  |  |
| 77 | YM YULIARDI PANGLIMO RAJO                     | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         |                                   |   |  |
| 78 | YM GUSHANADI, S. Pd., MH Dt RAJO KAYO         | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         |                                   |  |  |
| 79 | YM MARHASNIDA TUAN PUTRI ANCIK, S.Pd SIGUNTUR | DPW SUMBAR  | DPW SUMBAR         | KERAJAAN SIGUNTUR                 |  |  |
| 80 | YM BOWO LEKSONO, SE., SH., MH.                | DPW LAMPUNG | DPW LAMPUNG        | KERAJAAN ADAT SEKALA BRAK PERNONG |  |  |
| 81 | YM RUDI PURNAWAN                              | DPW LAMPUNG | DPW LAMPUNG        |                                   |  |  |
| 82 | YM GUSTI MUHAMAD HADIANSYAH, ST., MT.         | DPW KALTENG | DPW KALTENG        |                                   |  |  |
| 83 | YM ESAMARTH AGUNG MAULANA                     | DPW KALTENG | DPW KALTENG        |                                   |  |  |

|    |   |            |   |                               |   |   |
|----|---|------------|---|-------------------------------|---|---|
| 84 | YM MUH. ARIF SONDA<br>KARAENG KULLE                 | DPW SULSEL | DEWAN KERAJAAN  |                               |    |   |
| 85 | YM ANDI MARDIANA WE<br>PADAULENG                    | DPW SULSEL | C. DEWAN KERAJAAN   |                               |    |   |
| 86 | YM H. ANDI<br>PARENRENGI, SH.                       | DPW SULSEL | WAKIL KETUA BID.<br>HUKUM                                 |                               |    |   |
| 87 | YM ANDI BASO ILYAS<br>OPU MALANRE, ST.              | DPW SULSEL | WAKIL KETUA BID.<br>PEMBERDAYAAN USAHA<br>EKONOMI KREATIF |                               |    |   |
| 88 | YM ANDI PATARAI A.<br>MANGINRURU ANDI IDJO          | DPW SULSEL | WAKIL SEKRETARIS  |                               |    |   |
| 89 | YM ANDI ILHAM<br>LATUNRA, M. Si                     | DPW SULSEL | WAKIL SEKRETARIS  |                               |   |   |
| 90 | YM ANDI BESSE KARINA<br>HAMID, ST.                  | DPW SULSEL | BENDAHARA   |                               |  |   |
| 91 | YM PROF. Dr. H. ANDI<br>AHMAD RUSLAN, SH.,<br>MH.   | DPW SULSEL | ADVOKASI HUKUM  |                               |  |   |
| 92 | YM ANDI RADIANTO, SH.,<br>MH.                       | DPW SULSEL | ADVOKASI HUKUM  |                               |  |   |
| 93 | YM PROF. Dr. ANDI<br>IBRAHIM, S. Ag., SS., M.<br>Pd | DPW SULSEL | DEWAN PAKAR   |                               |  |   |
| 94 | YM FENTJE DANIEL<br>MANOPPO                         | DPW SULUT  | DPW SULUT   | KERAJAAN BOLAANG<br>MONGONDOW |  |   |
| 95 | YM Dra. Hj. MUKU<br>MANOPPO, S.KM., S.Kes           | DPW SULUT  | DPW SULUT   |                               |  | 2 |

|     |   |                  |                               |                                |   |  |
|-----|---|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 96  | YM LAODE MUSAFI<br>KULISUSU                   | DK DPW SULTRA    | RAJA KULISUSU                 | KERAJAAN KULISUSU              |    |  |
| 97  | YM DR. HJ. SURIANA<br>GENDE MORONENE          | DPW SULTRA       | PENGURUS HARIAN DPW<br>SULTRA | KERAJAAN MORONENE              |    |  |
| 98  | YM H. AKSAN SASARI                            | DPW SULTRA       | PENGURUS HARIAN DPW<br>SULTRA |                                | 98  |  |
| 99  | YM LA ODE ARSAL                               | DPW SULTRA       | DPW SULTRA                    | KAPAITALAO KESULTANAN<br>BUTON | 99  |  |
| 100 | YM LAODE JABARU<br>BUTON                      | DPW SULTRA       | DPW SULTRA                    | KESULTANAN BUTON               |    |  |
| 101 | YM RIFLY M. KATILI A.P.,<br>S. Sos., M.Ec.Dev | DPW<br>GORONTALO | DPW GORONTALO                 |                                |   |  |
| 102 | YM ROSWATI<br>LASIMPALA., SH., MH.            | DPW<br>GORONTALO | DPW GORONTALO                 |                                |  |  |
| 103 | YM KAICIL ZULKIFLI., SE                       | DPW<br>GORONTALO | DPW GORONTALO                 |                                |  |  |
| 104 | YM RB. AGUNG SATRIO<br>PRABOWO AGSRIE, SH.    | DPW JATIM        | DPW JATIM                     | KESULTANAN SUMENEP             |  |  |
| 105 | YM RP. RANGGA Y.<br>MUCHEYZ PUTERA            | DPW JATIM        | DPW JATIM                     | KESULTANAN SUMENEP             |  |  |
| 106 | YM JAN BENYAMIN                               | DPW NTT          | KETUA DPW NTT                 | KERAJAAN BABAU                 |  |  |
| 107 | YM DONNA MALEDA<br>NISNONI                    | DPWNTT           | PENGURUS DPW NTT              | KERAJAAN KUPANG                |  |  |

|     |  |            |                      |                           |   |  |
|-----|--|------------|----------------------|---------------------------|---|--|
| 108 | YM HIZKIANA<br>YONATHAN AMABI<br>MINTARNINGSIH | DPW NTT    | PENGURUS DPW NTT     |                           |    |  |
| 109 | YM H.L. GEDE SYAMSUL<br>MUJAHIDIN              | DPW NTB    | KETUA HARIAN DPW NTB |                           | 109   |  |
| 110 | YM H.L. MAHDARAIN, ST.                         | DPW NTB    | PENGURUS DPW NTB     |                           |    |  |
| 111 | YM FREDY BENYAMIN<br>WAAS                      | DPW AMBON  | DK NEGERI HUTUMI     | KERAJAAN NEGERI<br>HUTUMI |    |  |
| 112 | YM JENSE TERESIA<br>LEIMENA                    | DPW AMBON  | DK NEGERI EMA        | KERAJAAN NEGERI EMA       |    |  |
| 113 | YM MICHAEL A.H.P. DE<br>QUELJOE                | DPW AMBON  | DK NEGERI KILANG     | KERAJAAN NEGERI KILANG    |   |  |
| 114 | YM DATJE TAHAPARY                              | DPW AMBON  | DK NEGERI AKOON      | KERAJAAN NEGERI AKOON     |  |  |
| 115 | YM T. ZULMIZAN F.<br>ASSAGAFF, SE., M.Si       | DPW KEPRI  | DPW KEPRI            |                           |  |  |
| 116 | YM. H. TENGGU<br>WAHIDUDIN                     | DPW KEPRI  | DPW KEPRI            |                           |  |  |
| 117 | YM EDY HANAFI                                  | DPW KEPRI  | DPW KEPRI            |                           |  |  |
| 118 | YM TUBAGUS ASHABUL<br>ZAM ZAM                  | DPW BANTEN | DPW BANTEN           |                           | 118   |  |
| 119 | YM TUBAGUS ANTON<br>MASHURI                    | DPW BANTEN | DPW BANTEN           |                           | 119   |  |

|     |                                    |                     |                  |  |  |  |
|-----|------------------------------------|---------------------|------------------|--|--|--|
| 120 | YM TUBAGUS KRISNA<br>BAYU          | DPW BANTEN          | DPW BANTEN       |  |   |  |
| 121 | YM Rd. ENDY SETIADJI               | DPW JABAR           | DPW JABAR        |  |   |  |
| 122 | YM Rd. AYKE SEPTIAWAN              | DPW JABAR           | DPW JABAR        |  |   |  |
| 123 | YM NI Rd. RINA RINIANTI            | DPW JABAR           | DPW JABAR        |  |  |  |
| 124 | YM YANUARDI SYUKUR,<br>M.Si        | DPW MALUKU<br>UTARA | DPW MALUKU UTARA |  |   |  |
| 125 | YM ISKANDAR<br>ZULKARNAIN JO MAYOR | DPW MALUKU<br>UTARA | DPW MALUKU UTARA |  |  |  |

|     |   |  |   |                                    |     |
|-----|---|--|---|------------------------------------|-----|
| 126 | YM DATUK ADIL FREDY HABERHAM              | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT<br>(AN Mandat) | DK 10 - SULTAN DELI (AN mandat)                             | KESULTANAN DELI, SUMUT             | 126 |
| 127 | YM LA ODE ANAS                            | DEWAN KERAJAAN (DK) PUSAT<br>(AN Mandat) | DK 46 - RAJA WANSE WAKATOBI<br>(AN mandat)                  | KERAJAAN WANSE WAKATOBI,<br>SULTRA | 127 |
| 128 | YM DRs. K.H. A. BUSYRO KARIM, M.<br>Si    | DEWAN PAKAR (DP)                         | ANGGOTA DEWAN PAKAR MAKN                                    | KESULTANAN SUMENEP                 | 128 |
| 129 | YM REZA FAUZI RAHMAN, SH.                 | BAKUM                                    | ANGGOTA BAKUM MAKN  |                                    | 129 |
| 130 | YM ANDI LUH ALANG                         | DPW SULSEL                               | ANGGOTA BID.<br>KEMARITIMAN, PARIWISATA, DAN<br>SENI BUDAYA |                                    | 130 |
| 131 | YM ANDI AKBAR MAPPEWALI,<br>A.Ptnh., M.H. | DPW SULSEL                               | ANGGOTA BID. INVESTASI DAN<br>KERJASAMA                     |                                    | 131 |
| 132 | YM LA ODE USMAN BAGABASE                  | DPW SULTRA                               | DPW SULTRA  |                                    | 132 |
| 133 | YM KP ISMO                                | DPW JATENG                               | DPW JATENG  | KASUNANAN SURAKARTA                | 133 |
| 134 | ISTRI BUSYRO                              |  |   |                                    | 134 |
| 135 | WINI                                      |  |   |                                    | 135 |
| 136 | ADITYO                                    |  |   |                                    | 136 |
| 137 | ADRI                                      |  |   |                                    | 137 |
| 138 | ISTRI AMRI WARDHANA                       |  |   |                                    | 138 |

|     |           |  |  |  |     |
|-----|-----------|--|--|--|-----|
| 139 | ROSNAWATI |  |  |  | 139 |
| 140 | KURNIASIH |  |  |  | 140 |
| 141 | ANJAR     |  |  |  | 141 |

*Dftz*

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA KERJA SAMA BAGI MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Sesi I</b>     | Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila |
| <b>Narasumber</b> | YM Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., M.S.                |
| <b>Moderator</b>  | Imam Margono   |

| No. | Pertanyaan Peserta  |
|-----|---|
| 1.  | Dewi Ratna_Bima<br>Bagaimana menurut bapak tentang banyaknya masyarakat yang ingin viral di media sosial. Padahal informasi tersebut awalnya salah namun karena telah menjadi viral dan disampaikan secara terus menerus, maka diyakini oleh masyarakat. Hal ini membuat anak muda malas untuk belajar sejarah dan mencari tau informasi seperti apa yang benar. Bagaimana menurut bapak terkait hal ini? |
| 2.  | Muhammad Mochtar_Sumenep<br>Di Sumenep terdapat tanah peninggalan keraton dan saat ini kami mengalami kesulitan untuk mengakui itu. Bagaimana agar hak-hak adat bisa diakui saat ini?   |

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA KERJA SAMA BAGI MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Sesi II</b>    | Eksistensi Masyarakat adat dalam proses pengujian undang-undang di MK |
| <b>Narasumber</b> | Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H.                                 |
| <b>Moderator</b>  | Bambang Sukmadi   |

| <b>No.</b> | <b>Pertanyaan Peserta</b>  |
|------------|--|
| 1.         | Muhammad Mochtar_Sumenep<br>Bagaimana menurut bapak tentang konsep pasal 22 B ayat (2)?  |
| 2.         | Raja_Semarang<br>Di lapangan banyak terjadi bahwa negara seringkali merebut hak adat. Bagaimana solusi dari bapak agar tidak terjadi benturan antara hukum nasional dan hukum adat?                          |
| 3.         | Ketum MAKN<br>Negara didirikan oleh adanya puncak-puncak perjalanan budaya. Saat ini negara menerima segala penuh demokrasi namun membuang nilai luhur bangsa. Bagaimana menurut bapak terkait hal tersebut? |

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA KERJA SAMA BAGI MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Sesi III</b>   | Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK |
| <b>Narasumber</b> | Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H.                           |
| <b>Moderator</b>  | Ardiansyah Salim   |

| No. | Pertanyaan Peserta  |
|-----|---|
| 1.  | <p><b>PYM RADEN PANJI MUCH. MUCHTAR ATMOKUSUMO, M. AK_Kesultanan Sumenep</b></p> <p>Dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat”. Hal ini belum tercermin pada Undang-Undang secara konstekstual dan berpihak pada masyarakat adat.</p> <p>Begitu pun dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, kekayaan alam dikuasai oleh negara, namun di daerah daerah juga masyarakat adat memiliki kekayaan alam itu. Ini yang kadang kali menjadi permasalahan di daerah, termasuk di Sumenep.</p> <p>Mungkin Prof. Guntur bisa memberikan interpretasi atau masukan terkait pada Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945?</p> <p>Yang kedua, kami harapkan pada suatu ketika ada Hari Masyarakat Adat. Saat ini kami merasa terpinggirkan.</p>   |
| 2.  | <p><b>Rusdianto_Kerajaan Gorontalo</b></p> <p>Pelaksanaan adat di daerah itu masih bersifat seremoni, hanya dibutuhkan pada kegiatan kegiatan yang difatnya seremonial, baik dalam keiatan gelar upacara atau pemberian gelar adat. Namun dalam konteks keseharian bagaimana masyarakat adat menjadi referensi atau kebijaksanaan dari daerah itu seperti tidak ada kebijaksanaan secara langsung.</p> <p>Kemudian, terkait <i>restorative justice</i>, saya kira ini sangat bagus sekali. Yang menjadi persoalan itu apakah <i>restorative justice</i> ini tidak bertabrakan dengan perundang-undangan? Apa yang akan dilaksanakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan pada tingkat bawah agar pada hari ke depannya tidak menghadapi gugatan-gugatan?</p> <p>Kami juga ingin mendapatkan informasi dari Bapak Sekjen, dimana posisi lembaga adat dan bagaimana legitimasinya?</p> <p>Yang terakhir, harapan kami Majelis Adat Kerajaan Nusantara, mungkin bisa mendapat dukungan dari MK untuk disetujui DPR UU Majelis Adat adalah bagian dari hukum nasional, agar kami bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga tidak diabaikan.</p> |
| 3.  | <p><b>YM PANGERAN HASMINTO DACHLAN, SH., M. Si_KERAJAAN MEKONGGA, SULTRA</b></p>  |

|    |  |
|----|--|
|    | <p>Ada kasus terkait tanah adat diambil oleh pemerintah. Malah ada yang mengatakan tidak ada tanah adat.</p> <p>Bagaimana caranya agar hak-hak kami sebagai masyarakat adat bisa menikmati bagian dari hasil wilayah adat itu?</p> <p>Kemudian, mengenai HWKN khususnya dalam Pemilu, apa kira-kira yang bisa dilakukan sehingga masyarakat tidak menerima uang dalam memilih seseorang sehingga pilihannya benar-benar dari hati nurani?</p>  |
| 4. | <p><b>YM PROF. Dr. H. ANDI AHMAD RUSLAN, SH., MH. _Makassar</b></p> <p>Pasal 28 butir c ayat 1 hak terkait pendidikan dan ada kata kata seni dan budaya. Kata budaya saya kaitakan dengan Pasal 18B ayat 2 itu. Dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, pada lampirannya ada yg mengatur tentang pemerintahan adat daerah, namun dalam UU Itu tidak memuat acuan berapa jumlah itu yg dibentuk. Yang berkembang di kabupaten/kota itu bisa ada banyak (5 atau 6 bahkan). Hal ini bisa menyebabkan benturan di daerah.</p> <p>Menurut saya ada 2 pilihan. Pertama, UUnya diubah dengan memberikan acuan kepada orang atau pihak yang akan diberikan delegasi. Kedua, DPRD ini harus menangani kasus-kasus seperti ini. Mohon pandangannya Prof?</p> |

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA KERJA SAMA BAGI MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Sesi IV</b>    | Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Indonesia |
| <b>Narasumber</b> | Andi Suharlis, SH., MH.   |
| <b>Moderator</b>  | Bangkit Panji Anarogo   |

| No. | Pertanyaan Peserta   |
|-----|--|
| 1.  | <p>Bonoan_Lampung</p> <p>Saat ini negara telah mengakui kesatuan masyarakat hukum adat namun di lapangan daerah tidak mengakui adanya keraton dan kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia merdeka, termasuk daerah tidak memberikan anggaran kepada kerajaan-kerajaan tersebut. Bagaimana menurut bapak?</p>   |
| 2.  | <p>Anonim_Kupang</p> <p>Terdapat 2 aset yaitu aset keluarga kerajaan dan aset wilayah kerajaan. Saat ini aset-aset tersebut belum jelas karena pemerintah daerah belum mengakui hal tersebut. Bagaimana solusi terkait hal tersebut menurut bapak?</p>   |
| 3.  | <p>Anonim_Sulawesi Utara</p> <p>Saat ini harta kerajaan sudah banyak yang dijual oleh pemerintah. Bagaimana solusi menurut bapak?</p>  |
| 4.  | <p>Muhammad Mochtar_Sumenep</p> <p>Di Sumenep terdapat tanah peninggalan keraton dan saat ini kami mengalami kesulitan untuk mengakui itu. Bagaimana agar hak-hak adat bisa diakui saat ini?</p>   |
| 5.  | <p>Anonim_Wakatobi</p> <p>Terkait pengakuan masyarakat hukum adat, apakah lembaga adat yang baru dibentuk termasuk sebagai masyarakat hukum adat dan wajib diberikan honor oleh pemerintah daerah?</p> <p>Ketika sudah keluar suatu keputusan Mahkamah Agung terkait pemilihan sultan dan di masyarakat hukum adat itu sendiri sudah memiliki hukum adat tertentu tentang pemilihan sultan, hukum manakah yang akan kita ikuti? Putusan dari MA atau hukum adat?</p> |

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA KERJA SAMA BAGI MAJELIS ADAT KERAJAAN NUSANTARA

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Sesi IV</b>    | Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme dalam Bingkai Konstitusi |
| <b>Narasumber</b> | Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E.                                   |
| <b>Moderator</b>  | Imam Margono   |

| No. | Pertanyaan Peserta   |
|-----|--|
| 1.  | Sultan Jailolo Halmahera Malut<br>BNPT sering2 turun di lapangan dan koordinasi dengan kerajaan2 untuk memantau perkembangan terorisme.        |
| 2.  | Kesultanan Buton<br>1 hal yang paling saya takuti terkait terorisme adalah doktrin. Bagaimana cara memutuskan mata rantai doktrin2 terorisme ? |
| 3.  | Kerajaan Fakfak<br>Apa upaya BNPT untuk pencegahan terorisme ?<br>Bagaimana dengan kasus KKB ?   |

# ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



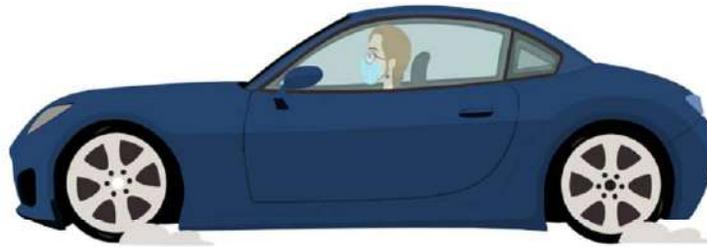
Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas  $37,5^{\circ}\text{C}$ ), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

# REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi dengan cara *scan QR code* yang terdapat di *id-card* peserta

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun *SIMULTAN* masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun SIMULTAN masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

# PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan  
Pusdik akan dibersihkan dengan  
menggunakan disinfektan